

Editor:
Sali Susiana

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: DIMENSI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xii+226 hlm.; 15.5x23 cm
ISBN: 978-602-1247-52-5
Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Mohammad Mulyadi
Tri Rini Puji Lestari
Faridah Alawiyah
Dinar Wahyuni
Herlina Astri
Dina Martiany
Edmira Rivani
Sri Nurhayati Qodriyatun

Editor:

Sali Susiana

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta
Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismmas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok
Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya para Peneliti Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menerbitkan buku yang bertajuk “Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan”.

Buku ini terdiri dari tiga bagian, *pertama*, berisi kajian tentang dimensi sosial dari pembangunan berkelanjutan. Secara khusus bagian ini menyoroti konsep pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan kesehatan, program Indonesia pintar, penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender. *Kedua*, berisi analisis tentang dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan. Bagian ini menelaah tentang peran sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara bagian *ketiga* berisi kajian tentang dimensi lingkungan yang secara khusus menelaah mitigasi dan adaptasi pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Akhirnya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para peneliti P3DI Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini, serta berharap semoga di masa mendatang peneliti P3DI dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data
dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

PROLOG

Pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah isu baru. Pada era sebelum pembangunan berkelanjutan digaungkan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan bagi dilaksanakannya suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Akan tetapi pada era pembangunan berkelanjutan saat ini, tiga tahapan pembangunan wajib dilakukan oleh setiap negara. Tahap pertama dasar pertimbangannya adalah keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangannya pada aspek keadilan sosial. Dan pada tahap ketiga, dasar pertimbangan mencakup aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat.

Gagasan pembangunan berkelanjutan dimulai ketika *Brundtland Commission* merumuskan dan mendefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pembangunan sebagai sebuah gagasan, prinsip, dan konsep berkaitan dengan bagaimana hal ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Praktik-praktik pembangunan berkelanjutan terkait juga relasinya dengan pemerintah.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan.

Kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi. Konsep ini mengandung asumsi bahwa sifat sebuah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didasarkan atau sesuai dengan perencanaan infrastrukturnya.

Beberapa dimensi ruang wilayah dari pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan. Merupakan masalah mendasar yang harus segera ditanggulangi. Kemiskinan adalah salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan dampak negatif dari pembangunan. Sebaliknya kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan.
2. Pola Konsumsi dan Pola Produksi. Pola konsumsi kebutuhan dasar dan pola hidup melalui pola produksi yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Selama ini belum ada kebijakan yang secara eksplisit mendorong pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. Di kalangan masyarakat kota, telah berkembang gaya hidup konsumtif yang tidak lagi mengonsumsi atas dasar nilai guna dan nilai pakai, tetapi berdasarkan simbol, citra, atau *image*.
3. Dinamika Kependudukan. Dalam perencanaan pembangunan, dilakukan upaya untuk memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan lingkungan, serta dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kemerosotan sumber daya alam, yakni dengan menekan angka kelahiran, sehingga tercipta keseimbangan antara penduduk dan lingkungan dalam satu wilayah dan/atau antarwilayah.
4. Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan. Merupakan hal yang penting, sebab tingkat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Hubungan ini bersifat timbal balik, terkadang pembangunan sosial ekonomi akan memengaruhi kualitas lingkungan, terkadang kualitas lingkungan akan memengaruhi kesehatan, dan kesehatan yang merupakan modal dasar dalam pembangunan akan memengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Pemenuhan

kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang layak sangat menentukan terhadap kesehatan.

5. Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Dalam pemanfaatan ruang wilayah, dengan dinamika kependudukan yang terus berkembang akan didominasi untuk permukiman (*human settlement*). Pada suatu permukiman (baik perkotaan maupun pedesaan), 40% sampai dengan 60% akan didominasi oleh kawasan perumahan.

Aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan, namun menekankan peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya. Dengan demikian, bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan, yang akan dilihat melalui berbagai dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sesuai dengan judulnya, maka bagian pertama akan menyajikan dimensi sosial pembangunan berkelanjutan. Pada bagian ini terdapat enam tulisan yang membahas mengenai beberapa aspek. Dimulai dengan Bab I, yang memuat tulisan Mohammad Mulyadi berjudul “Pembangunan: Analisis Kritis Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia”. Pada Bab II, Tri Rini Puji Lestari membahas kaitan antara kesehatan dan pembangunan berkelanjutan melalui tulisan berjudul “Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Dalam Bab III Faridah Alawiyah memaparkan kaitan antara aspek pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan dalam tulisan berjudul “Program Indonesia Pintar dan Pembangunan Berkelanjutan”. Pada bab selanjutnya, yaitu Bab IV, kemiskinan sebagai salah satu wajah pembangunan ditampilkan oleh Dinar Wahyuni melalui tulisannya yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Komite Sekolah Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. Kemiskinan juga menjadi fokus

bahasan Herlina Astri, yang menulis tentang “Pembangunan Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan” yang merupakan tulisan pada Bab V. Bagian pertama buku ini ditutup oleh sebuah tulisan berperspektif gender berjudul “Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals*” yang ditulis oleh Dina Martiany.

Bagian kedua buku ini menampilkan kaitan antara aspek ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan. Edmira Rivani menuliskannya dalam Bab VII melalui tulisan berjudul “Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Sebagai penutup buku ini, dimensi lingkungan sebagai salah satu dimensi dalam pembangunan berkelanjutan juga menjadi fokus bahasan. Hal itu dituangkan oleh Sri Nurhayati Qodriyatun ke dalam tulisan berjudul “Upaya Mitigasi dan Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim”.

Jakarta, Oktober 2015

Sali Susiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	v
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN PERTAMA: DIMENSI SOSIAL

BAB I PEMBANGUNAN: ANALISIS KRITIS UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA

<i>oleh: Mohammad Mulyadi</i>	3
I. Pendahuluan	3
II. Konsep Pembangunan	5
III. Paradigma Pembangunan Sosial	9
IV. Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat	11
V. Realitas Masalah Pembangunan dan Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia	18
VI. Penutup	29
Daftar Pustaka	31

BAB II PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<i>oleh: Tri Rini Puji Lestari</i>	33
I. Pendahuluan	33
II. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	35
III. Pembangunan Kesehatan dalam Pencapaian Target SDGs	44
IV. Simpulan	50
Daftar Pustaka	52

**BAB III PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

oleh: Faridah Alawiyah55

- I. Pendahuluan55
- II. Program Indonesia Pintar61
- III. Tujuan, Kriteria Sasaran, dan
Mekanisme Program Indonesia Pintar66
- IV. Impelementasi PIP dan Permasalahannya.....71
- V. Penutup78
- Daftar Pustaka.....80

**BAB IV PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN
KOMITE SEKOLAH MENUJU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

oleh: Dinar Wahyuni.....85

- I. Pendahuluan85
- II. Memaknai Konsep Kemiskinan.....87
- III. Kemiskinan dan Pendidikan dalam
Pembangunan Berkelanjutan89
- IV. Pemberdayaan Komite Sekolah91
- V. Kemiskinan dan Pemberdayaan
melalui Pendidikan.....94
- VI. Komite Sekolah sebagai Wujud Partisipasi
Masyarakat dalam Pendidikan96
- VII. Gambaran Komite Sekolah di Indonesia 100
- VIII.Strategi Pemberdayaan Komite Sekolah..... 101
- IX. Penutup 105
- Daftar Pustaka..... 107

**BAB V PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

oleh: Herlina Astri..... 111

- I. Pendahuluan 111
- II. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia..... 112
- III. Kondisi Kemiskinan di Indonesia..... 116
- IV. Penanganan Kemiskinan..... 118
- V. Penutup 122
- Daftar Pustaka..... 124

**BAB VI KESETARAAN GENDER DALAM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(SDGs)**

oleh: Dina Martiany 125

I. Pendahuluan 125

II. Proses Menuju
Sustainable Development Goals (SDGs)..... 129

III. Kesetaraan Gender dalam
Sustainable Development/SDGs..... 136

IV. *Mainstreaming* Perspektif Gender dalam SDGs 143

V. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Perempuan dan
Anak Perempuan 144

VI. Penutup 151

Daftar Pustaka..... 152

**BAGIAN KEDUA
DIMENSI EKONOMI**

**BAB VII PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

oleh: Edmira Rivani..... 157

I. Pendahuluan 157

II. Peran Sektor Pertanian dalam
Pembangunan Berkelanjutan 158

III. Permasalahan Utama Bidang Pertanian..... 163

IV. Agenda Kebijakan 170

V. Penutup 172

Daftar Pustaka..... 174

**BAGIAN KETIGA
DIMENSI LINGKUNGAN**

**BAB VIII UPAYA MITIGASI DAN
ADAPTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM**

oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun..... 179

I. Pendahuluan 179

II. Kota Berketahanan Iklim: Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim	182
III. Upaya Mitigasi dan Adaptasi Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim.....	188
IV. Penutup	205
Daftar Pustaka.....	208
EPILOG	211
INDEKS	217
BIOGRAFI PENULIS	222

BAGIAN PERTAMA
DIMENSI SOSIAL

BAB I

PEMBANGUNAN: ANALISIS KRITIS UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA

Mohammad Mulyadi

I. Pendahuluan

Isu pembangunan tidak lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan, di mana proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Munculnya isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seiring dengan gagasan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji oleh berbagai negara di dunia.

Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam UNCHE (*United Nations Conference on the Human Environment*) melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm Swedia. KTT ini merupakan pertemuan pertama kali yang berupaya mendorong paradigma pembangunan berkelanjutan dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin dunia dan pakar-pakar lingkungan. Fokus pertemuan adalah evolusi bagi konsep perlindungan lingkungan hidup manusia sebagai elemen krusial dalam agenda pembangunan.

Pada pertemuan tersebut sudah digali konsep keberlanjutan yang menyatakan hubungan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial, meski belum memberikan rumusan bagi pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Hasil-hasil pertemuan UNCHE dikenal sebagai *Stockholm Declaration*, yang merumuskan 2 norma, yaitu (1) prinsip 21 yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan lintas batas internasional; dan (2) prinsip 24 yang berkaitan dengan kewajiban bekerja sama.

Hasil monumental dari pertemuan tersebut adalah dibentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1975 yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama lingkungan internasional. Di tingkat nasional, negara-negara mulai merancang atau memperbaiki kelembagaan lingkungannya, baik organisasi lingkungan maupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut lingkungan (Rogers *et al.*, 2008).

Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut mengambil langkah-langkah seperti mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972 untuk membentuk panitia antardepartemen yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Hasil kerja panitia, dianut pertama kali dalam GBHN Indonesia tahun 1973 dengan nama pembangunan berwawasan lingkungan. Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975 yang merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi, dan politis dari pola-pola tersebut.

Pembangunan yang ada selama ini sering dikonotasikan sebagai pembangunan ekonomi. Hal ini dilandasi asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan kemakmuran bagi semua rakyat. Selanjutnya keberhasilan pembangunandiukur dengan GNP yang tinggi, inflasi yang rendah, dan stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing. Padahal pencapaian ekonomi tersebut sangat sangat bergantung padasituasi dan kondisi ekonomi politik global, yang tentu saja tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh negara manapun, termasuk Indonesia.

Belajar dari perjalanan pembangunan yang telah ditempuh sejak negara kita merdeka, pendekatan pembangunan sudah selayaknya diubah. Penekanan pada pembangunan ekonomi ternyata lebih banyak menghadirkan ketidakpastian. Padahal Indonesia memerlukan suatu kepastian berkesinambungan dalam mengarahkan pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Karena itu, fokus perhatian pembangunan harus diarahkan pada pembangunan manusia.

Dengan menempatkan fokus pada pembangunan manusia, maka pola pikir di kalangan pemerintah dan masyarakat bahwa upaya untuk memperbanyak pilihan-pilihan seperti kesehatan dan pendidikan sebagai penghamburan biaya harus diubah. Pola pikir yang harus ditanamkan adalah pembangunan manusia merupakan investasi untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawakehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

II. Konsep Pembangunan

Sebelum membahas tentang konsep pembangunan manusia, ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang konsep pembangunan, karena konsep pembangunan manusia merupakan salah satu bentuk pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berawal dari sifat manusia yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Hal tersebut sudah merupakan dimensi biologis dan psikologis manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Semakin lama manusia hidup di dunia, semakin banyak pula tuntutan akan pemenuhan kebutuhan tersebut, yang tidak selamanya dapat diperoleh dengan mudah dari alam semesta ini. Semakin banyak manusia yang membutuhkannya semakin terbatas pula sumber pemenuhan kebutuhan tersebut. Keterbatasan sumber-sumber inilah yang menyebabkan manusia mulai berpikir, bagaimana cara untuk mendapatkan kebutuhan itu. Proses berpikir dan cara untuk memenuhi kebutuhan itulah yang akan menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, termasuk proses perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat ini pada dasarnya adalah proses perubahan, di mana pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan manusia tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat memiliki *community power*. Menurut Nelson W. Polsby dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences* (1972) sebagaimana dikutip Ndraha (1987:40) bahwa suatu masyarakat bisa kehilangan kekuatannya jika masyarakat itu mengalami *community disorganization*, karena itu untuk mengatasinya, maka *community development* atau pembangunan masyarakat dilancarkan.

Pengertian perubahan sosial yang direncanakan dan diarahkan adalah suatu usaha yang direncanakan untuk memodifikasi sikap dan tingkah laku individu atau kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, yang dilakukan oleh agen perubahan dengan cara memperkenalkan ide-ide baru atau mengadakan inovasi ke dalam sistem sosial untuk mencapai tujuan seperti yang direncanakan oleh para agen tersebut atau organisasinya (pemerintah, LSM, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat). Birokrasi merupakan agen perubahan sosial. Birokrasi meliputi birokrasi publik (yang beraktivitas dalam struktur pemerintahan) dan birokrasi privat (yang beraktivitas dalam kehidupan organisasi swasta).

Pelaksanaan pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang dengan strategi ekonomi, ternyata tidak menjamin distribusi pendapatan nasional dan harapan "*trickle down effect*", bahkan tidak menguntungkan sekelompok masyarakat miskin

(Supriatna, 2003:15). Strategi pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sering mengabaikan masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok komunitas, sehingga masalah pembangunan pada negara berkembang semakin kompleks yang ditandai dengan pengangguran, urbanisasi, marginalisasi kemiskinan.

Pada akhir dasa warsa 1950-an istilah 'pembangunan' sering dianggap sebagai 'obat' terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya 'Teori Pertumbuhan'. Menurut Clark (1991:20) "pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat 'pembangunan' sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan".

Sekitar tahun 1980-an, strategi pembangunan mulai bergeser menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi ini pun masih mengalami masalah lainnya, yaitu adanya ketergantungan negara berkembang kepada negara maju berupa investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman. Kemudian sejak memasuki abad ke-21 muncul strategi baru, yaitu diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan konsep pembangunan manusia (*human development*).

Dengan mengutip Denis Gaulet, Suwandi (1997:5) menjelaskan bahwa dalam usaha menuju kehidupan yang baik, sedikitnya ada tiga pokok (*core values*) sebagai konsep pokok dalam memahami pembangunan yaitu: kemandirian hidup (*life sustenance*), harga diri (*self esteem*), kemerdekaan (*freedom*). Melihat konsepsi yang diberikan oleh Suwandi tersebut, jelas bahwa proses pembangunan dititik beratkan pada bagaimana individu-individu yang menjadi objek pembangunan harus mampu mengembangkan sikap mental kemandirian, guna mendukung proses pembangunan yang dijalankan.

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan tersebut, maka pembangunan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Siagian (1992:1): Suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

2. Tjokroamidjojo (1992:13): Proses pengendalian usaha (administrasi) negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
3. Supriatna (2003:29): Sebagai sistem mencakup komponen a) masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia dan alam, budaya, kelembagaan masyarakat; b) proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan; c) keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Dari beberapa pengertian atau definisi tentang pembangunan itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung pengertian:

1. Pembangunan sebagai suatu perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai suatu proses usaha/kegiatan perubahan yang secara sadar dilakukan, artinya pembangunan didasarkan pada suatu rencana yang disusun secara baik untuk satu kurun waktu tertentu.
3. Pembangunan sebagai pertumbuhan yaitu kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan sering diidentikkan dengan perubahan. Dengan demikian, jika membicarakan pembangunan, maka kata kuncinya adalah perubahan (baik yang berlangsung secara lambat atau evolusi maupun secara cepat atau revolusi) yang pada akhirnya mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menggunakan sumber-sumber yang ada.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan modal dasar pembangunan yang utama. SDM yang mana? SDM yang menjadi modal dasar

pembangunan adalah manusia yang terampil dan terdidik. Manusia yang terdidik, terlatih, dan terampil akan mampu menangani masalah. Sebaliknya manusia yang tidak terdidik, terlatih, dan terampil justru akan memberatkan negara karena mereka tidak bisa menjadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah pembangunan, tetapi justru menjadi beban.

Dengan demikian, ketika dikatakan bahwa SDM sebagai modal dasar pembangunan tersebut harus dilihat dari dua sisi. Jika SDM yang ada adalah orang-orang yang terdidik dan terlatih maka banyaknya orang justru menjadi positif karena akan mampu menangani masalah-masalah pembangunan. Sebaliknya jika SDM yang ada tersebut tidak terdidik dan terlatih maka banyaknya SDM menjadi beban dalam pembangunan.

III. Paradigma Pembangunan Sosial

Berkembangnya konsep pembangunan sosial karena kekecewaan akibat kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, di mana ukuran utamanya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan per kapita. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan, ternyata memberikan perhatian yang cukup terhadap pembangunan di bidang sosial. Misalnya perhatian kepada manusia dan lembaga-lembaga sosial yang harus menjalankan pembangunan itu. Investasi di bidang sumber daya manusia, menjadi tema pokok pembangunan sosial sama pentingnya dengan investasi untuk prasarana ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia menunjukkan pertumbuhan tidak hanya dihasilkan penambahan stok modal dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga yang kemudian disebut *total factor productivity*, akibat perubahan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Atas dasar itu berkembang konsep *human capital*. Investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan dan kesehatan merupakan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dibanding investasi pada modal fisik. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi manusia namun sudut pandangnya berbeda.

Pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya, sekarang ini berlangsung dalam keadaan dunia yang sedang mengalami proses globalisasi. Hal ini berarti bahwa proses

pembangunan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses globalisasi. Pembangunan sosial merupakan suatu pendekatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan merupakan suatu proses perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan sosial berupaya menawarkan perspektif makro tentang kesejahteraan sosial yang juga berhubungan dengan berbagai macam strategi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk semua penduduk, melalui pendekatan yang komperhensif dan dinamis untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kebijakan pembangunan sosial terkonsentrasi pada apa yang diimplikasikan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pembangunan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*). Kebijakan pembangunan sosial merupakan ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak warganya. Terkait dengan kondisi saat ini, titik penting pembangunan sosial adalah mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan, keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindakan kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Menurut Midgley (2005:37) pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Di mana dapat dilihat bahwa pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Sementara Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai

pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial, kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit (Kartasasmita, 1996:43). Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektivitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan kelompok yang tidak beruntung (*disadvantaged group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*).

Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, kenakalan remaja, anak dan jompo terlantar. Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual pembangunan sosial terdiri dari pembangunan manusia (*human development*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare development*). Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (*human capital*) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka melek huruf) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup). Sementara itu, pembangunan kesejahteraan sosial lebih berorientasi pada peningkatan modal sosial (*social capital*) yang dapat dilihat dari indikator keberfungsian sosial (*social functioning*) yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial serta menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan.

Lebih lanjut Midgley (2005:38–41) mengajukan 8 aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (*interdisipliner*) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda.
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses.
4. Proses perubahan yang progresif.
5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensi.
6. Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi.
7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif atau universal.
8. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pembangunan sosial adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses ekonomi dan sosial sebagai kesatuan dari proses pembangunan yang dinamis, membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosial tersebut adalah (a) *social services*, (b) *social welfare services*, dan (c) *community development*. Meminjam asumsi Todaro (M. P. Todaro, 1989:92), ada 3 sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok; (2) meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar

terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu atau sebagai suatu bangsa; (3) memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional (Prayitno, 2009:56).

IV. Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan sosial manusia. Hal ini ditegaskan secara internasional melalui Deklarasi Hak Atas Pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ Dalam deklarasi PBB tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengharuskan proses pembangunan suatu negara memerhatikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Negara bukan hanya membuat kebijakan yang memberikan keistimewaan bagi sebagian masyarakat yang memiliki akses besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Dalam Pasal 2 deklarasi tersebut ditekankan bahwa manusia adalah *stakeholder* utama dalam pembangunan sekaligus merupakan peserta aktif dan penerima manfaat dari pembangunan. Pasal tersebut juga mengharuskan keterlibatan aktif negara dalam mengambil sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan, yaitu melalui prinsip keterlibatannya secara aktif, bebas, dan berkeadilan.

Menurut Rochman (1997:32) peran negara dalam menjamin dan memenuhi HAM dalam pembangunan terlihat pada peran aktif negara dalam menjamin dan memenuhi hak tersebut. Peran negara ini harus dilaksanakan, karena tujuan dari kebijakan negara itu sendiri adalah untuk mengubah sebuah kondisi menjadi lebih baik. Di samping itu, di tengah struktur kapitalisme global yang timpang, beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa negara tidak bisa menyerahkan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

¹ Disahkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 4 Desember 1986.

kepada mekanisme pasar atau kalangan swasta. Asumsinya bahwa peran swasta dalam penyediaan pelayanan publik dasar tidak akan pernah lepas dari kepentingan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*). Konsekuensi logis dari hal ini adalah kenaikan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dasar tersebut. Dengan demikian, fungsi negara tidak dapat direduksi hanya menjadi penjaga keamanan, penegakan hukum pelaksanaan pekerjaan dan pranata-pranata umum saja.

Pada dasarnya, terdapat tiga domain dalam sebuah proses pembangunan, yaitu domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan di antara ketiga domain tersebut menghasilkan paradigma pembangunan yang kemudian dikenal sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu:

1. Pembangunan sosial (*social development*);
2. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*);
3. Pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*).

Kelemahan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah tidak adanya tolok ukur pada ketiga domain tersebut. Tolok ukur tersebut harus mencerminkan berbagai isu penting dan aspirasi pemerintah serta aspirasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat merespon berbagai isu-isu penting. Menurut Abdoellah (2007:83-87) tolok ukur yang harus digunakan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan yang pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembangunan berkelanjutan yang pro-lingkungan hidup;
3. Pembangunan berkelanjutan yang pro-rakyat miskin;
4. Pembangunan berkelanjutan yang pro-kesetaraan gender;
5. Pembangunan berkelanjutan yang pro-lapangan pekerjaan;
6. Pembangunan berkelanjutan yang anti-korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya tolok ukur yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka perkembangan pembangunan dapat dipantau secara periodik apakah berfokus pada pembangunan manusia atau tidak. Hasil

pantauan tolok ukur perkembangan pembangunan yang berfokus pada manusia merupakan tolok ukur eksekutif baik di pusat atau di daerah. Dengan demikian enam pilar pembangunan berkelanjutan mempunyai peran ganda, yaitu sebagai panduan arah pembangunan berkelanjutan dan untuk memacu terlaksananya pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan manusia. Dengan menyimak besarnya masing-masing unsur yang digunakan untuk menghitung indeks bersangkutan, dapat diketahui unsur mana yang masih rendah, sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengoreksi unsur tersebut. Dengan demikian pada masing-masing tahap pembangunan, usaha dapat dikerahkan untuk memperkuat unsur yang lemah.

Sebagaimana dengan permasalahan di atas, pembangunan yang selama ini dilakukan di negara kita dan umumnya negara-negara lain selalu diidentikkan dengan pembangunan secara fisik (pembangunan infrastruktur). Akibatnya manusia sebagai subjek dan objek pembangunan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah Indonesia, padahal hakikatnya pembangunan yang dilakukan seharusnya berorientasi pada pembangunan manusia.

Untuk mencapai hal itu, pada tahun 1990, pertama kalinya UNDP mempublikasikan *Human Development Report* (HDR) yang berfokus pada pembangunan manusia. Fokus utama HDR lebih pada aspek-aspek nonfisik pembangunan. HDR disusun dan dipublikasikan terutama ditujukan untuk membantu tiap pemerintahan suatu negara yang rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mengembangkan model pembangunan yang secara holistik memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Tidak hanya sekadar mempertinggi pendapatan per kapita yang terkadang malah berdampak pada masalah ketimpangan.

HDR/IPM dikembangkan oleh ahli ekonomi bernama Amartya Sen (India) dan Mahbub ul Haq (Pakistan), dibantu oleh Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics) pada 1990. Sejak itu indeks ini digunakan pada laporan IPM tahunan Program pembangunan PBB. HDR merupakan salah satu instrumen penting bagi UNDP.

Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM atau dalam bahasa Inggrisnya *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah

dalam 3 dimensi dasar pembangunan, yaitu: (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/ tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak.

Pada dasarnya, ide dan gagasan tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*), diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Dengan demikian, pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak.

Strategi pembangunan yang berpusat pada manusia memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi serta harapan individu dan kolektif dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada manusia pada intinya adalah untuk memberantas kemiskinan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada manusia atau rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi, termasuk di dalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Secara sederhana, Korten (1993:183) menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatian pada: Industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian; Daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan; Pemilikan aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas; Investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang sedikit dan bukannya yang banyak; Penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada manusia merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah. Akan tetapi, peningkatan tersebut harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Karena itu pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Konsep pembangunan berpusat pada manusia memandang inisiatif dan kreativitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten (1993:84) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu:

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
2. Kesadaran bahwa walau sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin;
3. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan agar mereka dapat memberikan ide atau gagasan yang menjadi kebutuhan dasar mereka.

Paradigma lama pembangunan lebih menekankan pada dominasi peran pemerintah baik sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan, sedangkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Dengan adanya paradigma baru pembangunan, maka peran pemerintah hanyalah sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akses resmi untuk berperan bersama dengan pemerintah.

V. Realitas Masalah Pembangunan dan Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia

Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya hingga kini, kemiskinan tetap menjadi isu utama dalam proses pembangunan. Kemiskinan memang menjadi salah satu masalah utama umat manusia di belahan bumi manapun sejak dulu. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum, bukan merupakan fenomena yang bersifat khusus pada masyarakat yang berlatar belakang, suku bangsa, dan agama. Namun kemiskinan menjadi ukuran martabat suatu bangsa.

Bangsa yang rakyatnya makmur memiliki martabat dan akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Singapura misalnya, dari sisi geografis dan demografis bukanlah negara besar, tetapi karena kehidupan rakyatnya sejahtera, Singapura menjadi negara yang disegani dan diperhitungkan dalam setiap pergaulan internasional. Sebaliknya, dari sisi geografis maupun demografis Indonesia boleh dikatakan negara besar, tetapi karena jumlah penduduk miskinnya banyak dan pendapatan per kapita penduduknya rendah, Indonesia menjadi negara yang mudah dilecehkan dan didikte oleh negara lain.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan ke depan yang semakin berat. Di dalam negeri, terjadi arus demokratisasi dan otonomi yang deras. Sedangkan dari luar negeri, arus globalisasi dan perdagangan bebas semakin tidak tertahankan. Tanpa perencanaan pembangunan yang baik, Indonesia tidak akan mampu mengambil peluang dan mengantisipasi ancaman bagi penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan bisa dipandang sebagai dua hal. Sebagai sebab dan sebagai akibat. Sebagai sebab, kemiskinan adalah akar dari sebagian besar terjadinya tindak kriminalitas. Kita sering kali mendengar atau membaca berita tentang pencurian, perampokan atau pembunuhan yang bermotif kemiskinan ekonomi pelakunya. Tidak sedikit pula berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan yang disebabkan kemiskinan. Dari sisi ini, kita dapat memandang bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena yang dapat membuat hidup manusia menjadi sangat tidak berarti dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sedangkan sebagai sebuah akibat, kemiskinan merupakan suatu produk pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Beberapa pengamat sosial-ekonomi berpendapat bahwa pada dasarnya kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia

lebih disebabkan karena program pemerintah dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Perencanaan pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat akan menghasilkan peminggiran dan keterasingan. Masyarakat hanya menjadi penonton dari proses pembangunan yang dilakukan. Masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek. Pendekatan partisipatif menjadi syarat mutlak sebuah proses pembangunan. Partisipasi yang dimaksud meliputi keseluruhan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Dengan demikian, rakyatlah yang akan menjadi pembuat keputusan (*decision making*) dalam keseluruhan proses pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan pada era pemerintahan orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “*top-down*”. Dalam kaitan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meski model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan.

Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan *top down*) mendapat kritikan tajam, di mana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Sementara itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan menyejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Segala hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan tentu saja menjadi sebab rendah-tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia atau yang disebut dengan kemiskinan struktural. Banyak bukti yang dapat kita lihat di negeri ini yang menjadi penyebab kemiskinan struktural, misalnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mendarah daging pada pejabat tinggi sampai pejabat rendah di negeri ini. Usaha untuk memutuskan rantai lingkaran setan ini menjadi sulit disembuhkan. Begitu juga sistem perekonomian “kapitalistik” yang diterapkan di Indonesia sistem ekonomi itu sangat memihak golongan konglomerat yang semakin memperparah keadaan rakyat miskin.

Fenomena kapitalistik itu tampak dari menjamurnya minimarket yang membuat pasar-pasar tradisional dan warung-warung rakyat yang menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi pedagang menjadi sangat sulit untuk bertahan di tengah kepuangan ritel modern. Pemerintah seolah tutup mata, padahal keberadaan minimarket terus menggusur pedagang tradisional serta warung-warung rakyat ini.

Akibatnya para pedagang tradisional tersebut tidak mampu bersaing dan berada pada kondisi di mana ia harus gulung tikar. Bagi pedagang yang memiliki modal besar dalam berdagang, tentu tidak sulit untuk beralih profesi. Tetapi bagi mereka yang memiliki modal kecil, hasil pinjaman dari bank pula, tentu akan menjadi sulit dalam mempertahankan pendapatannya.

Dampak dari semua ini, perlahan tetapi pasti adalah rendahnya taraf hidup masyarakat (miskin). Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, aturan perundang-undangan seperti peraturan daerah atau peraturan pendukung lainnya sudah jelas. Dalam Perda DKI No. 2 Tahun 2002 sendiri sudah diatur zonasi antara toko modern dengan berbagai kelas dengan pasar tradisional atau dengan UKM yang berada di lingkungan tersebut. Persoalannya adalah ada oknum yang memegang pena dan dengan mudah memberikan izin, padahal persyaratan yang dimiliki untuk mendirikan pasar/toko modern tidak lengkap. Artinya perilaku birokrasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan uang.

Fenomena tersebut di atas adalah salah satu contoh bentuk pemiskinan yang disebabkan oleh perilaku birokrasi yang buruk. Rakyat yang harusnya dijadikan subjek pembangunan oleh negara, justru hanya menjadi objek pembangunan. Kekayaan negara yang

harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dijual melalui program privatisasi. Secara tidak langsung, usaha tersebut bagaikan merampok kekayaan rakyat untuk dipersembahkan pada golongan manusia lain yang sibuk menghabiskan umurnya untuk menumpuk kekayaannya. Ia sibuk dengan dirinya sendiri, berlomba-lomba memenuhi semua keinginannya (bukan kebutuhan) yang tidak terbatas, sedangkan orang yang ada disekitarnya sedang kesulitan mencari makan.

Tetapi yang paling utama, kemiskinan adalah produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan yang tidak adil. Mengapa distribusi sangat buruk? karena sistem dan kebijakan pengambil keputusanlah yang membuat itu semua. Sementara itu, kaum kaya dengan sejumlah modal yang dimilikinya mampu menambah kekayaannya dengan seenaknya, dan yang lebih parah lagi mereka mampu masuk kedalam jantung dan darah para pengambil kebijakan, sehingga sebagian besar produk kebijakan yang diambil adalah pesanan dari mereka kaum kaya agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya untuk menumpuk kekayaan yang dimilikinya. Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (*poverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi, ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari super struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Kemiskinan di negara ini muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (*economic overtone*) dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang memengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan struktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Menurut Sriharini (2001: 114–115) beberapa bentuk kebijakan yang berdampak pada kemiskinan adalah:

1. Rendahnya taraf pendidikan;
2. Rendahnya derajat kesehatan;
3. Terbatasnya lapangan kerja; dan
4. Kondisi keterisolasian.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Sriharini tersebut, maka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan pembangunan yang berdampak pada pembangunan, maka ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, dalam batang tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diprioritaskan. Dipenuhinya hak tersebut akan memberi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Khairuddin (2000:149) mengatakan bahwa: melalui pendidikan orang akan mampu untuk memikirkan dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di samping itu, daya serap bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi jelas lebih tinggi pula dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah. Seperti yang dinyatakan oleh Pounds & Garretson (1967:19) yang dikutip Khairuddin (2000:149–150) bahwa: *“In this periode of rapidly expanding knowledge it becomes of greater*

information to the individual to know how to solve his problem, how to find the information, when needed, and how to verify it." Dengan demikian taraf pendidikan yang sangat rendah pada umumnya bergandengan dengan informasi dan pengertian yang serba terbatas. Dengan demikian, segala kesempatan (*access*) pun serba terbatas. Pendidikan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya warga kurang mampu. Hal ini meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat miskin yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan angka pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan kriminalitas. Apabila pendidikan tidak mampu lagi menjadi pemutus rantai kemiskinan, maka anak-anak akan menjadi korban yang paling nyata dari dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam jangka panjang lemahnya investasi sosial di bidang pendidikan akan memperburuk keberdayaan masyarakat dan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sampai kini, bangsa ini belum menempatkan pendidikan sebagai panglima pembangunan nasional. Padahal bila dikaji dan ditafsirkan lebih mendalam kandungan UUD 1945 itu, ada dua sisi yang harus menjadi titik berat perhatian bangsa Indonesia. Pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Kedua, negara wajib menyukseskan bidang pendidikan melalui tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Sektor pendidikan sebenarnya tidak masuk dalam wilayah politik namun justru sering dipolitisasi oleh para pengambil kebijakan. Karena itu, DPR sebaiknya proaktif meminta penegasan dari pemerintah apakah pemerintah memang sungguh-sungguh memerhatikan sektor pendidikan nasional. Alokasi dana pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 ayat (4) dengan jelas mengamanahkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Tetapi dalam kenyataannya belum bisa terpenuhi, karena anggaran 20% tersebut seperti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi juga termasuk gaji guru. Sehingga dana yang benar-benar dialokasikan langsung untuk peserta didik tidak lagi mencapai 20%. Alangkah baiknya jika Pemerintah Daerah mampu menganggarkan sebenar-benarnya 20% dari anggaran APBD mereka

(tidak termasuk gaji guru), sehingga mereka tidak hanyaberkuat pada pemenuhan fasilitas dan infrastruktur dunia pendidikan semata tetapi dapat lebih memerhatikan bagaimana meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita. Sulitnya Pemerintah Daerah menambah alokasi dana pendidikan selain karena memang kemampuan daerah yang masih rendah juga sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat lainnya, di mana Pemerintah Daerah dihadapkan pada pilihan prioritas yang sangat berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah menyebabkan privatisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang membebani peserta didik dan orang tua kian menguat. Logikanya, guna mendukung program wajib belajar pemerintah menggratiskan pendidikan untuk jenjang SD s.d. SMP. Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM. Dana kompensasi bidang pendidikan yang bersumber dari pengalihan alokasi subsidi BBM direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa.

2) Meningkatkan Taraf Hidup Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain kecukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Selain itu jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dan biaya yang mahal merupakan penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang bermutu. Indikator ketiadaan akses, sebagai ukuran tingkat kesulitan

menjangkau tempat layanan kesehatan terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin sulit untuk menjangkau layanan kesehatan dan adanya kesenjangan antarwilayah dalam layanan kesehatan. Masalah lain adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Pemanfaatan layanan kesehatan oleh kelompok masyarakat miskin umumnya jauh lebih rendah dibanding kelompok kaya. Praktik petugas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat miskin adalah bidan dan mantri yang lokasinya terdekat dari tempat tinggal mereka. Kecenderungan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan bermutu. Masalah lain dalam perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah rendahnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan dan pelayanan kesehatan. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan jumlah tenaga medis terlatih yang melayani masyarakat miskin terutama pada daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan. Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Indikator lainnya yaitu tingkat jumlah kematian bayi. Masih tingginya penyebaran penyakit menular di masyarakat disebabkan oleh banyak faktor yaitu rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih di masyarakat dan kurangnya ketersediaan fasilitas air bersih serta sanitasi. Fenomena seperti ini biasanya terdapat di lingkungan pemukiman kumuh dan pinggiran sungai. Masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran sungai sangat tergantung pada perubahan permukaan air sungai. Pada saat musim kemarau, mereka terpaksa harus membeli air minum yang cukup mahal. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membeli, mereka terpaksa mengambil air dari sungai. Buruknya perencanaan anggaran di bidang kesehatan masyarakat dapat dilihat dari rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin sangat memprihatinkan. Masih banyak warga

miskin dan tidak mampu yang seharusnya mendapat jaminan pelayanan kesehatan gratis, ternyata masih banyak yang belum memperoleh pelayanan tersebut, walau Pemerintah Pusat telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan beberapa daerah memiliki Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sementara itu, bantuan kesehatan yang dialokasikan kepada rakyat miskin sebaiknya bukan hanya akses berobat secara gratis, karena kesehatan sama sekali tidak identik dengan berobat. Berobat hanyalah salah satu bagian dari upaya memelihara kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan fasilitas sehat untuk upaya mencegah sakit.

3) Menyediakan Lapangan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok pembangunan. Dalam hal ini lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Lapangan kerja juga merupakan sumber pendapatan. Dengan demikian Sumodiningrat (2003:5) menyatakan bahwa: Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang optimal. Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan sebagai cara memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar rakyat dapat hidup layak. Kesempatan kerja merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada orang lain untuk menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Pada waktu sekarang ini banyak data statistik yang mengungkapkan semakin tingginya tingkat pengangguran setiap tahunnya di Indonesia. Mengingat masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini sering kali menyebabkan mereka terpaksa

melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya. Belum berhasil diatasinya masalah ketenagakerjaan yang terpuruk ketika krisis dan kurangnya perluasan kesempatan kerja dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan belum adanya perbaikan. Tingginya tingkat pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus, karena usia muda merupakan transisi dari sekolah dan bekerja. Selain itu, usia muda merupakan tingkat usia yang paling rentan terhadap kemiskinan yang disebabkan karena tiga hal: (1) rumah tangga miskin mempunyai jumlah tanggungan (orang muda yang masih dalam tanggungan) besar; (2) kemiskinan sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak pemuda yang berasal dari keluarga miskin sehingga terpaksa bekerja di usia yang sangat muda untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biasanya mendapatkan pekerjaan yang tidak tetap dengan upah rendah; (3) kaum muda merupakan masa transisi ke arah mandiri, mereka pada umumnya menemukan kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif karena kurangnya pengetahuan dan integrasi dalam pasar kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang mampu memberi insentif peningkatan investasi industri yang bersifat padat karya, dan perlunya perlindungan pekerja terhadap kepastian kerja dan upah yang layak.

4) Memberikan Aksesibilitas kepada Masyarakat

Keterisolasian membuat penduduk yang tinggal di daerah itu sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Jika sakit, mereka harus pergi ke puskesmas di desa tetangga melintasi perbukitan. Jika ingin bersekolah mereka harus berjalan melintasi sungai masuk keluar hutan. Informasi tentang bagaimana mengolah sumber daya pertanian dan perikanan menjadi lebih bernilai pun mereka tidak dapatkan. Menjadi daerah yang terisolasi, tentu sangat sulit bagi masyarakatnya untuk berkembang. Keterisolasian membuat bahan kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal, distribusi sumber daya menjadi sangat sulit sehingga hasil produksi menjadi kurang bernilai. Di beberapa daerah, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi busuk akibat buruknya sarana jalan dan jembatan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mengantarkan hasil produksinya itu ke tempat lain. Di bidang pendidikan, keterisolasian tampak pada distribusi tenaga kependidikan yang minim, di beberapa

daerah ada sekolah yang gurunya harus mengajar dalam tiga kelas yang berbeda. Bahkan ada sekolah yang gurunya hanya satu orang, hal ini diperparah oleh kondisi jalan dan jarak sekolah yang harus ditempuh berpuluh-puluh kilometer untuk sampai ke sekolah tersebut. Di bidang kesehatan, keterisolasian tampak pada distribusi tenaga kesehatan yang minim, di beberapa daerah tidak tersedia puskesmas pembantu apalagi puskesmas yang layak sebagai tempat masyarakat untuk berobat. Hal ini diperparah oleh tidak adanya dokter, bidan dan mantri yang mau mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat untuk berobat. Oleh sebab itu, pembangunan daerah yang terisolasi ini merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah terisolasi ini tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah terisolasi memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Keempat penyebab yang diuraikan tersebut, yaitu keterbatasan pendidikan, keterbatasan kesehatan, keterbatasan lapangan kerja dan keterisolasian menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah, sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Begitu pun dengan rumah tangga miskin, pada umumnya mereka memiliki tingkat kesehatan yang rendah sehingga mereka sering sakit-sakitan dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi berikutnya. Keterisolasian dan keterbatasan lapangan kerjajuga menghambat pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan membatasi peran serta penduduk miskin dalam kegiatan pembangunan.

VI. Penutup

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) merupakan sebuah proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik maupun mental spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak yang bisa kita saksikan darirendahnya kualitas hidup manusia adalah sering kali masyarakat tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan dan bahkan mengalami penurunan kualitas kehidupan. Dalam istilah Robert Chamber dalam Sriharini (2007:115) disebut sebagai *deprivation trap* (perangkap kemiskinan). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perangkap kemiskinan adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi, sehingga kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Kesalahan negara dalam menata kualitas hidup manusia hingga menghasilkan kemiskinan struktural, disebabkan oleh penerapan sistem pembangunan yang berorientasi ekonomi. Menurut pandangan kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus diupayakan seminimal mungkin. Bahkan, diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata. Lalu, siapa yang berperan secara langsung menangani masalah sosial dan ekonomi? Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri atau swasta. Karena itulah, dalam masyarakat kapitalis kita jumpai banyak sekali yayasan. Di antaranya ada yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Selain itu, kita jumpai pula banyak program swastanisasi badan usaha milik negara. Peran negara semacam ini, jelas telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pemelihara urusan rakyat. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang yang kuat dan yang lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali. Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan berhak hidup.

Rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia saat ini adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme yang sangat individualistis. Dalam pandangan kaum kapitalis, meningkatkan kualitas hidup manusia merupakan tanggung jawab individu manusia itu sendiri. Kaum kapitalis menganggap kualitas hidup manusia bukan merupakan beban bagi umat, negara, atau kaum hartawan. Oleh karena itu, dengan memahami salah satu akar masalah kualitas hidup manusia, maka kita akan lebih mudah untuk memahami fenomena kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang terjadi di sekitar kita.

Kualitas hidup manusia Indonesia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek yang utama adalah sosial dan ekonomi. Karenanyarendahnya kualitas hidup manusia suatu negara atau masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, sikap hidup dan adat istiadat, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, seperti: faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Muara dari semua faktor penyebab rendahnya kualitas hidup manusia disebabkan oleh model pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi semata. Oleh karenanya, model pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi adalah tidak tepat. Model pertumbuhan ekonomi hanya mengejar indikator pendapatan, sementara pembangunan manusia bertujuan lebih luas hingga mencakup aspek sosial, kultural dan politik. Selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, pemerintah perlu meningkatkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan memudahkan akses masyarakat untuk mencapai, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, John. 1991. *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Hendargo, Imam. 1995. "Kemitraan Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan" (Makalah). Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Hikmat, Harry. 1995. "Paradigma Pembangunan dan Implikasi dalam Perencanaan Sosial" (tidak dipublikasikan). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta:CIDES.
- Korten, D. C. 1993. *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Midgley, James. 2005 *Pembangunan Sosial: perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rochman, Meuthia G. *etal.* 1997. *HAM Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM.
- Rogers PP, Jalal KF, dan Boyd JA. 2008. *An Introduction to Sustainable Development*. London: Glen Educational Foundation, Inc.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sriharini. 2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia 2003: Agenda Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Supriatna, Tjahya. 2003. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suwandi, I Made. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Tjokroadmijojo, Bintoro, 1992. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Sumarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Djambatan.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB II

PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tri Rini Puji Lestari

I. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak setiap manusia. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia artikel ke-25 menyebutkan bahwa “tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan” (“*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care*”). Artikel ini kemudian digemakan dalam konstitusi WHO, dan diratifikasi oleh banyak konvensi internasional lainnya.¹

Di Indonesia, kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi.²

Pembangunan di bidang kesehatan pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga

¹ Farid Anfasa Moeloek, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat”, Makalah Disajikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14–18 Juli 2003, hlm. 2.

² Titin Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 2.

merupakan modal penting bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Pada lingkup terkecil di level keluarga, kesehatan adalah modal untuk lebih produktif dalam bekerja dan juga meningkatkan kapasitas belajar bagi anak-anak sekolah. Di lingkup yang lebih luas, penduduk yang memiliki tingkat kesehatan baik menjadi modal berharga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan sebagainya. Jika suatu negara dengan kesehatan rakyatnya kurang terurus, akibatnya sumber daya manusianya rendah dan akan sulit bersaing dengan negara-negara lain di tengah sengitnya kompetisi global serta akan lebih berat menghadapi tantangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan program-program pembangunan berkelanjutan yang direncanakan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik pada masyarakat.

Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara telah menandatangani deklarasi yang disebut sebagai *Millennium Declaration*. *Millennium Declaration* ini mengandung 8 poin yang harus dicapai (*Millennium Development Goals*) sebelum tahun 2015. Pertama, memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu hamil. Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Dan kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut masing memiliki target, ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.³

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan masih banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah, seperti menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan penyebaran virus HIV/AIDS, serta akses air bersih dan sanitasi dasar. Untuk itu pada awal Januari 2015, PBB telah mengubah arah dan tujuan pembangunan global dari MDGs 2015 menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

³ Bappenas, Ringkasan Eksekutif. *Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs 2015*, Jakarta: Bappenas, 2014. hlm. 1.

atau pembangunan berkelanjutan 2030. SDGs adalah upaya untuk melanjutkan tindak lanjut secara luas dipublikasikannya MDGs, yang telah dilaksanakan dari tahun 2000 sampai 2015. SDGs juga dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai dan SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya.⁴

Pembangunan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena terciptanya masyarakat sehat adalah salah satu indikator dalam keberhasilan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Ada dua prinsip dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan ketidakpastian (*uncertainty*). Kedua prinsip inilah yang akan menuntun arah pembangunan menuju pembangunan yang berkeadilan dan pencapaian keseimbangan tiga dimensi kehidupan yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.⁵

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian berikut ini akan menguraikan lebih lanjut bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.

II. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sejak Januari 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan SDGs menggantikan MDGs sebagai acuan perundingan pembangunan. SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang

⁴ Renata Irena, "SDGs Gantikan MDGs sebagai Acuan Perundingan Pembangunan", <http://www.antarane.ws.com/berita/453769/sdgs-gantikan-mdgs-sebagai-acuan-perundingan-pembangunan>, diakses 9 September 2015.

⁵ *Ibid.*

mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.⁶

Menurut ketua *World Commission on Environment and Development* (WCED) Gro Harlem Brundtland dalam Baker (2006), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan.⁷

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, **pertama** indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator **kedua** yang melekat pada lingkungan kecilnya (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator **ketiga** melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.⁸

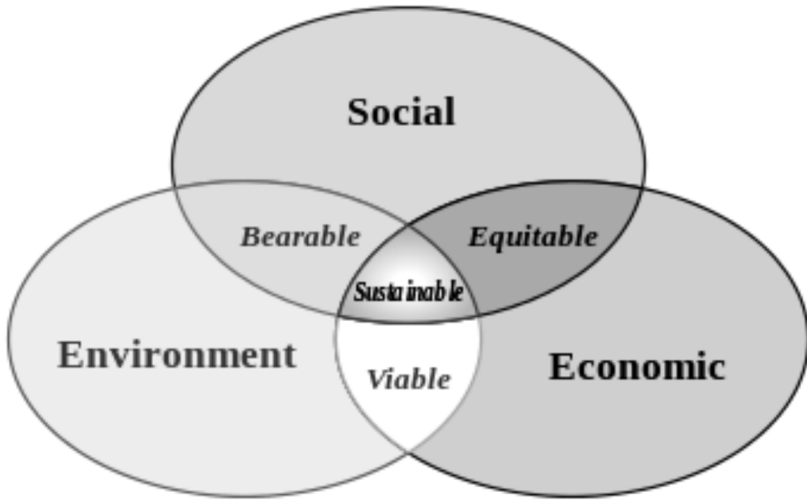
Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005*⁹ menyebutkan, ada tiga dimensi yang saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan, yaitu:

⁶ “United Nations Conference on Environment & Development”, <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>, diakses 10 Maret 2013.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ “Portal Pembangunan Berkelanjutan”, http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Sustainable_development, diakses 9 Juni 2015.



Gambar 1.

Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations

Pada gambar di atas, skema pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) berada pada titik temu tiga pilar tersebut. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan menekankan pada penyelesaian masalah secara terintegrasi dan komprehensif dengan memerhatikan ketiga pilar tersebut. Untuk **pilar lingkungan**, konsep pembangunan berkelanjutan didukung oleh tiga perjanjian dan konferensi, yaitu *Stockholm Conference* tahun 1972, *Brundtland Commission* tahun 1987, dan *Earth Summit* tahun 1992. Sedangkan dalam **pilar ekonomi**, pembangunan berkelanjutan ini didukung oleh adanya perdagangan yang seimbang yang dirumuskan oleh *World Trade Organizations* (WTO) dengan menggandeng beberapa *Non-Governmental Organizations* (NGO) seperti *Oxfam International*, *The World Development Movement*, *WWF*, dan *Third World Network*. Kemudian di dalam **pilar sosial** didukung oleh pencetusan *Millennium Development Goals* (MDGs) di tahun 2002 dan *World Summit* tahun 2002.¹⁰

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal

¹⁰ *Ibid.*

(Fauzi: 2004),¹¹ konsep keberlanjutan mengandung dua dimensi: **Pertama** adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. **Kedua** adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:¹²

1. *Pemerataan dan Keadilan (Equity and Justice)*. Pemerataan dan keadilan di sini menyangkut dimensi etika, yakni adanya kesenjangan antara negara atau daerah yang kaya dan miskin serta masa depan generasi mendatang yang tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan generasi masa kini. Karena itu aspek pemerataan dan keadilan ini harus dijawab baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi mendatang. Karena itu strategi dan perencanaan pembangunan harus dilandasi premis seperti: distribusi tenaga kesehatan, distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan peran dan kesempatan kaum wanita, kelompok marjinal, dan sebagainya.
2. *Pendekatan Integratif (Integrative Approach)*. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara-cara yang bermanfaat atau merusak. Keberlanjutan masa depan hanya dimungkinkan bila pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sosial dapat dipahami dan cara-cara yang *integrative* (terpadu) diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. *Perspektif Jangka Panjang (Long Term Perspective)*. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur pengenaan *discounting*. Perspektif jangka panjang merupakan visi dari pembangunan berkelanjutan sedangkan saat ini visi jangka pendek masih mendominasi dalam pengambilan keputusan.

¹¹ Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: Program S3 Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm. 5.

¹² Julissar An-N, "Pembangunan Berkelanjutan dan Elevansinya untuk Indonesia", *Jurnal Madani* Edisi II/Nopember 2005, hlm. 48.

4. *Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability)*. Keberlanjutan ekologis menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis integritas tatanan lingkungan harus dipelihara melalui upaya-upaya peningkatan daya dukung, daya asimilasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*).
5. *Keberlanjutan Ekonomi (Economic Sustainability)*. Menjamin kemajuan ekonomis secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi. Tiga unsur utama untuk mencapai keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemakmuran dan distribusi kemakmuran.
6. *Keberlanjutan Sosial Budaya (Social Cultural Sustainability)*. Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan segi sosial budaya mempunyai sasaran: stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memelihara keanekaragaman budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
7. *Keberlanjutan Politik (Political Sustainability)*. Keberlanjutan politik dicirikan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.
8. *Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan (Defense and Security Sustainability)*. Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan negara dan bangsa.

Implementasi dari kedelapan komponen di atas dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok analisis, yaitu analisis biaya ekonomi (*economic cost analysis*), analisis biaya lingkungan (*environmental cost analysis*), dan analisis biaya sosial (*social cost analysis*). Suatu perencanaan proyek-proyek pembangunan yang dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) harus dibuktikan dengan analisis, bahwa manfaat atau *benefit* lebih besar dari *cost* (*economic*

cost + environmental cost + sosial cost), atau bila sebaliknya, proyek-proyek pembangunan tersebut dikatakan tidak berkelanjutan.

Untuk mengetahui keberhasilan rencana pembangunan dan implementasinya perlu dilakukan evaluasi. Sesuai dengan teknik dan jenis perencanaannya, evaluasi dapat dilakukan dengan pendekatan mikro seperti evaluasi proyek (*project evaluation*), evaluasi sektoral (*sectoral evaluation*) atau dengan pendekatan makro seperti evaluasi komprehensif (*comprehensive evaluation*).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang (seperti Indonesia), menurut Todaro (1989) umumnya dengan mengemukakan beberapa indikator, yaitu:¹³

- 1. Pendapatan Nasional.** Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Product/GNP*) suatu negara adalah hasil dari aktivitas perekonomian secara keseluruhan dari negara tersebut. Pendapatan Nasional Bruto per Kapita sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Bagi negara-negara berkembang yang umumnya pendapatannya hanya berasal dari dalam negeri (*domestic*) GNP lebih dikenal dengan istilah *Gross Domestic Product (GDP)* atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Konsep pendapatan ini dapat diturunkan ke tingkat regional.
- 2. Pertumbuhan Ekonomi.** Tingkat Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan persentase peningkatan GNP atau GDP dari tahun ke tahun. Sering pula diukur dalam bentuk rata-rata per periode tertentu, misalnya per 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun sesuai dengan kebutuhan analisis. Sebagai contoh, menurut sistem klasifikasi PBB, negara-negara yang tergolong “paling tidak berkembang” (*underdeveloped*) hanya mempunyai rata-rata pertumbuhan GNP minus 0,3% per tahun antara tahun 1965 sampai 1985. Sedangkan pada negara-negara yang tergolong “berkembang” (*developing*) mempunyai rata-rata pertumbuhan GNP sebesar 3,7% per tahun pada periode yang sama.
- 3. Pendapatan per Kapita.** Pendapatan rata-rata per kapita diukur dari *GDP* pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama, biasanya dikalkulasi dalam Dolar Amerika

¹³ *Ibid*, hlm. 50-54.

Serikat (US\$). Ukuran ini baru menunjukkan potensi tingkat kesejahteraan ekonomi secara umum, belum bisa menunjukkan tingkat pemerataan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya. Dengan kata lain, pada suatu negara yang pendapatan rata-rata per kapita-nya tinggi mungkin saja sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.

4. **Distribusi Pendapatan Nasional.** Untuk lebih memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sering diukur dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (*quintiles* atau *deciles*) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Cara lain yang lazim digunakan untuk melihat distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan Kurva *Lorenz*. Semakin besar cekungan kurva semakin tinggi tingkat ketidakmerataan. Selanjutnya ukuran distribusi pendapatan dapat diukur dengan “rasio konsentrasi gini” (*gini concentration ratio*) atau lebih sederhana disebut dengan koefisien gini.¹⁴ Dalam praktiknya, koefisien gini pada negara-negara yang dikenal begitu tajam ketimpangan kesejahteraan di kalangan penduduknya berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal paling merata, Koefisien gini berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
5. **Kemiskinan.** Tingkat kemiskinan diukur dengan menentukan konsep “kemiskinan absolut” (*absolute poverty*) atau “garis kemiskinan” (*poverty line*), yaitu: “tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup”.

Angka Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) di atas akan berbeda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya, serta berubah dari waktu ke waktu. Pernah ditetapkan “Garis Kemiskinan Internasional” sebesar US\$125,-/orang/tahun (atas dasar harga konstan 1980). Itu

¹⁴ Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan/ketimpangan (pendapatan, kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

berarti seseorang yang konsumsinya kurang dari US\$125,- per tahun dapat digolongkan berada di bawah garis kemiskinan atau berada dalam kemiskinan absolut. Besar-kecilnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan/berada dalam kemiskinan absolut menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat dari suatu negara.

6. **Kesehatan Masyarakat.** Tingkat kesehatan masyarakat dapat terukur dari “Harapan Hidup Rata-rata” (*Life Expectancy Rate*) dan “Tingkat Kematian Bayi Rata-rata” (*Infant Mortality Rate*) yaitu jumlah bayi yang mati sebelum usia 1 tahun setiap 1.000 kelahiran. Harapan Hidup Rata-rata di negara-negara paling terbelakang di dunia pada tahun 1988 misalnya hanya mencapai 49 tahun, dibanding dengan 57 tahun di negara-negara dunia ketiga dan 73 tahun di negara-negara maju. Sedangkan Tingkat Kematian Bayi Rata-rata mencapai 124 di negara-negara yang terbelakang dibanding 96 di negara-negara berkembang dan 15 di negara-negara maju.
7. **Pendidikan Masyarakat.** Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat adalah “Tingkat Melek Huruf” (*Literacy*) atau sebaliknya “Tingkat Buta Huruf” (*Illiteracy*). Sebagai contoh, di antara negara-negara yang paling terbelakang Tingkat Melek Huruf Rata-rata hanya mencapai 34% dari jumlah penduduk dibanding dengan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang mencapai masing-masing 65% dan 99%.
8. **Produktivitas Masyarakat.** Konsep produktivitas masyarakat sangatlah kompleks. Pada dasarnya produktivitas masyarakat adalah kemampuan individu-individu dalam masyarakat tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal itu meliputi keterampilan, kemampuan manajerial, daya kreasi, serta emosi dan ambisi untuk hidup lebih sejahtera. Tingkat produktivitas tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang lebih rendah dibanding negara-negara maju. Produktivitas yang rendah tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kelesuan fisik dan ketidakmampuan fisik maupun mental untuk menahan tekanan pekerjaan sehari-hari.
9. **Pertumbuhan Penduduk.** Pertumbuhan Penduduk (*Population Growth*) dihitung dari “Tingkat Kelahiran” (*Birth Rate*) dikurangi “Tingkat Kematian” (*Mortality Rate*). Tingkat kelahiran di negara-

negara berkembang pada umumnya sangat tinggi yaitu berkisar antara 30–40 setiap 1.000 penduduk per tahun, sedangkan di negara-negara maju hanya kurang dari setengahnya. Sementara itu “Tingkat Kematian” (jumlah orang yang meninggal setiap 1.000 penduduk per tahun) di negara-negara berkembang juga relatif tinggi dibanding dengan negara-negara maju. Karena adanya usaha-usaha perbaikan kesehatan di negara-negara berkembang, tingkat kematian juga menjadi relatif rendah. Akibatnya “Rata-rata Pertumbuhan Penduduk” di negara-negara berkembang menjadi sekitar 2,1% dibandingkan dengan 0,6% di negara-negara maju.

10. Pengangguran dan Setengah Menganggur. Pengertian dari “setengah menganggur” (*underemployment*) adalah penduduk kota atau desa yang bekerja di bawah jam kerja normal (harian, mingguan, atau musiman), meliputi juga mereka yang berkerja secara normal dengan waktu penuh tapi produktivitasnya rendah. Sedangkan “pengangguran terbuka” (*unemployed*) adalah penduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di dunia ketiga saat ini kira-kira 10% hingga 15% dari angkatan kerja perkotaan. Angka dari mereka yang setengah menganggur di perkotaan maupun pedesaan diperkirakan jauh lebih besar. Untuk mengukur pembangunan manusia dan mutu kehidupan manusia, *United Nations Development Program* (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*). HDI mempunyai tiga komponen sebagai berikut:

- a. Panjang Usia yang diukur dari harapan hidup sejak lahir;
- b. Tingkat pengetahuan atau pendidikan yang diukur dari tingkat melek huruf dewasa serta lamanya bersekolah; dan
- c. Pendapatan yang diukur dari Produk Domestik Bruto.

Sebagai acuan perundingan pembangunan, ada 17 tujuan SDGs yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu:¹⁵

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

¹⁵ Rohim Miftahul, “Membandingkan MDGs dengan SDGs”, <http://citiscopes.org/story/2014/comparing-mdgs-and-sdgs>, diakses 24 Agustus 2015.

3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

III. Pembangunan Kesehatan dalam Pencapaian Target SDGs

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Kesehatan masyarakat merupakan salah

satu indikator dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*) dengan mempertimbangkan keseimbangan dari ketiga dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan kesehatan masyarakat sangat berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pembangunan di bidang kesehatan pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga merupakan modal penting bagi keberhasilan pembangunan bangsa.

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, di mana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat.¹⁶

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan

¹⁶ *Ibid.*

masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang, dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an.¹⁷

Selain itu, dari penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel,¹⁸ didapat bahwa peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja selama 200 tahun yang lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita seperti terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa perbaikan gizi memberikan kontribusi sebanyak 30% terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di Inggris. Bukti-bukti makro ekonomi juga didapat bahwa negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya. Pada negara-negara dengan tingkat angka kematian bayi yang rendah akan menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tertentu. Selain itu, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10% dari angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3–0.4% pertahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap. Dengan demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-negara maju yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara sedang berkembang dengan AHH rendah (49 tahun) adalah sekitar 1,6%, dan pengaruh ini akan terakumulasi terus-menerus.

Di Indonesia, pemerintah telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009

¹⁷ Admawikarta Arum, *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bappenas, 2009, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*

dan 2010–2014, serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. Bahkan dengan berlandaskan strategi *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus ditingkatkan setiap tahunnya. Kemitraan produktif dengan masyarakat madani dan sektor swasta juga berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Selama 10 tahun pelaksanaan pembangunan kesehatan masih dirasa kurang akselerasinya, kurang merata, dan pada umumnya kurang tinggi mutunya (RPJMN Tahun 2010–2014). Sedangkan secara spesifik masalah kesehatan yang dialami adalah: (1) Pemerataan, mutu, dan keterjangkauan upaya kesehatan masih belum optimal; (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih terbatas; (3) Pengelolaan, informasi dan hukum kesehatan masih kurang memadai; (4) Dukungan sumber daya kesehatan terbatas; (5) Lingkungan strategis masih kurang mendukung; (6) Rawan pangan dan rawan gizi masih ada; dan (7) Derajat kesehatan masyarakat umumnya masih rendah.¹⁹

Terkait pencapaian tujuan MDGs yang akan berakhir pada akhir tahun 2015, pencapaian target MDGs bidang kesehatan dianggap masih belum maksimal. Masih banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah,²⁰ khususnya terkait dengan pertama, menurunnya angka kematian ibu melahirkan. Pada tujuan MDGs adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan hingga 3/4-nya dari angka pada tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio tahun 1990 adalah sekitar 450, maka target MDGs sekitar 110 pada tahun 2015. Target tersebut tampaknya masih sulit dicapai. Karena Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut bisa jauh lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang lebih miskin dan terpencil. Berbagai potensi kematian bisa dicegah apabila para ibu memperoleh perawatan yang tepat sewaktu persalinan. Kenyataannya, sekitar 60% persalinan di Indonesia berlangsung di rumah. Dan jika sang ibu sampai di rumah sakit, belum tentu ia akan mendapatkan bantuan yang diperlukan karena banyak rumah sakit kabupaten kekurangan staf dan tidak

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰ Bappenas, *op. cit.*, hlm. 1–3.

memiliki layanan 24 jam. Karena itu, diperlukan upaya memperbaiki perawatan di pusat-pusat kesehatan. Pada tahun 2006 proporsi persalinan yang dibantu oleh tenaga persalinan terlatih, baik staf rumah sakit, pusat kesehatan atau bidan desa, baru mencapai 72,4%. Angka ini sangat bervariasi di seluruh Indonesia, mulai dari 39% di Gorontalo hingga 98% di Jakarta. Selain itu, data lain juga menunjukkan bahwa saat ini sekitar seperlima perempuan hamil kekurangan gizi dan separuhnya menderita anemia.

Kedua, menurunnya penyebaran virus HIV/AIDS. Tujuan keenam dalam MDGs adalah menangani berbagai penyakit menular paling berbahaya dan urutan teratasnya adalah HIV/AIDS. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 yang hidup dengan virus HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000 orang, sebagian besar adalah laki-laki (0,1% dari jumlah penduduk). Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 sampai Maret 2007, tercatat 8.988 kasus AIDS – 1.994 orang di antaranya telah meninggal. Target MDGs untuk HIV/AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, dua hal tersebut belum terlaksana karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Masalah utama kita saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV/AIDS serta terbatasnya layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan. Sedangkan kegiatan yang diarahkan pada pencegahan dan penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS relatif kabur dan tidak secara jelas dinyatakan, sehingga tidak ditemukan secara langsung kegiatan yang diarahkan untuk pencegahan dan penanganan IMS dan HIV/AIDS. Selain itu, kurangnya pengalaman untuk menanganinya dan anggapan bahwa ini hanyalah masalah kelompok risiko tinggi atau mereka yang sudah tertular.

Masalah yang ketiga adalah akses air bersih dan sanitasi dasar yang masih rendah. Dalam MDGs tujuan yang akan dicapai adalah menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015. Pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69,3%, meski banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.

Pembangunan kesehatan pasca-2015 menjadi tantangan tersendiri. Selain harus melanjutkan beberapa target MDGs karena diperkirakan tidak akan selesai pada akhir 2015 ke dalam agenda SDGs, di sisi lain Indonesia juga sedang menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yaitu: (1) mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; (2) meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang memadai; (3) meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan (4) mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat yaitu penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.²¹

Karakteristik tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia tersebut, menuntut penanganan multi-sektoral dan multi-level pemerintahan. Untuk itu upaya pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian target SDGs tidak dapat dilakukan oleh sektoral kesehatan saja. Kementerian Kesehatan dalam hal ini tidak lagi menjadi ujung tombak tunggal, karena sekitar 70% dari permasalahan kesehatan terkait erat dengan permasalahan non-kesehatan, seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kesejahteraan keluarga, tingkat pendidikan, dan kesetaraan gender. Selain itu, era desentralisasi telah mendorong sektor kesehatan untuk beradaptasi dengan pembagian dan terkadang tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembangunan kesehatan berkembang semakin kompleks, perubahan terjadi dengan cepat dan sering kurang menentu. Untuk itu pada pembangunan berkelanjutan 2030 diperlukan pemikiran dasar pembangunan kesehatan yang kuat. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan tersebut pada hakikatnya merupakan makna dari pelaksanaan paradigma sehat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) Tahun

²¹ *Ibid*, hlm. 118-119.

2005–2015.²² Selain itu, penyempurnaan pembangunan kesehatan dalam bentuk SDGs perlu dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Hal itu bertujuan agar agenda ambisius para pemimpin dunia dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup dalam program sebelumnya, yakni MDGs dapat berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan lebih menekankan pada penyelesaian masalah secara terintegrasi dan komprehensif. Jika dikaitkan dengan pembangunan kesehatan, sebagai contoh dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, dapat dikendalikan dengan dukungan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kemitraan pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor/lintas sektor. Oleh karena itu pengendaliannya tidak hanya dari sisi vektor, melainkan juga perlu mengintegrasikan dengan berbagai aspek, seperti sosial-budaya masyarakat, program dan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, serta lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Achmadi (2011), bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan penduduk, maka prinsip-prinsip kesehatan masyarakat harus dipegang teguh. Prinsip-prinsip itu adalah berbasis masyarakat, berorientasi kepada pencegahan, adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat, bersifat lintas sektoral dan lintas ilmu, dan terorganisasi dengan baik dalam arti kelembagaan yang efektif dan bertanggung jawab (akuntabilitas publik), sehingga keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dapat dicapai.²³

IV. Penutup

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk penyempurnaan dari pembangunan milenium yang dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan

²² Hapsara Habib Rachmat, *Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, hlm. 3.

²³ Panji W Dhewantara, "Atasi Masalah Kesehatan Sesuai Kerangka Pembangunan Berkelanjutan", *Buletin Inside*, Edisi 10 Vol. VI No.01/Juni 2011, Ciamis: Litbang P2B2, 2011, hlm. 49.

global yang lebih luas. Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup produktif dan bermartabat.

Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang saling berkaitan. Terciptanya masyarakat sehat adalah salah satu indikator dalam keberhasilan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target SDGs, dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan kesehatan yang kompleks. Untuk itu dalam upaya pemecahan masalah kesehatan perlu memerhatikan keterkaitan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pendekatan interdisiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Admawikarta, Arum, *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bappenas, 2009.
- An-N, Julissar, *Pembangunan Berkelanjutan Dan Elevansinya Untuk Indonesia*, Jakarta: Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005
- Ahmadi, UF, *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Baker, Susan, *Theoretical and Conceptual of Sustainable Developmen*, London: Routledge, 2006.
- Bappenas, Ringkasan Eksekutif. *Strategi Akselerasi Pencapaian Target Mdgs 2015*, Jakarta: Bappenas, 2014.
- Dhewantara, Panji, W, "Atasi Masalah Kesehatan Sesuai Kerangka Pembangunan Berkelanjutan", *Buletin Inside*, Edisi 10 Vol. VI No.01/Juni 2011, Ciamis: Litbang P2B2, 2011.
- Jaya, Askar, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: Program S3 Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Kurnia, Titin, Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Moeloek, Farid, Anfasa, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat", Makalah Disajikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Rachmat, Hapsara, Habib, *Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

United Nations Conference on Environment & Development (online) dalam <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>, diakses 10 Maret 2013.

Portal Pembangunan Berkelanjutan, http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Sustainable_development, diakses 9 Juni 2015.

Rohim Miftahul, *Membandingkan MDGs dengan SDGs*, <http://citiscope.org/story/2014/comparing-mdgs-and-sdgs>, diakses 24 Agustus 2015.

BAB III

PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Faridah Alawiyah

I. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (*World Commission Environmental an Development, 1987*).¹ Pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Namun, ruang lingkup pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi mencakup tiga lingkup kebijakan yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.³ Khusus dalam pembangunan sosial, pembangunan difokuskan untuk meningkatkan taraf hidup

¹ *United Nations (a), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, (online)*, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

² Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 1.

³ *United Nations (b), Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome, (online)*, <http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan sosial terdiri dari pembangunan manusia (*human development*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁴

Pembangunan manusia sendiri merupakan suatu pendekatan pembangunan baru yang dimulai pada akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Konsep ini merupakan komitmen dari lebih 189 pemimpin dunia dalam Sidang Umum PBB tentang Program Pembangunan Manusia Abad Milenium. Melalui pendekatan ini, negara-negara di dunia ditempatkan dalam urutan berdasarkan pencapaian indikator yang disebut *Human Development Indeks* (HDI) yang bertumpu pada ukuran panjangnya usia harapan hidup, rata-rata lamanya pendidikan dan kemampuan ekonomi penduduk sebagai usaha keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan kecerdasan anak bangsa.⁵ Modal manusia juga merupakan salah satu komponen sumber daya yang disyaratkan dalam membangun suatu bangsa, selain modal ekonomi (*economic capital*) dan modal sosial (*social capital*).⁶ Saat ini modal manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia telah tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Untuk itulah, pembangunan ke depan diharapkan pemerintah dapat memperkokoh modal manusia. Pendidikan diharapkan mampu mencetak manusia Indonesia sebagai modal membangun bangsa karena pendidikan senantiasa merupakan pintu gerbang kemajuan bangsa.

Pendidikan merupakan investasi nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan, setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan. Dengan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, maka akan dapat meningkatkan kemampuan diri dan selanjutnya dapat berperan aktif

⁴ James Midgley, *Social Development: Theory and Practice*, London: Sage Publication, 2014, hlm 250.

⁵ Haryono Suyono, *Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=85850>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

⁶ Teguh Wiyono, *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm, 6.

dalam kehidupan.⁷ Begitu pentingnya masalah pendidikan sehingga proses tersebut diselenggarakan di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Setiap orang tua harus terus berusaha agar anak-anaknya mempunyai kesempatan mengikuti proses pendidikan.⁸

Pendidikan juga merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hak ini sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi sebagai mana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab,

⁷ Mohammad Saroni (a), *Orang Miskin Harus Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2010, hlm. 195-196.

⁸ Mohammad Saroni (b), *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2013, hlm. 77-88.

berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal 13 menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan merealisasikan dengan pemenuhan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi gratis secara bertahap, mendorong pendidikan dasar, mengembangkan sistem sekolah yang aktif, sistem beasiswa yang memadai, kesejahteraan guru yang memadai, serta kebebasan memilih sekolah dan pendidikan agama.

Namun demikian, pada kenyataannya saat ini belum semua warga negara menikmati pendidikan sebagai hak dasar mereka. Sebagai contoh terdapat ribuan anak di Brebes, Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kesulitan ekonomi orang tuanya, bahkan 1.000 anak tercatat sebagai pekerja anak di berbagai sektor.⁹ Hal yang sama juga terjadi di Bojonegoro, di mana dalam tiga tahun terakhir tercatat sekitar 5.000 siswa SD, SLTP, dan SLTA yang tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi, dinikahkan pada usia dini, pengaruh lingkungan, dan ikut bekerja.¹⁰ Data yang dihimpun UNICEF menyebutkan terdapat 2,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah yang sebagian besar diakibatkan karena alasan finansial. Tercatat terdapat 7 persen anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan anak.¹¹ Banyak anak yang putus sekolah karena harus membantu perekonomian keluarga sehingga mereka tidak memperoleh hak pendidikan. Di lain pihak lebih banyak lagi penduduk yang harus hidup di bawah garis kemiskinan karena pendidikannya tidak memadai sehingga mereka gagal mengangkat harkat dan martabatnya.

⁹ Metronews, "Di Brebes, Ribuan Anak Masih Putus Sekolah", 5 Agustus 2015, (*online*), <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/08/05/418496/di-brebes-ribuan-anak-masih-putus-sekolah>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

¹⁰ Okezone, "5.000 Anak di Bojonegoro Putus Sekolah", 17 Juni 2015, (*online*), <http://news.okezone.com/read/2015/07/17/340/1182901/5-000-anak-di-bojonegoro-putus-sekolah>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

¹¹ Unicef, Indonesia: Laporan Tahunan 2012, (*online*), [http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_\(Ind\)_130731.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_(Ind)_130731.pdf), diakses tanggal 17 Juni 2015.

Saat ini kemiskinan masih merupakan momok bagi masyarakat Indonesia sehingga mereka tidak mampu memperoleh haknya dalam mendapatkan pendidikan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ayu Krisna Dewi, Anjuman Zukhri, dan I Ketut Dunia menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di kecamatan Gerokgak tahun 2012-2013 adalah alasan ekonomi keluarga.¹² Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Resi Anggun Sutiasnah yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah.¹³ Kondisi finansial orang tua siswa yang lemah ini menyebabkan siswa tidak mampu melanjutkan pendidikannya sehingga haknya mendapatkan pendidikan terabaikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan dasar di Indonesia juga masih jauh di bawah beberapa negara di kawasan ASEAN. APM tingkat pendidikan dasar di Indonesia menduduki ranking 85 dari 144 negara di dunia dengan nilai APM sebesar 92,0, jauh di bawah Singapura (1), Vietnam (29), Laos (56), Thailand (58), dan Malaysia (60). Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat pendidikan menengah di Indonesia juga masih jauh di bawah negara-negara lain, di mana Indonesia menempati ranking 92 dengan nilai APK sebesar 82,5. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura (16), Thailand (79), dan Filipina (89).¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih banyak terdapat masyarakat di Indonesia yang belum memiliki akses untuk memperoleh haknya mendapatkan pendidikan.

Sebenarnya pemerintah tidak menutup mata terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya keterbatasan

¹² Ni Ayu Krisna Dewi, Anjuman Zukhri, dan I Ketut Dunia, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012-2013, E-Journal Undiksha Vol.4 No.1 Tahun 2014, (*online*), <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/viewFile/1898/1650>, diakses tanggal 30 Juni 2015.

¹³ Resi Anggun Sutiasnah, Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah: Studi Madrasah Ibtidayah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Jom Fisip, Vol. 2 No. 1, Februari 2015.

¹⁴ *World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015*, (*online*), http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, diakses tanggal 30 Juni 2015.

akses masyarakat pada pendidikan. Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Program Wajib Belajar 9 Tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Program ini bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pemerintah telah mengeluarkan berbagai formulasi kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah juga telah menyiapkan program pendidikan menengah universal 12 tahun/rintisan wajib belajar 12 tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Sasaran dari program ini adalah pada tahun 2020 semua lulusan SMP/ sederajat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dengan tempat yang tersedia (dalam jarak terjangkau), waktu yang tersedia (bagi yang sudah bekerja), biaya yang terjangkau, kualitas pendidikan yang terjaga, terbuka bagi semua, dan adanya jaminan kepastian bagi yang berminat. Program pendidikan menengah universal 12 tahun/rintisan wajib belajar 12 tahun akan dimulai pada tahun 2016. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan luas kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi pemerintah, pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (a), Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun, disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 6 Maret 2012.

¹⁶ Antaranews, "Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016", 23 Juni 2015, <http://www.antaranews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia terlihat nyata juga pada era Presiden Jokowi. Pada akhir tahun 2014, Pemerintahan Presiden Jokowi telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program KIP ini merupakan salah satu bagian program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan kartu penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS memiliki tiga produk kartu yaitu Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ketiga kartu ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melalui pelaksanaan program tersebut, diperkenalkan penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu agar penyaluran program dapat lebih baik dan efisien. Khusus bagi pendidikan, KIP menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

II. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal November 2014. Program ini tercermin dari dibagikannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersamaan dengan peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tanggal 3 November 2014 ke sejumlah masyarakat. Program bantuan pendidikan melalui PIP ini ditandai dengan pemberian KIP kepada siswa/anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan ini baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan non-formal. Melalui KIP, anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu akan menerima dana tunai dari pemerintah secara reguler. Pada tahap awal program yakni bulan November–Desember 2014, KIP hanya diberikan kepada 161.840 anak siswa di sekolah/madrasah di

19 Kabupaten/Kota yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program BSM pada Tahun Ajaran 2013/2014. Selanjutnya pada tahun 2015 ini KIP akan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kriteria penerima PIP.¹⁷

PIP merupakan suatu program pengembangan dan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan program pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan akses pada pendidikan bagi warga negara. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara BSM dengan PIP, yakni *pertama*, BSM hanya menjangkau rakyat miskin, sementara PIP menjangkau rakyat miskin dan rentan miskin. *Kedua*, BSM hanya mencakup peserta didik yang sekarang di sekolah sementara PIP mencakup anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah, putus sekolah, dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. *Ketiga*, BSM hanya berlaku di sekolah formal/madrasah sementara PIP tidak hanya berlaku pada sekolah formal/madrasah tetapi berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan lembaga kursus (termasuk balai latihan kerja). *Keempat*, BSM tidak menghimbau anak yang tidak bersekolah untuk bersekolah sementara PIP menghimbau sekolah untuk menerima kembali anak yang tidak bersekolah.¹⁸

Pelaksanaan PIP ditujukan untuk meningkatkan akses bagi anak-anak berusia sekolah (6-21 tahun) guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan uaya berkelanjutan sosial melalui strategi peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan.¹⁹ Selain itu, PIP juga bertujuan untuk mencegah peserta didik dari putus

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (b), "Siapa saja sasaran penerima KIP", (*online*), <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/index.php>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (c), Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, disampaikan dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, 29-31 Maret 2015.

¹⁹ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op. cit*, hlm. 2-3.

sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi keluarganya. Program ini diharapkan juga dapat menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pada saat awal diluncurkan program ini, muncul beberapa kritik atas ketiadaan dasar hukum pelaksanaan PIP, mengingat nomenklatur PIP belum dikenal dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. PIP baru muncul dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2015 sehingga untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan anggaran dalam APBN Tahun 2015 digunakanlah nomenklatur program penyaluran dana BSM/PIP. Pada dasarnya landasan hukum dilaksanakannya program ini mengacu pada:²⁰

1. UUD 1945

Pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan salah satu dari tujuan bangsa ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat (2) disebutkan pula bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan pendidikan bagi warganya pun tidak main-main, mencapai 20 persen dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tercantum pada ayat (4).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendanaan bagi pendidikan juga dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d), Program Indonesia Pintar, Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja PIP Komisi X DPR RI tanggal 27 Mei 2015.

Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak antara lain untuk mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapat biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Untuk mendukung pelaksanaan PIP ini, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan. **Pertama**, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sehat Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan PIP yang bertujuan untuk membangun keluarga produktif. Adapun materi Instruksi Presiden tersebut meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran PIP;
2. Menyediakan KIP sejumlah penerima PIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK;
3. Membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima PIP;
5. Menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini lahir dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial. Adapun materi Peraturan Presiden tersebut meliputi:

1. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
2. Untuk menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial maka pendataan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non- Kementerian terkait. Dalam hal PIP maka pendataan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial tersebut Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial salah satunya Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar.
4. Pemerintah akan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Sebelum dilaksanakannya PIP pada tahun 2015 ini, Pemerintah juga telah melakukan beberapa program dalam rangka memberikan bantuan pendanaan bagi anak/siswa didik yang tidak mampu. **Pertama**, Program Beasiswa bagi Siswa Miskin diluncurkan pada tahun 2005-2011 yang diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Kriteria sasaran penerima dalam program ini adalah penerima beasiswa berdasarkan indeks kemiskinan. Lembaga yang menyalurkan bantuan adalah PT. Pos Indonesia. **Kedua**, Program Beasiswa untuk Siswa Miskin pada jenjang SD, Program Subsidi Siswa Miskin pada jenjang SMP, dan Program Bantuan Khusus Murid SMA dan SMK. Program ini dilaksanakan pada tahun 2012 dengan

sasaran penerima diprioritaskan berdasarkan surat keterangan miskin. Lembaga penyalur yang dipercaya adalah PT. Pos Indonesia. **Ketiga**, Program Bantuan Siswa Miskin yang dilaksanakan pada tahun 2013-2014. Sasaran penerima diprioritaskan untuk siswa dari keluarga penerima KPS dan korban bencana. Selain PT. Pos Indonesia, lembaga penyalur dana juga melalui Bank Pembangunan Daerah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

III. Tujuan, Kriteria Sasaran, dan Mekanisme Program Indonesia Pintar

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Berbagai program ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat memang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun upaya memutus rantai kemiskinan akan lebih strategis melalui jalur pendidikan.²¹ Sebagai salah satu program perlindungan sosial, PIP memiliki tujuan yang lebih spesifik, yakni:

1. Menjamin anak usia 6-21 tahun mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/madrasah/pesantren/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)/sanggar kegiatan belajar (SKB)/lembaga kursus dan pelatihan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, terdapat kriteria sasaran dari PIP, yaitu:

1. Siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/ Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS).

²¹ Udiutomo, P., Syafi'ie, M., & Puspitasari, D., *Bagai Pungbuk Merindukan Pendidikan Gratis*, Bogor: Dompot Dhuafa – Makmal Pendidikan, 2015, hlm. 119.

2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014.
3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non- KPS.
4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan.
5. Siswa/anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah.
6. Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam.
7. Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti:
 - a. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - b. SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis, Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Pelayaran/Kemaritiman.
8. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Pelaksanaan PIP pada tahun 2015 tidak lagi melibatkan PT. Pos Indonesiasebagai lembaga penyalur dana, melainkan hanya melibatkan Bank BRI untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMK serta Bank BNI untuk jenjang pendidikan SMA. Kedua lembaga penyalur tersebut akan menyediakan layanan *Tabunganku*, di mana layanan tersebut memiliki fasilitas setoran awal nol rupiah, saldo minimum nol rupiah, biaya administrasi bulanan nol rupiah, biaya transfer ke rekening penerima nol rupiah, dan bunga nol persen. Adapun dasar penetapan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga penyalur dana PIP adalah Perjanjian Kerja sama No. PDM-FUN/099-LG/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Perjanjian Kerja sama PT. BNI (Persero) Tbk sebagai Lembaga Penyalur Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas Tahun 2015²², Perjanjian Kerja Sama

²² PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Penyaluran Dana Bantua Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (PIP), disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Program Indonesia Pintar Komisi X DPR RI, tanggal 15 Juni 2015.

PT. BRI (Persero) Tbk dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar No.674/C2/KU/2015 & B.350-DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 3 Juni 2015, Perjanjian Kerja sama PT. BRI (Persero) Tbk dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama No. 1185/C3/KU/2015 & B.351-DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 3 Juni 2015, dan Perjanjian Kerja Sama PT. BRI (Persero) Tbk dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan No.2412/D3.5/KU/2015 & B.352-DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 3 Juni 2015.²³

Mekanisme penggunaan KIP untuk mendapatkan bantuan pendidikan pada tahun 2015 bagi siswa/peserta didik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedikit berbeda dengan mekanisme penggunaan KIP bagi siswa/peserta didik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Adapun mekanisme penggunaan KIP adalah sebagai berikut:²⁴

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pertama, siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke sekolah tempat siswa tersebut terdaftar. **Kedua**, sekolah akan mencatat data siswa tersebut dengan benar sesuai format, merekapitulasi data semua siswa pemilik KIP dan mengirimkan rekapitulasi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kankemenag Kabupaten/Kota. **Ketiga**, setelah data diterima Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan semua hasil rekapitulasi sekolah di Kabupaten/Kota tersebut ke Kemendikbud dengan menembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. **Keempat**, Kemendikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan siswa penerima manfaat KIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan daftar penerima manfaat KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk. **Kelima**, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat KIP ke sekolah serta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan. **Keenam**, sekolah memberitahukan ke siswa/orang

²³ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jawaban Pokok-Pokok Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Program Indonesia Pintar (PIP) Dengan Bank BRI, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Program Indonesia Pintar Komisi X DPR RI, tanggal 15 Juni 2015.

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (e), "Tanya Jawab Mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP)", (*online*), <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/faq.php>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

tua waktu pengambilan dana bantuan. **Ketujuh**, siswa/orang tua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

2. Kementerian Agama

Pertama, siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke madrasah tempat siswa tersebut terdaftar. **Kedua**, untuk Madrasah Swasta, Kepala Madrasah mencatat dan merekapitulasi siswa yang memiliki KIP dan siswa dari keluarga penerima KPS/KKS berdasarkan format untuk kemudian merekapitulasi nama siswa tersebut sebagai penerima manfaat KIP. **Ketiga**, Kepala Madrasah Swasta membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima manfaat KIP, berita acara SK serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima manfaat KIP dan mengirim seluruh salinan format ke Kantor Kementerian Agama/Kankemenag Kabupaten/Kota. Untuk Madrasah Negeri yang memiliki DIPA/anggaran sendiri, rekapitulasi siswa penerima manfaat KIP dikirimkan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. **Keempat**, Kankemenag Kabupaten/Kota merekapitulasi usulan siswa calon penerima manfaat program dan menetapkan seluruh penerima manfaat yang memiliki KIP serta anak/siswa dari keluarga KPS/KKS yang belum menerima KIP. **Kelima**, menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima manfaat KIP serta Rekapitulasi Siswa dan kemudian mengirimkan seluruh salinan ke Kantor Wilayah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi. **Keenam**, Kanwil Kementerian Agama Provinsi merekapitulasi siswa penerima manfaat dari Kankemenag Kabupaten/Kota dan menetapkan seluruh penerima BSM yang memiliki KIP serta anak/siswa dari keluarga KPS/KKS sebagai penerima manfaat KIP. **Ketujuh**, Kanwil Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan rekapitulasi siswa penerima manfaat program kemudian mengirimkan salinan SK ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke madrasah untuk diinformasikan kepada siswa penerima manfaat program melalui KIP. **Kedelapan**, madrasah memberitahukan ke siswa/orang tua waktu pengambilan dana bantuan. **Kesembilan**, siswa/orang tua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan PIP pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk bekerja sama

dan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pelaksanaan PIP. Selain itu pemangku kepentingan, sekolah/lembaga pendidikan, dan lembaga penyalur juga memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam pelaksanaan PIP. Ada pun peran dan fungsi pihak-pihak yang terkait dengan PIP adalah sebagai berikut:²⁵

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan untuk menetapkan juknis; melakukan sosialisasi dan koordinasi; melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data; menetapkan SK penerima; menetapkan lembaga penyalur; menginformasikan SK penerima, melayani pengaduan; dan melakukan pemantauan dan pelaporan.

2. Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan provinsi memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan program; melakukan koordinasi dan sinkronisasi program; mendorong anak usia sekolah 6-21 tahun agar bersekolah; dan melakukan pemantauan.

3. Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pemerintahan Kabupaten/Kota berperan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi program; menyampaikan/mengetahui calon penerima program; menyampaikan usulan dari sekolah/lembaga pendidikan; melakukan pemantauan; dan melayani pengaduan.

4. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan memiliki peran untuk mengusulkan peserta didik calon penerima BSM/PIP; menyebarluaskan informasi; memantau proses pelaksanaan BSM/PIP.

5. Sekolah/Lembaga Pendidikan

Sekolah/lembaga pendidikan berperan untuk melakukan seleksi dan mengusulkan siswa/peserta didik melalui Dapodik; menyampaikan informasi pencairan kepada siswa/peserta didik; membuat surat keterangan untuk pengambilan dana; melakukan pemantauan dan pengarahan program; menerima pendaftaran anak

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d), *Op.cit.*

usia sekolah yang tidak bersekolah; dan memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pencairan kolektif.

6. Lembaga Penyalur

Lembaga penyalur memiliki peran untuk menyampaikan informasi pencairan kepada siswa/peserta didik melalui dinas atau sekolah; meyalurkan dana manfaat; melakukan pelaporan penyaluran; bertanggung jawab terhadap penyaluran; dan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota.

IV. Implementasi PIP dan Permasalahannya

Pada tahap awal pelaksanaan PIP di bulan November – Desember 2014, pendistribusian KIP diberikan kepada 161.840 siswa di sekolah/madrasah di 19 Kabupaten/Kota yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat Program BSM Tahun Ajaran 2013/2014.²⁶ Selanjutnya pada tahun 2015, penyaluran program ini dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap I dilaksanakan pada bulan April 2015, tahap II dilaksanakan bulan Juni 2015, dan tahap III dilaksanakan jika kuota tahap I dan tahap II tidak terpenuhi. Khusus bagi anak/siswa yang terdampak korban bencana penyaluran tidak dilakukan melalui pentahapan. Berikut tabel rencana tahap penyaluran BSM/PIP tahun 2015.

Tabel 1. Rencana Tahap Penyaluran BSM/PIP Tahun 2015

TAHAP	LANGKAH DAN SUMBER DATA	JUMLAH SASARAN
Tahap I (April 2015)	Penerima BSM tahun 2014 dari KPS (hasil integrasi dengan BDT)	6.293.825
	Siswa dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum menerima BSM tahun 2014 dan sudah <i>entry</i> (<i>update data</i>) ke Dapodik	3.744.418
Tahap II (Juni 2015)	Siswa peserta PKH non-KPS	2.500.000
	Siswa dari panti sosial, siswa yatim dan/atau piatu	250.000
	Anak usia sekolah (6-21 tahun per 2015) tidak bersekolah yang diharapkan bersekolah	3.600.000

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (e), *Op.Cit.*

Tahap III (jika kuota Tahap I dan Tahap II tidak terpenuhi)	Siswa miskin usulan sekolah	1.432.027
Non Tahap	Siswa korban bencana	100.000
JUMLAH		17.920.270

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

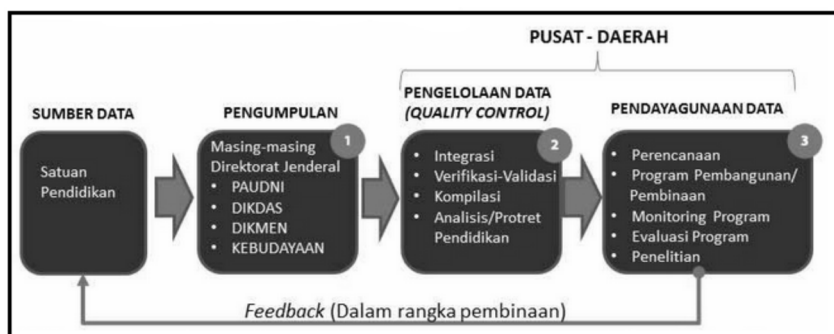
Jumlah manfaat yang disalurkan PIP melalui KIP masih sama seperti jumlah manfaat pada Program BSM, dengan besaran dana akan bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menerima dana sebesar Rp450.000, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima dana sebesar Rp750.000, dan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima dana sebesar Rp1.000.000.²⁷ Pada tahun 2015 ini diproyeksikan jumlah penerima PIP sebesar 20.371.843 anak dengan rincian 17.920.270 anak calon penerima PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2.451.573 anak calon penerima PIP dari Kementerian Agama.²⁸

Selanjutnya, data penerima sasaran ditentukan berdasarkan Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan (Dapodik) yang merupakan suatu sistem pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi, untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu.²⁹ Dapodik merupakan konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat terpadu sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Mekanisme alur data dan pengelolaan data dalam Dapodik tergambar dalam Gambar 1.

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d), *Op. cit.*

²⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (c), *Op. Cit.*

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (f), "Dapodik", (*online*), <http://dapodik.data.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 2 Agustus 2015.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Gambar 1. Alur Data dan Informasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dapodik disusun sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sahih sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk menjaga kualitas data, maka disusunlah tiga tahapan alur data dan informasi yang dikelola oleh unit yang berbeda, tahapan pengumpulan, pengelolaan (*Quality Control*), dan pendayagunaan.

Dalam alur data dan informasi, data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP). Semua data harus berangkat dari data individual lembaga (satuan pendidikan), individual pendidik dan tenaga kependidikan, dan individual peserta didik. Selanjutnya data digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan dan pembangunan.

Sebagai program pengembangan dan penyempurnaan yang baru dilaksanakan di tahun ini, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PIP. Hal tersebut diungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan adanya beberapa kendala, antara lain persoalan data, mekanisme dan koordinasi, serta sinkronisasi data.³⁰ Persoalan verifikasi data penerima KIP terhambat pada sulitnya sosialisasi PIP kepada masyarakat luas sehingga belum sepenuhnya tersosialisasi. Kondisi topografi Indonesia yang banyak memiliki wilayah yang sulit dijangkau yang mengakibatkan masih banyaknya wilayah yang menyulitkan sosialisasi PIP. Selain

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (g), Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI, disampaikan pada rapat kerja antara Menteri Keuangan dengan Komisi X DPR RI tanggal 10 Juni 2015.

itu, pemasukan data ke dalam data Dapodik juga masih mengalami kendala terutama untuk pendataan sasaran PIP anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Di samping itu, kartu berbasis keluarga yang terdiri dari KKS, KIS, dan KIP perlu adanya sinkronisasi data antara kementerian terkait bukan hanya Kemendikbud, dan dikarenakan belum ada satu sistem utuh sehingga ini pun menjadi penghambat tersebarnya KIP.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil beberapa langkah sebagai berikut:³¹

1. Memperbanyak saluran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, serta rapat koordinasi dengan pihak terkait.
2. Menyediakan aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar yang terintegrasi dengan Dapodik sehingga memudahkan pengisian di tingkat satuan pendidikan.
3. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, serta pemerintahan daerah.
4. Memberikan instruksi agar pada semua rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian dengan pemerintahan daerah akan diisi dengan pemberian informasi tentang pembagian tugas antara Kementerian dan pemerintah daerah.
5. Mempercepat pemuktahiran data sasaran untuk pemesanan pencetakan dan pengiriman kartu (KKS, KIS, dan KIP).

Selain permasalahan teknis tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dan dicarikan solusi untuk perbaikan program ini, antara lain *pertama*, selain ditujukan untuk pendidikan formal, juga menysasar pendidikan nonformal. Hal ini akan menimbulkan permasalahan mengingat pendidikan nonformal banyak yang belum terakreditasi atau belum terdaftar. Selain itu, lokasi belajar pendidikan nonformal tersebut terkadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, sasaran yang belum jelas dan tidak berdokumen seperti keberadaan anak terlantar, secara prinsip eksistensi mereka nyata namun secara administratif keberadaan anak terlantar tidak secara

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (g), *Ibid*.

jelas diketahui. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan PIP bagi anak terlantar, mengingat sulitnya mendeteksi keberadaan mereka, padahal ini juga menjadi kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan.

Ketiga, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan sulit dijangkau menjadi kendala dalam penyaluran dana bagi masyarakat di daerah terpencil. Dua lembaga penyalur yang ditunjuk, yakni Bank BRI dan BNI belum tentu tersedia di kecamatan-kecamatan pelosok dan terpencil, pemerintah tentunya harus dapat memastikan penyaluran dana tersebut sampai pada semua anak usia sekolah yang berhak mendapatkan bantuan.

Keempat, dipilihnya dua bank penyalur yakni Bank BRI dan BNI juga menjadi kendala tersendiri mengingat masih banyak dari masyarakat di Indonesia yang belum memahami dan menggunakan jasa bank. Masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke formal institusi keuangan, khususnya perbankan hanya mencapai 49 persen dari populasi.³² Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2011 bahkan menyatakan bahwa hanya 20 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank. Hal senada juga disampaikan oleh Bank Indonesia dalam survei Neraca Keuangan Rumah Tangga di tahun 2011 menyebutkan bahwa hanya 48 persen rumah tangga yang memiliki rekening di bank.³³ Berdasarkan data tersebut, lebih dari setengah penduduk di Indonesia yang belum memahami dan menggunakan jasa perbankan, sementara industri perbankan merupakan industri yang *rigid* dan kompleks dalam aturan tata kelola perusahaan. Dengan demikian dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat yang akan mencairkan dananya.

Kelima, dan yang terpenting adalah peningkatan akses pendidikan melalui PIP harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Negara telah berupaya untuk memberikan

³² Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic Growth and Accelerating Poverty Reduction*, Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2012, hlm. 3.

³³ Bank Indonesia, *Financial Inclusion Development Policy in Indonesia*, (online), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_216688.pdf, diakses tanggal 2 Agustus 2015.

yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar agar warga negara dipastikan memperoleh pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Akan tetapi, hal tersebut juga perlu didukung juga dengan pendidikan bermutu yang disediakan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal yang diusung dalam PIP ini. Yang dikhawatirkan tujuan awal program ini adalah agar semua anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang merata akan tetapi satuan pendidikannya sendiri tidak siap sehingga justru menjadikan kualitas pendidikan menjadi buruk. Kualitas pendidikan suatu negara juga menjadi kunci keberhasilan negara tersebut dalam melaksanakan pembangunan. Manfaat pendidikan selain bernilai intrinsik juga bernilai ekstrinsik.³⁴ Keuntungan dapat dirasakan tidak hanya untuk individu yang bersangkutan (*individual benefits*) melainkan juga untuk masyarakatnya (*sosial benefits*). Realitas di lapangan masalah kuantitas dan kualitas satuan pendidikan saat ini merupakan hal yang sangat dilematis. Sebagai contoh, idealnya suatu sekolah SD memiliki enam orang guru kelas, dua guru bidang studi, satu kepala sekolah, dan satu pesuruh.³⁵ Namun kenyataannya, di banyak pedesaan di Indonesia jumlah guru SD hanya sekitar 3-4 orang, bahkan ada satu guru untuk satu sekolah merangkap juga sebagai pesuruh. Namun di lain pihak, di daerah perkotaan dengan sarana dan prasarana yang baik, terjadi penumpukan guru. Guru SD di perkotaan bisa mencapai 11-14 orang guru dan kepala sekolah.³⁶ Dengan demikian pemerataan guru antara di pedesaan dan di perkotaan masih terdapat kesenjangan yang sangat besar sehingga berpengaruh pada kesenjangan kualitas pendidikan antara di pedesaan dengan di perkotaan.

Hal lain yang penting dalam menunjang kualitas pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung pendidikan. Salah satu fasilitas pendukung pendidikan adalah ketersediaan bangunan sekolah. Namun pada kenyataannya, masih banyak kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan rawan ambruk sehingga mengancam keselamatan siswa didik. Salah satu

³⁴ Suhardan, Dadang, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 16.

³⁵ Dharmaningtyas, "Guru Kontrak Memboroskan Anggaran", *Kompas*, 22 Agustus 2002.

³⁶ Chan, S.M. & Sam, T.T., *Op. Cit*, hlm. 57-58.

contoh adalah ambruknya sekolah SMP Negeri 1 Sampang pada bulan November 2014 lalu yang menyebabkan 17 orang mengalami luka-luka.³⁷ Tahun 2013 lalu, data Kementerian dan Kebudayaan menyebutkan bahwa masih terdapat 5.325 ruang kelas yang rusak berat.³⁸

Untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan suatu kebijakan yang luar biasa dalam bentuk reformasi pendidikan. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mereformasi kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu:³⁹

1. Komitmen Politik

Pendidikan hendaknya jangan hanya dijadikan sebagai komoditas orasi politik, tetapi merupakan suatu komitmen dan prioritas yang harus dilaksanakan. Pendidikan yang bermutu memerlukan dana memadai dan pengelolaan yang terbuka. Dengan demikian semua unsur yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan bermutu perlu diperhatikan, antara lain mutu guru, tersedianya alat bantu, buku-buku yang mudah didapat, dan bangunan pendidikan yang memadai.

2. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, birokrasi pendidikan di Indonesia termasuk yang terbesar di mana 1,8 juta pegawai birokrasi menangani 2,7 juta tenaga pendidikan. Birokrasi yang demikian besar tentu dipertanyakan profesionalisme sekaligus efisiensinya.

3. Pemetaan Pendidikan

Keadaan mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia sangat beragam. Hal ini tercermin dari pelaksanaan ujian nasional dalam beberapa tahun ini. Namun demikian, fungsi ujian nasional tidak memberikan gambaran apa-apa mengenai peta permasalahan pendidikan nasional. Ujian nasional lebih memfokuskan pada

³⁷ Antaranews, "Dua Gedung Sekolah di Sampang Ambruk", 29 November 2014, (*online*), <http://www.antaranews.com/berita/466869/dua-gedung-sekolah-di-sampang-ambruk>, diakses tanggal 2 Agustus 2015.

³⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (h), "Target 2014, Seluruh Ruang Kelas Berat Direhabilitasi", 31 Desember 2013, (*online*), <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/1981>, diakses tanggal 2 Agustus 2015.

³⁹ Teguh Wiyono, *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 107.

angka-angka kelulusan yang nota bene masih rendah di mana manfaatnya bukan untuk peserta didik. Ujian nasional seharusnya berfungsi sebagai pemetaan keadaan pendidikan secara nasional dan berdasarkan peta tersebut dirumuskanlah kebijakan-kebijakan yang lebih tepat untuk memecahkan masalah bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

4. Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan

Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling membutuhkan atau interaktif. Pendidikan adalah proses pemanusiaan yang terjadi dalam hubungan antara manusia. Dalam hubungan antar-manusia itulah terjadinya suatu budaya. Namun kondisi saat ini pendidikan telah memberikan prioritas kepada pengembangan akal dan mengabaikan nilai-nilai luhur yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Intelektualisme telah mengalahkan pendidikan budi pekerti yang tidak mendapat tempat di dalam kurikulum, pendidikan agama telah berubah menjadi pengajaran agama yang dapat diujikan. Untuk itulah diperlukan membangun kembali hubungan integratif antara pendidikan dan kebudayaan sehingga menjadikan proses pendidikan sebagai proses pembudayaan.

V. Penutup

Pendidikan merupakan salah satu modal dalam membangun suatu bangsa selain modal ekonomi dan modal sosial. Selain itu, pendidikan juga merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam rangka untuk melaksanakan kewajibannya, pemerintahan baru telah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan di mana di dalamnya terdapat Program Indonesia Pintar.

Program ini adalah suatu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditujukan salah satunya untuk meningkatkan akses bagi anak-anak berusia sekolah (6-21 tahun) guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah.

Pada tahap awal pelaksanaan PIP di bulan November-Desember 2014, KIP diberikan kepada 161 ribu siswa yang selanjutnya secara bertahap dengan target penyaluran hingga kepada 17.920 ribu anak calon penerima PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2.451 ribu anak calon penerima PIP dari Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan PIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa kendala seperti masalah pada verifikasi data sasaran calon penerima, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah belum maksimal, dan sinkronisasi data antara Kementerian/Lembaga terkait yang belum optimal dalam program KKS, KIS, dan KIP. Namun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya agar program ini dapat berhasil dengan baik, seperti memperbanyak saluran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, menyediakan aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar yang terintegrasi dengan Dapodik, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, serta pemerintahan daerah.

Meski program ini mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, namun terdapat beberapa hal yang perlu tetap mendapat perhatian sebagai upaya untuk perbaikan program ini ke depan antara lain: perhatian terhadap pendidikan nonformal, sasaran anak yang secara kehadiran nyata namun secara administratif sulit dicari agar tetap mendapat perhatian juga. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan sulit dijangkau sementara lembaga penyalur belum tentu tersedia di seluruh daerah-daerah, khususnya daerah terpencil. Permasalahan lain adalah lebih dari 50 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor perbankan, sementara lembaga penyalur hanya Bank BRI dan BNI akan menimbulkan kesulitan tersendiri di lapangan. Selain itu, upaya pemerataan akses pendidikan juga perlu memerhatikan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, penyiapan guru, sarana, dan prasarana serta upaya lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan harus terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews, "Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016", 23 Juni 2015, <http://www.antaranews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016>, diakses tanggal 30 Juli 2015.
- Antaranews, "Dua Gedung Sekolah di Samping Ambruk", 29 November 2014, (*online*), <http://www.antaranews.com/berita/466869/dua-gedung-sekolah-di-samping-ambruk>, diakses tanggal 2 Agustus 2015.
- Bank Indonesia, *Financial Inclusion Development Policy in Indonesia*, (*online*), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_216688.pdf, diakses tanggal 2 Agustus 2015.
- Chan, S.M. & Sam, T.T., Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dharmaningtyas, "Guru Kontrak Memboroskan Anggaran", Kompas, 22 Agustus 2002.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sehat Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (a), Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun, disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 6 Maret 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (b), "Siapa saja sasaran penerima KIP", (*online*), <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/index.php>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (c), Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, disampaikan dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, 29-31 Maret 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d), Program Indonesia Pintar, Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja PIP Komisi X DPR RI tanggal 27 Mei 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (e), "Tanya Jawab Mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP)", (*online*), <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/faq.php>, diakses tanggal 30 Juli 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (f), "Dapodik", (*online*), <http://Dapodik.data.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 2 Agustus 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (g), Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI, disampaikan pada rapat kerja antara Menteri Keuangan dengan Komisi X DPR RI tanggal 10 Juni 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (h), "Target 2014, Seluruh Ruang Kelas Berat Direhabilitasi", 31 Desember 2013, (*online*), <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/1981>, diakses tanggal 2 Agustus 2015.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Metronews, "Di Brebes, Ribuan Anak Masih Putus Sekolah", 5 Agustus 2015, (*online*), <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/08/05/418496/di-brebes-ribuan-anak-masih-putus-sekolah>, diakses tanggal 30 Juli 2015.
- Midgley, J., *Social Development: Theory and Practice*, London: Sage Publication, 2014.
- Mohammad Saroni (a), *Orang Miskin Harus Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2010.

- Mohammad Saroni (b), Pendidikan Untuk Orang Miskin, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2013.
- Okezone, "5.000 Anak di Bojonegoro Putus Sekolah", 17 Juni 2015, (*online*), <http://news.okezone.com/read/2015/07/17/340/1182901/5-000-anak-di-bojonegoro-putus-sekolah>, diakses tanggal 30 Juli 2015.
- Ni Ayu Krisna Dewi, Anjuman Zukhri, dan I Ketut Dunia, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012-2013, E-Journal Undiksha Vol.4 No.1 Tahun 2014, (*online*), <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/viewFile/1898/1650>, diakses tanggal 30 Juni 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (PIP), disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Program Indonesia Pintar Komisi X DPR RI, tanggal 15 Juni 2015.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jawaban Pokok-Pokok Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Program Indonesia Pintar (PIP) Dengan Bank BRI, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Program Indonesia Pintar Komisi X DPR RI, tanggal 15 Juni 2015.
- Resi Anggun Sutiasnah, Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah: Studi Madrasah Ibtidayah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Jom Fisip, Vol. 2 No. 1, Februari 2015.

- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic Growth and Accelerating Poverty Reduction*, Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2012.
- Suhardan, Dadang, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suyono, H., *Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya*, (*online*), <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=85850>, diakses tanggal 29 Juli 2015.
- Teguh Wiyono, *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Udiutomo, P., Syafi'ie, M., & Puspitasari, D., *Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis*, Bogor: Dompot Dhuafa – Makmal Pendidikan, 2015.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- United Nations (a), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, (*online*), <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, diakses tanggal 29 Juli 2015.
- United Nations (b), Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome*, (*online*), <http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf>, diakses tanggal 29 Juli 2015.
- Unicef, Indonesia: *Laporan Tahunan 2012*, (*online*), [http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_\(Ind\)_130731.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_(Ind)_130731.pdf), diakses tanggal 17 Juni 2015.
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015*, (*online*), http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, diakses tanggal 30 Juni 2015.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dinar Wahyuni

I. Pendahuluan

Munculnya gagasan pembangunan berkelanjutan bermula ketika sistem perekonomian global mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Ancaman kehancuran ekosistem diperparah dengan perubahan iklim global akibat aktivitas industri yang terus berlangsung. Sistem perekonomian tidak dapat berhenti, namun dapat berganti arah sehingga keberlanjutan lingkungan masih terjaga untuk generasi yang akan datang. Dalam kondisi demikian, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji.

Dalam perkembangannya, peta jalan menuju pembangunan berkelanjutan mulai menunjukkan hasil. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang berlangsung di Rio de Janeiro tahun 1992 telah menghasilkan lima dokumen yang terdiri dari dua kesepakatan internasional, yakni dua pernyataan tentang prinsip dan sebuah agenda langkah utama tentang pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.¹ Wujud dokumen tersebut adalah Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan dengan 27 asas serta Agenda 21 tentang cara mengupayakan pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup menjelang abad 21.

Seruan untuk menginternalisasi lingkungan ke dalam pembangunan terus dilakukan dalam berbagai pertemuan

¹ Surna Tjahja Djajadiningrat dan Sutanto Hardjolukito, *Demi Bumi, Demi Kita, Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013, hlm. 34.

internasional bertema lingkungan. KTT Milenium pada bulan September 2000 misalnya, menghasilkan kesepakatan MDGs dengan delapan *goals*, di mana *goal* ke-7 terkait isu lingkungan hidup. Kemudian KTT MDGs di New York tahun 2010 mencetuskan pemikiran konsep *New Development Agenda Post-2015* untuk pertama kalinya. Selanjutnya KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 (Rio+20) juga menghasilkan dokumen “*The Future We Want*” yang mencantumkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan agenda pembangunan pasca-2015 sebagai agenda sidang. Salah satu isu penting yang dibahas adalah pemberantasan kemiskinan sebagai tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini dan syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan.² Karena itu, Rio+20 menegaskan kembali komitmen untuk membebaskan manusia dari kemiskinan sebagai hal yang mendesak.

Bagi Indonesia, dokumen hasil KTT+20 menjadi rujukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu agenda RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa melalui peletakan dasar dimulainya desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar-wilayah terutama kawasan Indonesia timur, dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi isu global yang mendesak untuk ditangani. Meski angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan, namun kesenjangan antar-penduduk semakin lebar. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diupayakan walau hasilnya tidak selalu menggembirakan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa selama ini program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih sebatas pemberian bantuan sosial, misalnya penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (*raskin*). *Raskin* merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Tujuan dari *raskin* untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok

² Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal>, diakses 4 September 2015.

dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.³ Program bantuan sosial yang lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang digulirkan tahun 2005. Efektivitas pelaksanaan BLT berdasarkan berbagai pemantauan mencapai hampir 55 persen. Namun program ini terbukti belum mampu menekan angka kemiskinan pada saat itu. Data BPS menunjukkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan sebesar 3,95 juta orang sepanjang tahun 2005 sampai 2006.⁴ Dalam jangka panjang, bantuan yang bersifat *charity* akan menimbulkan ketergantungan sehingga ketika program bantuan sosial telah selesai, tidak ada keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya perubahan secara menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan muncul sebagai solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh tentang upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah menuju pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dipilih dalam implementasi pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk menggerakkan bangsa ke arah kemajuan secara lebih berkelanjutan.

II. Memaknai Konsep Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai definisi yang sangat beragam. Secara umum kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan; kedua, sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai;

³ Raskin, Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/>, diakses 25 Agustus 2015.

⁴ Program BLT Tak Menekan Angka Kemiskinan, http://www.indosiar.com/fokus/program-blt-tak-menekan-angka-kemiskinan_69766.html, diakses 25 Agustus 2015.

ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi; keempat, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.⁵

Berdasarkan beberapa tinjauan tentang konsep kemiskinan, kemiskinan dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum untuk dapat bertahan hidup seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, di mana pendapatan individu berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.⁶ Berbeda dengan dua konsep sebelumnya, kemiskinan struktural lebih terkait dengan faktor-faktor ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik.⁷ Kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Sementara kemiskinan kultural lebih pada sikap dan perilaku individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak kreatif yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Selain empat dimensi tersebut, kajian Bank Dunia pada tahun 2007 membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia menampilkan sisi lain dari fenomena kemiskinan yaitu kemiskinan rentan.⁸

Menyadari kompleksitas persoalan kemiskinan, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memerhatikan berbagai dimensi kemiskinan. Bagong Suyanto membagi kebijakan pengentasan

⁵ Chambers dalam Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2013, hlm. 2.

⁶ Oos M. Nawas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 84.

⁷ Moch. Nurhasim, et al., *Model Kebijakan yang Memihak Kelompok/Orang Miskin Berbasis Good Governance*, Jakarta: LIPI Press, 2014, hlm. 19.

⁸ *Ibid.*

kemiskinanmenjaditigakelompok,yakni:kelompokfilantropis,reformis, dan revolusioner. Kelompok filantropis tidak memandang kemiskinan dari struktur dan kelembagaan dalam masyarakat. Menurut kelompok ini untuk meningkatkan keadaan masyarakat miskin dilakukan melalui upaya kemanusiaan secara langsung tanpa mengubah lembaga dan struktur yang ada. Sedangkan kelompok reformis memandang bahwa kesalahan berfungsinya sistem kemasyarakatan yang menjadi penyebab sosial genetis dari kemalangan ekonomi, keterbelakangan sosial, dan kultur rakyat. Karena itu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin cukup dengan memperbaiki sistem sosial yang ada. Lain halnya dengan kelompok revolusioner yang berpandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sistem sosial dan kelembagaan yang ada. Dengan pandangan itu, kelompok ini mencoba mengembangkan suatu program transportasi atas sistem sosial dan basis ekonominya ke atas.⁹

III. Kemiskinan dan Pendidikan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum membahas tentang kaitan antara pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan, terlebih dahulu akan didefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Dalam pengertian tersebut terdapat dua gagasan penting, yakni kebutuhan terkait kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.¹⁰ Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan integratif antara ketiga elemen, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara dinamis.

⁹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pebangunan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2013, hlm. 8.

¹⁰ Surna Tjahja Djajadiningrat&Sutanto Harjdjolukito, *Demi Bumi Demi Kita, Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013, hlm. 60.

Konsep pembangunan berkelanjutan belum final disepakati. Namun demikian, usulan target pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam Rio+20 adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

¹¹ Sustainable Development Goals, <https://sustainabledevelopment.un.org/unsystem>, diakses 13 Agustus 2015.

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari target-target pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut, kemiskinan merupakan masalah utama yang harus segera ditangani. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian kemiskinan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling terkait dalam mencapai target SDGs. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberdayaan dalam pendidikan. Salah satu bentuknya adalah melalui pemberdayaan Komite Sekolah.

Desentralisasi pendidikan telah memberikan kewenangan bagi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di tingkat sekolah sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang dapat diwujudkan melalui Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan wahana yang menjembatani hubungan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dilakukan pemberdayaan Komite Sekolah. Dengan demikian pemberdayaan Komite Sekolah akan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkelanjutan.

IV. Pemberdayaan Komite Sekolah

Istilah pemberdayaan pada awalnya dipakai dalam bidang pendidikan non-formal oleh Kindervatter, yaitu proses peningkatan warga belajar untuk ikut dalam pengambilan keputusan, sumber-sumber daya yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Kindervatter memberikan batasan pemberdayaan pada produk akhir proses pemberdayaan, yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya sosial, ekonomi, dan politik agar bisa meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan kedudukan di masyarakat meliputi akses, daya

pengungkit (daya tawar kolektif), pilihan-pilihan (memiliki peluang untuk memilih), status, kemampuan refleksi kritis (memanfaatkan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulan yang dimiliki atas berbagai peluang pilihan dalam pemecahan masalah), legitimasi (ada pertimbangan ahli yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat), disiplin (menetapkan standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan orang lain), dan persepsi kreatif (pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungan diri dan lingkungannya).¹²

Berbeda dengan Kindervatten, Wallerstein memandang pemberdayaan sebagai proses aksi sosial yang meningkatkan partisipasi orang, organisasi, dan masyarakat menuju tujuan meningkatnya pengawasan individu dan masyarakat, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan keadilan sosial.¹³ Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, sebagaimana diungkapkan Payne, pemberdayaan bertujuan untuk keadilan sosial dengan memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.¹⁴ Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi lebih pada proses.

Dalam pemberdayaan, partisipasi merupakan syarat utama berlangsungnya proses pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mikkelsen yang menggambarkan partisipasi sebagai proses pemberdayaan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, memilih dan mengambil keputusan tentang solusi dari masalah yang dihadapi, melaksanakan keputusan tersebut dan mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁵ Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pendidikan

¹² Karna Sobahi & Cucu Suhana, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, Bandung: Cakra, 2011, hlm. 95.

¹³ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁴ Payne dalam Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 23.

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 108-111.

diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah. Komite Sekolah mewakili orang tua murid sebagai patner sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Mengingat peran Komite Sekolah yang cukup besar, maka perlu dilakukan pemberdayaan. Tujuannya, agar Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.

Dari beberapa kajian konsep pemberdayaan, teori yang relevan dengan pemberdayaan Komite Sekolah adalah teori pemberdayaan yang dikemukakan Pranarka dan Vidhyanika. Menurut Pranarka dan Vidhyandika, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu kecenderungan primer, yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya serta kecenderungan sekunder yang lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹⁶ Dalam konteks ini, pemberdayaan Komite Sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan instruksi dan stimulasi. Pendekatan instruksi dilakukan melalui reorganisasi, restrukturisasi, dan revitalisasi. Proses ini bertujuan untuk membangun kemandirian melalui organisasi. Sedangkan stimulasi lebih pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog. Karna Sobahi dan Cucu Suhana menambahkan satu pendekatan lagi, yakni sosialisasi, berupa proses pemberian pemahaman tentang peran serta masyarakat dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan.¹⁷ Dari ketiga pendekatan tersebut diharapkan Komite Sekolah benar-benar dapat menjadi lembaga masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan serta mengembangkan pola kemitraan antara sekolah dan masyarakat.

V. Kemiskinan dan Pemberdayaan melalui Pendidikan

Tantangan terhadap pembangunan berkelanjutan cukup beragam. Masalah pertama yang harus segera ditangani adalah kemiskinan. Saat

¹⁶ Karna Sobahi & Cucu Suhana, *ohlm. cit.*, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 96.

ini kemiskinan bukan lagi sekadar masalah negara-negara berkembang. Tren kemiskinan mengalami sedikit pergeseran dalam proporsi angka kemiskinan di negara berkembang dengan negara maju. Di tengah keberhasilan negara-negara berkembang seperti Brazil, Rusia, India, China dan South Afrika (BRICS), dalam menurunkan angka kemiskinan, negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa justru mengalami peningkatan jumlah kemiskinan. Demikian juga 130 negara berkembang masih menghadapi masalah kemiskinan.¹⁸

Indonesia termasuk negara yang masih berjuang untuk menanggulangi kemiskinan. Secara umum, angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Namun ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin terlihat jelas seperti ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 1. Statistik Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2014¹⁹

	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
Kemiskinan Absolut	31	30	29	29	28
Koefisien Gini	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber: Bank Dunia dan BPS.

Tabel 1 memperlihatkan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Meski belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat. Selain penurunan angka kemiskinan, persoalan lain yang perlu ditangani adalah distribusi pendapatan yang belum merata. Tahun 2011, koefisien gini mengalami peningkatan dibanding tahun

¹⁸ Pergeseran Isu Kemiskinan Global Dari BRICS Ke AS dan UE, http://www.kompasiana.com/www.kalimbuang.blogspot.com/pergeseran-isu-kemiskinan-global-dari-briics-ke-as-dan-ue_5529544e6ea834a5628b456d, diakses 1 September 2015.

¹⁹ Kemiskinan Di Indonesia, <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses 25 Agustus 2015.

sebelumnya 2010. Meski pada tiga tahun berikutnya, berada pada angka yang sama 0.41, namun ketimpangan antar-penduduk semakin terlihat jelas. Sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2011, persentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera.

Selain penduduk kategori miskin, di Indonesia juga terdapat penduduk yang rentan miskin. Kelompok ini perlu lebih diperhatikan karena mereka mudah jatuh lagi ke kondisi miskin. Berdasarkan data BPS, selama tahun 2008-2009, dari 60 juta keluarga miskin, sekitar 1,5 juta rumah tangga miskin berhasil keluar dari kategori miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. Sedangkan 2,1 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kategori sangat miskin tetapi tetap miskin dan sebanyak 0,9 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kondisi sangat miskin tetapi jatuh lagi dalam kemiskinan.²⁰

Melihat kondisi kemiskinan yang dialami sebagian penduduk di Indonesia, perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Salah satunya melalui pemberdayaan dalam pendidikan. Upaya pemberdayaan dipilih karena penanggulangan kemiskinan dapat dimulai dari peningkatan kualitas individu. Individu yang lebih mengetahui persoalan dan potensi yang ada di masyarakat sehingga keputusan untuk memilih alternatif solusi dari masalah yang dihadapi ada dalam diri masing-masing individu.

Pemberdayaan dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi. Hal ini dilandasi pemahaman bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua satuan pendidikan. Jika sebelum otonomi daerah, pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, maka bergulirnya otonomi daerah menuntut pengalihan sebagian besar tanggung jawab pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat. Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai mitra kerja masyarakat. Dengan demikian kemajuan pendidikan di tingkat daerah akan banyak bergantung pada partisipasi orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

²⁰ Tantangan Kemiskinan Pada 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015>, diakses 1 September 2015.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat luas. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional menyebutkan bentuk peran serta masyarakat adalah:

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan;
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli;
4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar;
7. Pemberian kesempatan untuk magang;
8. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
9. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
10. Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
11. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut apabila diimplementasikan menunjukkan telah terjadi pergeseran peran masyarakat menjadi *stakeholder* pendidikan yang aktif. Masyarakat yang dilibatkan sebagai subjek pendidikan akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan diri. Dari sini diharapkan akan tumbuh kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan untuk keluar dari berbagai permasalahan hidup termasuk kemiskinan.

VI. Komite Sekolah sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan akan mengalami perubahan dalam pengelolaan dari sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk

membuat perencanaan dan membuat keputusan atas permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih terbuka mengakomodasi munculnya gejala-gejala perubahan di masyarakat.

Di tingkat kabupaten/kota, desentralisasi pendidikan memberikan peluang kepada sekolah untuk membuat kebijakan masing-masing atas dasar konsep pendidikan berbasis masyarakat (PBM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). PBM melihat pendidikan sebagai proses dan masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan MBS merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas kepada sekolah disertai partisipasi masyarakat yang tinggi. Pada prinsipnya kedua pendekatan ini menekankan pada pelibatan masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunci keberhasilannya terletak pada partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam suatu wadah yang dapat menampung aspirasi, menggali potensi dan kebutuhan masyarakat demi tercapainya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah Komite Sekolah. Dasar hukum pembentukan Komite Sekolah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 yang menyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat maka perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Penjabarannya ada dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selain itu, Komite Sekolah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 56 ayat 3 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan badan baru yang lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

sekolah. Tujuan pembentukannya untuk mewedahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.²¹

Berbeda dengan badan-badan sejenis yang membantu pembiayaan kegiatan belajar mengajar seperti POM (Persatuan Orang Tua Murid), Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), maka Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi yang lebih luas, yaitu:²²

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebagai mediator, Komite Sekolah memfasilitasi berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat terkait kebijakan pendidikan yang ditetapkan sekolah. Masukan dari masyarakat selanjutnya akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah untuk dilakukan perbaikan. Kemudian Komite Sekolah akan mensosialisasikan hasil penyempurnaan program tersebut kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi Komite Sekolah yaitu:²³

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

²¹ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Karena itu, keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat seperti orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi pendidikan, wakil alumni, dan wakil peserta didik. Di samping itu, unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah.

Sinergi antara Komite Sekolah dan sekolah menyebabkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja. Melalui Komite Sekolah masyarakat dapat menyalurkan berbagai aspirasi dan partisipasi demi kemajuan pendidikan di daerahnya. Di samping itu, orang tua peserta didik berhak memantau penggunaan anggaran pendidikan di sekolah. Apabila ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi, maka orang tua peserta didik dapat menuntut pihak sekolah.

Mekanisme pembentukan Komite Sekolah melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal akan dibentuk panitia persiapan oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya lima orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. Selanjutnya, panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini; (2) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; (3) menyeleksi anggota

berdasarkan usulan dari masyarakat; (4) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; menyusun nama-nama anggota terpilih; (5) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah; dan (6) menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan. Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur.²⁴

VII. Gambaran Komite Sekolah Di Indonesia

Idealnya, kehadiran Komite Sekolah akan memberikan warna baru dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan akan berjalan sesuai prinsip demokrasi, di mana sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun dalam implementasi, Komite Sekolah belum dapat menjalankan perannya secara optimal. Bahkan beberapa kalangan memberikan tanggapan negatif dengan hadirnya Komite Sekolah. Beberapa faktor diindikasikan menjadi penyebab, yakni: **pertama**, banyak anggota Komite Sekolah yang kurang memahami peran dan fungsi Komite Sekolah. Sebagian menganggap Komite Sekolah merupakan badan pengganti BP3 yang berganti baju sehingga hanya berperan dalam penggalangan dana. Komite Sekolah dipandang sebagai prasyarat bagi sekolah untuk menerima dana *block grand*. **Kedua**, mekanisme pembentukan anggota Komite Sekolah belum sesuai dengan aturan yang ada. Ada indikasi bahwa pembentukan pengurus dan anggota Komite Sekolah lebih didominasi oleh Kepala Sekolah. Anggota yang terpilih lebih didasarkan pada hubungan kedekatan dengan Kepala Sekolah sehingga beberapa anggota Komite Sekolah kurang kompeten. **Ketiga**, kapasitas SDM Komite Sekolah di beberapa daerah masih rendah. Kurangnya pengetahuan dan wawasan pengurus Komite Sekolah dalam manajemen pendidikan menjadi kendala bagi mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya. **Keempat**, banyak Komite Sekolah yang telah dibentuk belum memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang disusun berdasarkan aspirasi

²⁴ *Ibid.*

orang tua dan masyarakat sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan. **Kelima**, banyak sekolah yang kurang melibatkan peran Komite Sekolah, terutama dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya, peran Komite sekolah terbatas. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan Komite Sekolah terhadap pihak sekolah yang berujung konflik. **Keenam**, komitmen pemerintah masih rendah terhadap Komite Sekolah. Akibatnya terjadi disfungsi Komite Sekolah.

Beberapa kasus terkait Komite Sekolah antara lain: kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp556 juta untuk merehabilitasi ruang kelas SDN Baros Mandiri 5 tahun anggaran 2012. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.²⁵ Kasus lain adalah konflik Komite Sekolah dengan pihak manajemen SMAN 70 Jakarta yang berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari beberapa kasus ini tampak bahwa masih banyak Komite Sekolah yang belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Hubungan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah kurang harmonis. Peran pengontrol transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan sekolah justru dijalankan oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan Komite Sekolah. Hal ini disebabkan Komite Sekolah tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan penyusunan RAPBS. Selain itu, Komite Sekolah hanya dimanfaatkan sebagai badan legalitas untuk memperoleh dana *block grand*.

VIII. Strategi Pemberdayaan Komite Sekolah

Melihat belum optimalnya peran Komite Sekolah, maka perlu strategi pemberdayaan Komite Sekolah. Berdasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan Pranarka dan Vidhyanika, maka pemberdayaan Komite Sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan instruksi dan stimulasi. Pendekatan instruksi dilakukan melalui reorganisasi, restrukturisasi, dan revitalisasi sehingga terbangun kemandirian melalui organisasi. Proses reorganisasi, restrukturisasi,

²⁵ Kepala SDN Baros Mandiri 5 dan Ketua Komite Jadi Tersangka Kasus DAK, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/09/11/296520/kepala-sdn-baros-mandiri-5-dan-ketua-komite-jadi-tersangka-kasus-dak>, diakses 2 September 2015.

dan revitalisasi dapat dimulai dari organisasi. Sebuah organisasi dapat berjalan apabila semua anggota dan pengurus organisasi memiliki visi yang sama. Dalam hal ini, tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Atas dasar ini, setiap anggota Komite Sekolah harus menjalankan peran dan fungsi sesuai tujuan pembentukannya. Komite Sekolah tidak boleh mengambil fungsi pelaksanaan satuan pendidikan, dalam pengertian tidak mengambil fungsi sebagai pelaksana, pemerintah, atau birokrasi. Selain itu, dalam sebuah organisasi diperlukan kerja sama tim yang solid dan efektif. Untuk itu perlu dibangun kinerja dalam suatu *teamwork*. Seluruh anggota Komite Sekolah harus bekerja sama secara aktif dengan menggunakan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan dari Komite Sekolah.

Setelah organisasi memiliki minimal syarat sebuah organisasi, selanjutnya Komite Sekolah mulai menyusun program kerja organisasi. Diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non- akademik. Hal yang perlu diingat adalah program kerja dan kebijakan yang dibuat Komite Sekolah perlu diselaraskan dengan tujuan pembentukan Komite Sekolah. Karena itu Komite Sekolah melakukan konsolidasi organisasi terlebih dahulu. Kemudian program kerja disusun sesuai prioritas yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Strategi pemberdayaan kedua adalah stimulasi. Mulai tahun 2011, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemberdayaan Komite Sekolah dengan memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan Komite Sekolah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun anggaran 2015, bantuan sosial Komite Sekolah untuk Sekolah Dasar (SD) dianggarkan sebesar Rp25 juta, sedang Komite Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp30 juta setiap Komite Sekolah. Dibandingkan dengan bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya, bantuan sosial pada tahun ini jauh lebih besar. Jumlah Komite Sekolah juga meningkat, yakni 220 Komite Sekolah SD, dan 100

Komite Sekolah SMP.²⁶ Proses untuk memperoleh bansos tersebut melalui seleksi berdasarkan proposal yang dikirimkan kepada Ditjen Pendidikan Dasar.

Tahun 2015, penggunaan dana bantuan sosial hanya untuk dua kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan daerah. Dalam hal ini Komite Sekolah yang akan menentukan kegiatannya. Kegiatan pertama adalah Budaya Literasi Sekolah (BLS) untuk meningkatkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi warga sekolah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah membuat perpustakaan kelas, majalah dinding, mengadakan perlombaan (pidato, debat masalah pendidikan, karya tulis siswa, matematika, dongeng cerita rakyat, paduan suara, cerdas cermat antar- sekolah, pelatihan komputer). Kegiatan kedua adalah Kegiatan Kreatif dan Produktif (KKP), yakni kegiatan yang baru dan produktif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komite Sekolah seperti mendirikan koperasi Komite Sekolah, membuat bank sampah, taman obat sekolah, pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk penggalangan dana CSR. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, maka pemberian bantuan sosial harus disertai upaya pemantauan dan penilaian atas ketepatan penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Komite Sekolah yang mempunyai program kerja yang kreatif dan produktif serta menjalankan peran dengan baik, layak mendapatkan bantuan sosial. Dengan demikian bantuan sosial tidak sekadar bantuan yang bersifat *charity* tetapi ada keberlanjutan program menuju peningkatan mutu pendidikan.

Pendekatan pemberdayaan ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi berkaitan dengan tujuan pembentukan Komite Sekolah serta peran dan fungsi Komite Sekolah. Selama ini persoalan yang muncul adalah sebagian masyarakat belum memahami peran dan fungsi Komite Sekolah. Karena itu, sosialisasi perlu terus dilakukan secara komprehensif baik kepada masyarakat, sekolah, maupun anggota Komite Sekolah. Tujuannya adalah untuk menghindari persepsi

²⁶ Suparlan, Penggunaan Bansos Komite Sekolah: 1. Meningkatkan Budaya Literasi Sekolah, 2. Program Kreatif dan Produktif Komite Sekolah, <http://suparlan.com/1906/2015/04/29/penggunaan-bansos-komite-sekolah-meningkatkan-budaya-literasi-sekolah-program-kreatif-dan-produktif-komite-sekolah/>, diakses 3 September 2015.

yang salah terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, seminar, dialog maupun melalui media massa. Era kemajuan teknologi ditandai dengan adanya ketergantungan masyarakat akan informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik.²⁷ Karena itu, dukungan media massa akan lebih membantu upaya memperkenalkan Komite Sekolah kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran dalam masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Sosialisasi perlu dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan berkaitan dengan peran dan fungsi Komite Sekolah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Berlakunya MBS memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk menyusun proses pembelajaran yang kondusif sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat. Dalam konteks inilah Komite Sekolah berperan sebagai mitra kerja sekolah untuk membantu pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah. Untuk mendukung pelaksanaan peran tersebut, Komite Sekolah perlu didampingi. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh Dewan Pendidikan kabupaten/kota melalui fasilitatornya. Fasilitator ini yang akan melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Karena itu, fasilitator dituntut untuk mampu mengintegrasikan tiga aspek, yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, tugas fasilitator adalah: (1) memberikan fasilitasi Komite Sekolah, khususnya dalam proses pembentukan Komite Sekolah; (2) memberikan pendampingan dalam perumusan program dan kegiatan Komite Sekolah selaras dengan peran dan fungsi Komite Sekolah; (3) membentuk Komite Sekolah Inti dan Komite Sekolah Imbas; (4) membangun forum komunikasi Komite Sekolah di tingkat kabupaten/kota; dan (5) memberikan fasilitasi untuk menjalin hubungan yang tidak harmonis antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah, serta dunia usaha dan industri.²⁸ Mengingat peran fasilitator yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan

²⁷ Oos M. Nawas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 106.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007, hlm. 21.

pemberdayaan, maka fasilitator dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mendesain program pemberdayaan Komite Sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui TOT (*training of trainer*) pemberdayaan Komite Sekolah.

Program pemberdayaan Komite Sekolah dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut:²⁹

1. Proses pembentukan Komite Sekolah tidak lagi dilakukan secara instan, tetapi melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan AD/ART.
2. Komite Sekolah telah menjadi lembaga masyarakat yang mandiri, dengan melaksanakan prinsip manajemen yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
3. Komite Sekolah telah menjadi lembaga masyarakat yang diakui eksistensinya secara mantap oleh pemangku kepentingan.
4. Komite Sekolah dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan institusi terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.
5. Komite Sekolah memiliki semangat kemitraan dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan sekolah/madrasah.
6. Permasalahan yang akan muncul antara Komite Sekolah dan satuan pendidikan sekolah/madrasah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh kedua belah pihak.
7. Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah dan satuan pendidikan sekolah/madrasah masing-masing.

IX. Penutup

Isu penanggulangan kemiskinan dan lingkungan hidup akhir-akhir ini berkembang di dunia internasional. Asumsinya adalah kemiskinan akan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tanpa strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, maka upaya masyarakat internasional melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan akan sia-sia.

²⁹ *Ibid*, hlm. 26-27.

Upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan sebagai strategi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Kelompok miskin di Indonesia membutuhkan kebijakan yang diarahkan langsung pada akar permasalahannya, yakni meningkatkan kemampuan individu. Bagian yang tertinggal dalam individu harus ditingkatkan kemampuannya melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam pendidikan. Dalam hal ini, partisipasi ditekankan pada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan representasi dari berbagai unsur pendidikan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peran dan fungsi Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Untuk mendukung peran tersebut, Komite Sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan Komite Sekolah dilakukan melalui pendekatan instruksi, stimulasi, dan sosialisasi. Pendekatan instruksi dilakukan melalui reorganisasi, restrukturisasi, dan revitalisasi sehingga terbangun kemandirian melalui organisasi. Sedangkan pendekatan stimulasi dilakukan melalui pemberian bantuan sosial untuk memperkuat kelembagaan Komite Sekolah. Tahun 2015, bantuan sosial harus digunakan untuk dua kegiatan, yaitu Budaya Literasi Sekolah dan Kegiatan Kreatif dan Produktif. Pendekatan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, seminar, dialog, maupun melalui media massa. Tujuannya untuk menumbuhkan pemahaman dalam masyarakat tentang peran dan fungsi Komite Sekolah. Sosialisasi diikuti dengan kegiatan pendampingan Komite Sekolah oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Dengan upaya pemberdayaan diharapkan Komite Sekolah benar-benar dapat mengembangkan pola kemitraan antara sekolah dan masyarakat menuju peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Eksistensi Komite Sekolah perlu didukung peraturan daerah sehingga aspek-aspek legalitas dan mekanisme kontrol Komite Sekolah semakin kuat. Pembentukan Komite Sekolah yang memiliki kekuatan hukum akan menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang maju dan berkualitas merupakan sarana untuk mengangkat masyarakat dari berbagai ketertinggalan, termasuk kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Alfitri. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja dan Sutanto Hardjolukito. *Demi Bumi, Demi Kita, Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*. Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013.
- Nawas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nurhasim, Moch., et al. *Model Kebijakan yang Memihak Kelompok/Orang Miskin Berbasis Good Governance*. Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Sobahi, Karna&Cucu Suhana. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Cakra, 2011.

Artikel dalam Internet

Suparlan, Penggunaan Bansos Komite Sekolah: 1. Meningkatkan Budaya Literasi Sekolah, 2. Program Kreatif dan Produktif Komite Sekolah. <http://suparlan.com/1906/2015/04/29/penggunaan-bansos-komite-sekolah-meningkatkan-budaya-literasi-sekolah-program-kreatif-dan-produktif-komite-sekolah/>, diakses 3 September 2015.

Tulisan dalam Internet

Kemiskinan Di Indonesia. (<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses 25 Agustus 2015).

Kepala SDN Baros Mandiri 5 dan Ketua Komite Jadi Tersangka Kasus DAK. (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/09/11/296520/kepala-sdn-baros-mandiri-5-dan-ketua-komite-jadi-tersangka-kasus-dak>, diakses 2 September 2015).

Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals. (<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal>, diakses 4 September 2015).

Pergeseran Isu Kemiskinan Global Dari BRICS Ke AS dan UE. (http://www.kompasiana.com/www.kalimbuang.blogspot.com/pergeseran-isu-kemiskinan-global-dari-briics-ke-as-dan-ue_5529544e6ea834a5628b456d, diakses 1 September 2015).

Program BLT Tak Menekan Angka Kemiskinan. (http://www.indosiar.com/fokus/program-blt-tak-menekan-angka-kemiskinan_69766.html, diakses 25 Agustus 2015).

Raskin, Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/>, diakses 25 Agustus 2015).

Sustainable Development Goals. (<https://sustainabledevelopment.un.org/unsystem>, diakses 13 Agustus 2015).

Tantangan Kemiskinan Pada 2015, (<http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015>, diakses 1 September 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.

BAB V

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Herlina Astri

I. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk baru dalam pembangunan, yang mengedepankan aspek lingkungan dan pemanfaatan sumber daya untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan juga terkait dengan aspek ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penanganan kemiskinan, sebab saat ini di Indonesia kemiskinan menjadi fokus utama dalam perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan banyak dikaitkan dengan peningkatan ekonomi, yang kadang dalam pelaksanaannya kurang memerhatikan keadaan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memerhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memerhatikan segi sumber daya dan lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi. Sisa-sisa pembangunan di setiap pemerintahan ada yang memberikan dampak pada kenaikan tingkat kemiskinan. Pembangunan sebagai penyebab kemiskinan terkait dengan adanya utang yang belum dilunasi dan pihak terkait yang lepas tangan akan keadaan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan pun menjadi hal yang banyak menjadi sorotan untuk segera dibenahi.

Penanganan kemiskinan merupakan pekerjaan berat yang harus ditanggung oleh pemerintah. Program-program yang dijalankan seharusnya sesuai dengan karakteristik wilayah, di mana untuk masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), maupun sosiokultur yang ada dalam masyarakat. Jangan sampai program yang dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat tidak mengetahui dan kekurangan akses atas program yang dijalankan.

II. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Dalam perkembangan saat ini, negara-negara yang tergolong maju berupaya untuk menekan laju degradasi lingkungan, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang. Transisi demografi yang terjadi di negara-negara berkembang menyebabkan terjadinya urbanisasi secara besar-besaran. Fenomena tersebut dapat ditemukan di beberapa kota besar di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang sangat berbeda jauh antara kota besar dengan kota kecil, di mana kondisi ini lebih dikenal dengan istilah primate city. Namun jumlah penduduk yang besar ini tidak mampu didukung oleh lingkungan yang menopangnya.

Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan tata guna lahan di perkotaan. Mereka yang tidak mampu membeli lahan di pusat kota mulai mendirikan bangunan di kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, seperti bantaran sungai, hutan kota, rawa, dan lain-lain, sehingga para pakar lingkungan di negara maju menilai bahwa penurunan daya dukung lingkungan yang terjadi di dunia disebabkan oleh fenomena kemiskinan yang tidak kunjung berakhir di negara berkembang.

Konsep umum strategi pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal sebagai berikut: (1) Meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi; (2) Meratanya peran dan kesempatan perempuan; (3) Meratanya ekonomi yang dicapai

dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walau pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa SDA selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial maka pelaksanaan pembangunan lebih integratif. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

4. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakannya penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek masih mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan:

ekuiti sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan).¹ Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal ekonomi (finansial, modal mesin, dan lain-lain), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan, dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi SDA diperbaharui dan daur ulang serta substitusi SDA yang tidak terbaharui).

Menurut Marlina, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 pilar pembangunan berkelanjutan).²

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, inter-relasi, dan interdependensi, yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: (1) Terpeliharanya proses ekologi yang esensial; (2) Tersedianya sumber daya yang cukup; dan (3) Lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai.³

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum terlihat jelas meski berbagai konvensi internasional dan pertemuan-pertemuan besar diikuti dan disepakati. Namun demikian, secara garis besar proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik, antara lain:⁴

¹ Salim, Emil. 2003. "Orasi Ilmiah Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup". Kampus IPB Baranangsiang, Sains Dan Pembangunan Berkelanjutan, hlm. 2.

² Marlina, Ani. 2009. *Karakteristik Untuk Mendefinisikan Sustainable*. Wordpress: Jakarta, hlm. 20.

³ Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan: Jakarta, hlm. 161.

⁴ Kusumaatmadja, Sarwono. "Pembangunan Berkelanjutan untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengembangan Sikap Masyarakat terhadap Produk Ramah Lingkungan". Lihat: http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Mengatasi_kemiskinan_dan_pengembangan_sikap_masyarakat_-_sarwono_kusumaatmadja.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2015.

1. Kebijakan konservasi dan diversifikasi energi ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan makin dominannya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
2. Kebijakan kependudukan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk sampai ke tingkat yang dapat ditanggung oleh keberadaan SDA dan dapat terlayani baik oleh fasilitas publik di bidang kesejahteraan rakyat.
3. Kebijakan spasial untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan di perairan untuk konservasi SDA.
4. Kebijakan untuk menanamkan budaya dan gaya hidup hemat, bersih, dan sehat, sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindarkan pemborosan energi, material, dan mengurangi tindakan medik kuratif.
5. Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, sumber-sumber makanan, dan pencegahan bencana.
6. Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal, dan pendidikan dan lainnya untuk menunjang hal-hal di atas.

Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu:⁵ **Pertama**, proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. **Kedua**, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. **Ketiga**, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. **Keempat**, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan **kelima**, pembangunan berkelanjutan mengandaikan

⁵ "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau Principle of Sustainability Development" lihat: <http://www.bangazul.com/prinsip-prinsip-pembangunan-berkelanjutan/>, diakses tanggal 22 Juni 2015.

solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Dari sudut pembangunan berkelanjutan, maka masalah lingkungan telah menjadi bagian dari pemicu meluasnya proses pemiskinan, terutama pada lapisan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif pencemaran dan perusakan lingkungan. Krisis di Indonesia menyebabkan turunnya kapasitas pemerintah untuk melakukan proteksi lingkungan sehingga kemampuan pemerintah untuk melanjutkan pelayanan dasar pada masyarakat miskin juga berkurang. Oleh karena itu bagi sebagian besar orang Indonesia yang terilit kemiskinan, pembangunan bukan saja tidak lagi relevan, namun juga menjadi salah satu ancaman. Ini yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sering mendapat perlawanan sebagai bentuk defensif untuk menghindari dari pemiskinan tersebut.

III. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan salah satu contoh ketidakadilan yang dialami suatu kelompok (masyarakat pra-sejahtera). Ketidakadilan itu terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang baik, sulitnya mendapat akses ke pelayanan publik (sanitasi sehat, air bersih, pengelolaan sampah) rumah sehat, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Ketidakadilan juga terlihat dari tidak adanya akses kepemilikan hak atas tanah yang mereka huni. Sebagai akibat itu semua, sulit bagi mereka untuk mendapat akses ke pekerjaan yang baik dan stabil. Ketidakadilan itu menyebabkan masyarakat miskin tetap menjadi miskin dan mengancam proses pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, kondisi permukiman buruk atau kumuh dalam suatu kawasan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut sedang dalam proses tidak berkelanjutan.

Saat ini masalah kemiskinan merupakan masalah mendesak yang dihadapi di Indonesia. Yang paling terlihat jelas adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan sosial ekonomi, politik, dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman

utama bagi proses pembangunan berkelanjutan dengan melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai masyarakat sejahtera (masyarakat berkelanjutan) dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan.⁶ Berikut adalah tabel angka kemiskinan di Indonesia:

Tabel. 2.2.1 Angka Kemiskinan di Indonesia
Berdasarkan Sifat Absolut dan Relatif Tahun 2009–2014

Tahun	Kategori	
	Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	Kemiskinan Relatif (% dari Populasi)
2009	33	14,2
2010	31	13,3
2011	30	12,5
2012	29	11,7
2013	29	11,5
2014	28	11,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan di Indonesia*. Lihat: <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses tanggal 16 Juni 2015.

Tabel tersebut menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun pada kenyataannya pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat terkait definisi garis kemiskinan ini. Dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meski demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinan yang saat ini harus dibantu untuk bangkit. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lambat dari sebelumnya.⁷

⁶ Djody Gondokusumo, Madrim. 2005. *Bunga Rampai: Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pedekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, hlm. 405.

⁷ *Kemiskinan di Indonesia. op. cit.*

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah statis. Orang miskin bukanlah orang yang pasif. Mereka sebenarnya seorang manajer dengan seperangkat aset yang ada di seputar diri dan lingkungannya. Keadaan ini terjadi pada orang yang miskin yang hidup di negara yang tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem tersebut dianggap mampu melindungi warganya menghadapi kondisi-kondisi yang memburuk yang dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Kelangsungan hidup individu dalam situasi sering sekali tergantung pada keluarga yang secara bersama-sama dengan jaringan sosial membantu warga lainnya dengan memberikan bantuan keuangan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Pendekatan kemiskinan yang berkembang selama ini perlu dilengkapi dengan konsep keberfungsian sosial yang lebih menggunakan demokrasi-sosial. Pemaknaan keberfungsian sosial ini akan lebih memperjelas analisis mengenai bagaimana orang miskin mengatasi kemiskinannya, serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga kekerabatan, dan jaringan sosial memengaruhi kehidupan orang miskin. Paradigma baru lebih menekankan pada "apa yang dimiliki si miskin" daripada "apa yang tidak dimiliki si miskin."⁸

IV. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Oleh karenanya hal ini tidak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Secara umum ada 3 persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) Pengentasan kemiskinan; (2) Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan; dan (3) Perlindungan dan pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu penanganan kemiskinan juga tidak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal

⁸ Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 148.

tersebut menjadi dasar terlaksananya pembangunan berkelanjutan termasuk dan terutama di Indonesia, yang di antaranya ditandai oleh berjalannya:

1. Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik;
2. Kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif;
3. Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (responsif) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
4. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil;
5. Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu; dan
6. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan.

Beberapa langkah tersebut juga wajib disertai dengan strategi dan langkah lain yang menunjang. Misalnya konsep pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk menangani kemiskinan, juga harus memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan air bersih dan sanitasi yang memadai serta peningkatan akses pada sumber daya dan layanan energi yang handal, ramah lingkungan, dan terjangkau serta layak secara ekonomi dan sosial. Pengadaan air minum yang bersih dan sanitasi yang memadai bukan hanya penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan pada umumnya, tetapi terutama karena merupakan kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk miskin yang tidak mendapat akses pada sanitasi dasar yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem sanitasi rumah tangga yang efisien, praktik dan teknologi yang terjangkau dan dapat diterima secara sosial-budaya, serta mengembangkan sistem dan mekanisme pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya air dan pengadaan air bersih bagi masyarakat yang tidak dilandasi pertimbangan komersial.

Masyarakat miskin di Indonesia juga sangat membutuhkan sumber daya dan layanan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau secara ekonomi. Ini berarti harus dihindari dan dikurangi

penggunaan kayu bakar yang diambil dari hutan atau kebun, atau penggunaan bahan energi *fossil fuel* seperti minyak bumi dan batu bara yang kotor, di mana akan menimbulkan pencemaran udara, dan membawa dampak pada perubahan iklim. Langkah perubahan ini membutuhkan perangkat kebijakan dan sistem yang menunjang transisi ke arah peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*), energi bio-massa, dan penggunaan bahan bakar fosil cair dari gas yang lebih bersih yang lebih akrab lingkungan, lebih murah, dan dapat diterima secara sosial.

Strategi penanganan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup. Sebab makin luas dari besarnya kerusakan, degradasi dan pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini, merupakan akibat langsung dari penggunaan dan pemanfaatan SDA terutama yang tidak terbarukan secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab oleh sistem industri modern.

Selama ini program-program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak sedikit yang hanya bersifat reaktif dan temporer, di mana tidak memiliki keberlanjutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut secara tuntas. Upaya penanganan kemiskinan tersebut dilakukan melalui berbagai program, antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan sebagainya. Berbagai program tersebut sebagian besar bersifat *top down* sehingga masyarakat miskin yang merupakan sasaran program kurang begitu berperan dalam program-program yang diberikan.⁹

Program-program penanganan kemiskinan umumnya menempatkan warga miskin sebagai objek pembangunan sehingga masih kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini perlu dievaluasi kembali. Dapat dikatakan upaya penanganan kemiskinan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu lebih melibatkan

⁹ Tontowi, Ahmad. 2010. Tesis: Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik UNS, hlm. 4.

warga miskin sebagai subjeknya. Hal ini diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan berinisiatif untuk melakukan program-program sendiri.¹⁰ Di sini pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan solusi bagi penanganan kemiskinan. Program-program yang diberikan sebaiknya bersifat mendukung penanganan kemiskinan tersebut. Ini menjadi tolok ukur kesadaran pemerintah untuk merespons setiap kesulitan yang dialami rakyatnya.

Program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh beberapa kementerian yang melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat juga sangat beragam. Beberapa di antaranya misalnya, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, sampai bantuan uang tunai. Program-program tersebut memiliki sasaran utama masyarakat yang dikategorikan miskin, yang sebagian besar tinggal di daerah kota dan pinggiran kota. Dalam pelaksanaannya, apabila mengesampingkan beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi, program-program yang dilaksanakan memang cukup memberikan kemudahan untuk membantu kehidupan masyarakat yang dikategorikan miskin. Permasalahan pembangunan ekonomi pun dapat diperbaiki dan memberikan jalan keluar yang baik dalam hal kesejahteraan sosial terutama bagi masyarakat yang dikategorikan miskin. Seperti yang dinyatakan oleh Basri bahwa format baru pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh lagi memisahkan di antara keduanya,¹¹ melainkan harus padu (*built in*) di dalam strategi dan setiap kebijakan pembangunan.¹²

Program penanggulangan kemiskinan juga harus memberikan solusi baru demi terjadinya kesinambungan secara meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu yang harus dilihat adalah usaha mikro ekonomi yang merupakan usaha kecil yang ada banyak terdapat di kalangan masyarakat kecil atau pedesaan. Beberapa pemberdayaan usaha mikro bertujuan untuk:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri; dan berkelanjutan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ Yang dimaksud “keduanya” dalam pernyataan tersebut adalah mengenai kesejahteraan sosial yang dapat dicapai dengan kemakmuran dan keadilan dengan prasyarat demokrasi.

¹² Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 113.

2. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro.
3. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan “status usaha” usaha mikro agar *feasible* dan *bankable* dalam jangka panjang.
4. Penataan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro untuk memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya sudah direalisasikan oleh pemerintah. hanya saja kenyataan di lapangan sering tidak sama dengan dengan program yang dicanangkan. Tidak tepat sasaran menjadi salah satu aspek yang menghambat penanggulangan kemiskinan. Aspek dari berbagai sudut pandang juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan tetap ada dan bahkan terus meningkat. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah juga harus melihat bagaimana situasi yang berkembang dari tahun ke tahun, karena perkembangan dari dahulu sampai sekarang terjadi perubahan yang sangat besar, terutama dalam bidang teknologi informasi. Sudah selayaknya masyarakat bisa bersaing dengan era globalisasi yang semakin meningkat dan canggih.

Penanganan kemiskinan merupakan pekerjaan berat yang harus ditanggung oleh pemerintah. Program-program yang dijalankan harusnya sesuai dengan karakteristik wilayah, di mana untuk masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi SDM, SDA, maupun sosiokultur yang ada di masyarakat. Jangan sampai program yang dijalankan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi masyarakat sendiri tidak mengetahui atau kekurangan akses atas program yang dijalankan. Dengan terjadinya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, maka program pengentasan kemiskinan akan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat pada sasaran yang dituju. Hal ini tentunya juga membantu pemerintah untuk mengawasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi.

V. Penutup

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks. Pengertian keberlanjutan pun sangat

multidimensi dan multi-interpretasi. Pembangunan berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek pemahaman, yaitu: keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (efisiensi dan pertumbuhan), tujuan ekologi (konservasi SDA) dan tujuan sosial (mengurangi kemiskinan dan pemerataan).

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. Setiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi, dan peluang yang ada.

Pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan dan memfokuskan diri pada masalah kemiskinan. Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda internasional, termasuk Indonesia. Namun pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak memerhatikan kaidah-kaidah konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat antara lain dalam masalah kerusakan hutan, konversilahan, pencemaran udara, pembuangan limbah, kesenjangan sosial, tingginya jumlah penduduk miskin dan menjamurnya budaya korupsi. Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi, dan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Djody Gondokusumo, Madrim. 2005. *Bunga Rampai: Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pedekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- “Kemiskinan di Indonesia”. Lihat: <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses tanggal 16 Juni 2015.
- Kusumaatmadja, Sarwono. “Pembangunan Berkelanjutan untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengembangan Sikap Masyarakat terhadap Produk Ramah Lingkungan”. Lihat: [http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Mengatasi kemiskinan dan pengembangan sikap masyarakat – sarwono kusumaatmadja.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Mengatasi_kemiskinan_dan_pengembangan_sikap_masyarakat_-_sarwono_kusumaatmadja.pdf), diakses tanggal 10 Juni 2015.
- Marlina, Ani. 2009. *Karakteristik Untuk Mendefinisikan Sustainable*. Wordpress: Jakarta.
- “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau Principle of Sustainability Development” lihat: <http://www.bangazul.com/prinsip-prinsip-pembangunan-berkelanjutan/>, diakses tanggal 22 Juni 2015.
- Salim, Emil. 2003. *Orasi Ilmiah Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup*. Kampus IPB Baranangsiang, Sains Dan Pembangunan Berkelanjutan.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan: Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

BAB VI

KESETARAAN GENDER DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Dina Martiany

“Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.” (Kofi Annan)

I. Pendahuluan

Millennium Development Goals (MDGs) sebagai kerangka kerja pembangunan global telah berakhir pada September 2015 yang lalu. Sejak dicanangkan dalam *United Nation Millennium Summit* tahun 2000, sebanyak 189 negara di dunia berupaya untuk mencapai delapan target pembangunan yang dituangkan dalam MDGs. Profesor Jeffrey D. Sachs¹ menyebutkan bahwa MDGs telah menjadi tonggak metode mobilisasi global yang historis dan efektif dalam mencapai rangkaian prioritas pembangunan sosial yang penting di seluruh dunia. Negara-negara di dunia secara bersama-sama menunjukkan kepedulian global mengenai kemiskinan, kelaparan, angka pendidikan dasar, ketidaksetaraan gender, dan kerusakan lingkungan. Berbagai prioritas penting dalam pembangunan dikemas dalam delapan target MDGs yang mudah dipahami, dengan menetapkan indikator dan jangka waktu tertentu. MDGs menjadi lebih mendorong pencapaian kesadaran global (*global awareness*), akuntabilitas politik (*political accountability*), peningkatan metrik

¹ Profesor Jeffrey D. Sachs merupakan ekonom dan pakar *Sustainable Development Goals* dari Earth Institute, Universitas Columbia, Amerika dan Direktur the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) United Nations.

(*improved metrics*), saran sosial (*social feedback*), dan tekanan publik (*public pressure*).²

Salah satu keberhasilan pencapaian MDGs dapat dilihat dari menurunnya kondisi kemiskinan ekstrim secara signifikan selama lebih dari dua dekade terakhir. Pada tahun 1990, hampir setengah dari populasi negara berkembang hidup dengan pendapatan per hari kurang dari US\$1,25; pada tahun 2015 menurun hingga menjadi 14 persen. Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pun telah menurun lebih dari setengahnya, yaitu dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 836 juta pada tahun 2015. Mayoritas *progress* tersebut terjadi sejak tahun 2000. Di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional hingga akhir 2014 sebanyak 11,25 persen dari 15,10 persen pada tahun 1990. Pencapaian ini memang belum sesuai dengan target 7,55 persen yang diharapkan dapat dicapai pada akhir 2015, namun telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.³

Di samping laporan keberhasilan MDGs, masih terdapat pula permasalahan yang belum terselesaikan dan target yang belum tercapai. United Nations (UN) dalam *The Millennium Development Goals Report: 2015*⁴ menyebutkan beberapa hambatan tersebut, yaitu: a) perempuan masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses pekerjaan, aset ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di ruang publik dan privat. Perempuan juga lebih banyak hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan laki laki; b) adanya kesenjangan yang besar antara rumah tangga

² Jeffrey.D.Sachs. "From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals", *Lancet* 2012, Volume 379, Juni 2012, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1s2.0S0140673612606850main.pdf&_piikey=S0140673612606850&_cdi=271074&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1s2.0S0140673612606850&_user=12975512&md5=bc3c0176a904607405eba89298d67e76&ie=/excerpt.pdf

³ "Pemerintah Nyerah Kejar Target Kemiskinan MDG". Berita pada <http://economy.okezone.com/read/2015/08/12/320/1194840/pemerintah-nyerah-kejar-target-kemiskinan-mdgs>, 12 Agustus 2015, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.

⁴ United Nations. *The Millennium Development Goals Report: 2015 (Summary)*, New York: United Nations. 2015.

kaya dan miskin, dan antara desa dan kota; c) perubahan iklim dan merusak lingkungan sangat mengkhawatirkan; d) konflik masih menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan manusia; dan e) jutaan orang miskin masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tanpa akses terhadap layanan dasar.

Di Indonesia, indikator target MDGs yang paling sulit dicapai adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), sebagai indikator MDGs *goal* ke-5: meningkatkan kesehatan ibu. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan AKI berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup, padahal target yang diharapkan dapat dicapai pada akhir MDGs tahun 2015 sebesar 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Menurut *The United Nations Population Fund* (UNFPA), sejak tahun 2007 Indonesia tercatat sebagai negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara, dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup.⁵

Tujuan yang belum dapat dicapai melalui MDGs, akan dilanjutkan dalam *framework* pembangunan global yang baru, selama lima belas tahun mendatang. Pada tanggal 25–27 September 2015 dalam *United Nations (UN) Summit* sebanyak 193 negara peserta telah menyepakati *Post-2015 Development Agenda* atau *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Berbeda dengan proses penyusunan MDGs, penyusunan SDGs dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Sejak 19 Juli 2014, *The UN General Assembly's Open Working Group on Sustainable Development Goals* (OWG) telah mengusulkan 17 SDGs dengan 169 target, yang mencakup berbagai area pembangunan berkelanjutan. Berbagai tujuan tersebut mengintegrasikan dan tidak memisahkan, serta menyeimbangkan ketiga dimensi *sustainable development*: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu isu penting yang menjadi tujuan SDGs adalah pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan, serta anak perempuan (*achieve gender equality and*

⁵ “Ringkasan Eksekutif Penelitian Kebijakan Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu”. Women Research Institute pada <http://wri.or.id/166> current project id/perempuan kesehatan/angka kematian ibu/654 ringkasan eksekutif penelitian kebijakan efektivitas jaminan kesehatan nasional untuk menurunkan angka kematian ibu#.VdLoz_nKFY8, Jakarta, tanpa tahun.

empower all women and girls). Pada bagian *Preamble* (Pembukaan) dokumen hasil UN Summit 25–27 September 2015: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, disebutkan bahwa deklarasi SDGs ini merupakan skala dan ambisi tujuan pembangunan universal yang baru. Tujuan pembangunan yang berupaya mewujudkan hak asasi manusia untuk semua, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan.

Kesetaraan gender merupakan isu yang terus berkembang dan sangat terkait dengan berbagai isu pembangunan lainnya. Tujuan SDGs akan lebih cepat tercapai apabila berbagai area pembangunan SDGs mengintegrasikan perspektif gender di dalamnya. Tujuan kesetaraan gender dapat dilihat sebagai *stand alone goal* (tujuan yang berdiri sendiri), maupun sebagai tujuan yang diarusutamakan dalam tujuan lainnya dengan target dan indikator yang tepat (*mainstreaming gender into other goals through appropriate target and indicators*).⁶ Sebagaimana disampaikan oleh Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, bahwa: “kesetaraan gender sesungguhnya lebih dari sekadar tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kondisi awal untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan dan membangun pemerintahan yang baik (*gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance*)”.

Kesetaraan gender secara eksplisit juga termasuk dalam salah satu butir MDGs, yaitu tujuan ke-3 meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (*promote gender equality and empower women*). Meski demikian, hampir setiap butir MDGs terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, misalnya: tujuan ke-1 menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; tujuan ke-2 pendidikan dasar untuk semua; tujuan ke-4 menurunkan angka kematian anak; tujuan ke-5 meningkatkan kesehatan ibu; tujuan ke-6 memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; dan tujuan ke-7 memastikan kelestarian lingkungan hidup.

⁶ UN Women. *A transformative Stand Alone Goal on Achieving Gender Equality, Women's Rights and Women's Empowerment: Imperative and Key Components*. New York: UN Women, 2013.

Upaya pencapaian target target MDGs terkait kesetaraan gender yang masih belum sesuai harapan akan dilanjutkan melalui SDGs.

Hasil survei yang dilakukan oleh UN Women⁷ memperkuat argumen bahwa mengaitkan kesetaraan gender dan *sustainable development* sangat penting karena beberapa alasan berikut ini: **Pertama**, terkait moral dan etika yang sangat mendesak, yaitu: mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan hak asasi manusia, harkat, dan kemampuan perempuan dari berbagai kelompok; merupakan persyaratan utama dalam pembangunan berkelanjutan. **Kedua**, merupakan kritik terhadap ketidakseimbangan *impact* dari kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta tekanan terhadap perempuan dan anak perempuan, di mana hal ini dapat merusak hak asasi dan peran vital mereka dalam membangun keluarga dan komunitas mereka. **Ketiga**, alasan yang paling signifikan, yaitu: pentingnya membangun sumber daya/lembaga dan kemampuan perempuan, untuk mewujudkan sinergi yang lebih baik antara kesetaraan gender dan *sustainable development*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan mendeskripsikan lebih jauh mengenai tujuan kesetaraan gender dalam *sustainable development*. Selain itu, akan ditelusuri pula bagaimana jalan panjang proses penyusunan SDGs, sehingga dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender sangat terkait erat dengan ketiga dimensi dalam *sustainable development*. Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana proses penyusunan SDGs; (2) Bagaimana konsep tujuan kesetaraan gender dalam *sustainable development*/SDGs; dan (3) Bagaimana *mainstreaming* perspektif gender dalam SDGs?

II. Proses Menuju *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Istilah *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dipopulerkan dalam *Our Common Future*, suatu laporan yang dipublikasikan oleh *World Commission on Environment and Development* pada tahun 1987. Laporan ini dikenal juga dengan sebutan “Brundtland Report”. Di dalamnya dijabarkan pengertian dasar dari *sustainable development*, yaitu pembangunan

⁷ UN Women. *The World Survey on the Role of Women in Development: Gender Equality and Sustainable Development*, 2014, hlm. 12.

yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*).

Pada tahun 1992 para pemimpin dunia menyusun prinsip prinsip *sustainable development* dalam *United Nations Conference on Environment and Development* atau *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil. Hasil pertemuan ini dirumuskan dalam Agenda 21 dan menjadi awal komitmen kerja sama global baru melalui *sustainable development* yang mencakup tiga pilar utama, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Konsep *sustainable development* ini dibutuhkan sebagai kerangka pembangunan global yang baru, untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi pasca-MDGs 2015. Senior Advisor INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) Michael Bobby Hoelman mengatakan bahwa SDGs sangat penting, karena permasalahan global yang menjadi target SDGs juga merupakan permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia, antara lain: kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pelestarian lingkungan.⁸ Oleh sebab itu, sudah semestinya Indonesia memberikan perhatian terhadap tujuan MDGs yang masih tertinggal, untuk dilanjutkan dan dicapai melalui SDGs.

Penyusunan pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:⁹ **pertama**, jalur ***Member State Led***, yang merupakan proses antarnegara untuk membangun dan mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Proses ini sering disebut sebagai jalur SDGs. Proses SDGs disetujui dalam *UN Conference on Sustainable Development (Rio+20)*, di mana para negara peserta menyetujui untuk melakukan proses

⁸ Berita Tempo *online*, "Jokowi Didesak Datang ke Sidang Umum PBB Lanjutkan Misi Ini", tanggal 9 Agustus 2015, [http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/09/078690254/jokowi didesak datang ke sidang umum pbb lanjutkan misi ini](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/09/078690254/jokowi%20didesak%20datang%20ke%20sidang%20umum%20pbb%20lanjutkan%20misi%20ini), diakses pada 18 Agustus 2015.

⁹ Hamong Santono dan Sugeng Bahagijo. *Pembangunan Global Baru: Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015, Briefing Paper*. Jakarta: INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*), Januari 2015.

intergovernmental. Berdasarkan pertemuan Rio+20 disepakati pembentukan *Open Working Group on Sustainable Development Goals* (OWG SDGs). Selain itu, Rio+20 juga menyepakati dibentuknya *Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing* (ICESDF) dan *High Level Political Forum* (HLPF).

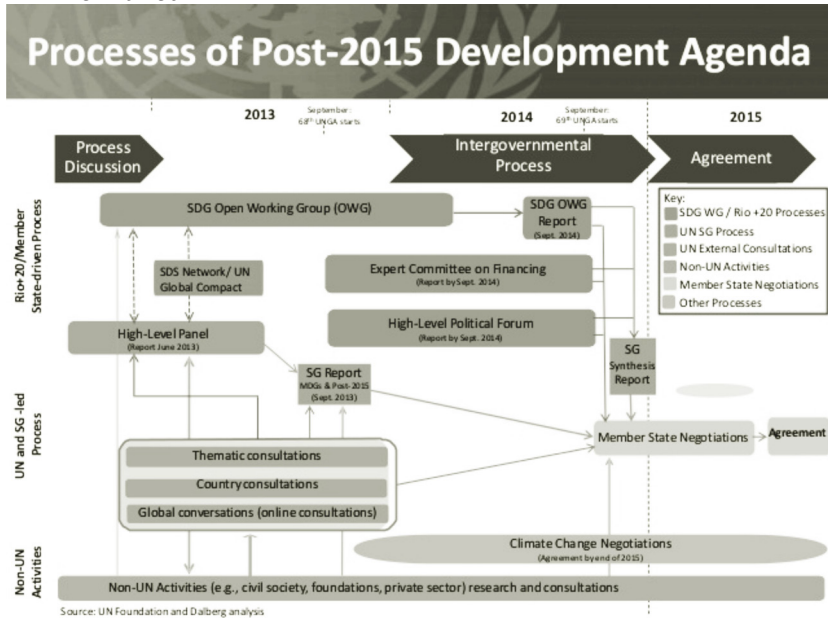
Mekanisme utama untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam OWG SDGs adalah melalui *Major Group System* yang mewakili sembilan kelompok, yaitu: perempuan, anak dan pemuda, masyarakat adat, bisnis dan industri, serikat pekerja, otoritas lokal, organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*), ilmuwan, dan petani. Tujuannya adalah untuk mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan global atau apa yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals/SDGs* untuk kemudian disetujui dalam Sidang Umum PBB.

Kedua, Jalur *United Nations Secretary General Led*, yaitu proses yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB). Proses ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan konsultasi di tingkat nasional, regional, dan global. Jalur ini sering disebut sebagai jalur *Post MDGs*. Dimulai sejak *High Level Plenary (HLP) Meeting of the General Assembly on the MDGs* pada tahun 2010. Selama *HLP Meeting* tersebut selain menyerukan percepatan perkembangan MDGs, para pemerintah negara peserta juga menginisiasi langkah langkah lanjutan menuju Agenda Pembangunan Pasca- 2015. Beberapa proses yang dilakukan dalam jalur ini yaitu:

- Dibentuknya *UN System Task Team*;
- Konsultasi Tematik, Nasional, dan Global. Proses ini dipimpin oleh *UN Development Group* (UNDG) untuk melakukan konsultasi terhadap 11 tema dan konsultasi di 88 negara, serta membuat survei global secara *online*;
- *High Level Panel (HLP) of Eminent Persons*; untuk memberikan masukan terkait penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono¹⁰ ditunjuk menjadi salah *one co chair*, bersama dengan Presiden Liberia Mrs. Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron; dan

¹⁰ Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014.

- Laporan Sekretaris Jenderal PBB. Proses ini mengeluarkan laporan rekomendasi dari Sekjen PBB untuk Agenda pembangunan Pasca-2015. Terdapat dua laporan yang sudah dirilis, yaitu: *“a Life of Dignity for All”* dan *“The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting The Planet”*.



Sumber: UN Foundation and Dalberg Analysis.

Gambar 1.

Proses Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015

HLP of Eminent Persons pada 30 Mei 2013 mengeluarkan laporan dengan judul: *“a New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”*. Di dalamnya, HLP menyerukan agar Agenda Pembangunan Pasca-2015 disusun berdasarkan lima prinsip pergeseran yang transformatif (*transformative shift*) berikut:

- Leave No One Behind.** Setelah tahun 2015, harus ada pergeseran prinsip dari “mengurangi” menjadi “mengakhiri” kemiskinan ekstrim dalam berbagai bentuk. Harus dapat dipastikan tidak ada seorang pun, baik karena etnis, gender, geografi, disabilitas, ras, atau status lainnya terpinggirkan dari memperoleh kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

- b) ***Put Sustainable Development at the Core.*** *Sustainable development* harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Negara-negara di dunia harus segera bertindak untuk memperlambat kecepatan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, menimbulkan ancaman terhadap kemanusiaan (*unprecedented threats*), dan belum pernah terjadi sebelumnya.
- c) ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth.*** Transformasi ekonomi dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi, dan bisnis potensial. Diversifikasi ekonomi yang lebih banyak dan kesempatan yang semakin terbuka akan mendorong terjadinya inklusi sosial dan mengembangkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
- d) ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All.*** Kebebasan dari konflik dan kekerasan merupakan hak manusia yang fundamental dan fondasi esensial untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada saat yang sama, masyarakat dari seluruh dunia mengharapkan pemerintah mereka untuk jujur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Agenda Pembangunan Pasca-2015 merupakan perubahan yang fundamental, untuk mengakui perdamaian dan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai elemen inti dari kesejahteraan, bukan sebagai pilihan ekstra; dan
- e) ***Forge a New Global Partnership.*** Semangat solidaritas, kerja sama, dan akuntabilitas mutual harus menjadi penyokong Agenda Pembangunan Pasca-2015. Kerja sama baru ini didasarkan pada pemahaman umum mengenai kemanusiaan; dan dikembangkan berdasarkan respek dan keuntungan mutual. Pusat perhatian difokuskan pada manusia, termasuk mereka yang terkena dampak kemiskinan dan eksklusi, perempuan, pemuda, lansia, orang dengan disabilitas, dan masyarakat pribumi/adat. Kerja sama ini juga harus melibatkan CSO, institusi multilateral, pemerintah lokal dan nasional, komunitas akademi dan sains, dunia usaha, dan filantropis perorangan.

Kedua jalur tersebut (*Member State Led* dan *United Nations Secretary General Led*) kemudian digabungkan untuk menuju proses

intergovernmental negotiations (perundingan intergovernmental) yang dimulai sejak Januari 2015. Sebagai akhir dari proses ini, telah dilakukan *intergovernmental negotiation* terhadap *Outcome Document* pada tanggal 22–25 Juni 2015, dilanjutkan pada tanggal 20–24 Juli 2015 dan 27–31 Juli 2015. Sebagai hasil dari proses tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2015 dikeluarkan dokumen final untuk diadopsi oleh negara-negara di dunia, yaitu: *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.¹¹ Dokumen ini telah disahkan dan diadopsi dalam 69th UN *General Assembly* pada tanggal 25–27 September 2015 di New York. Dalam dokumen final itu disebutkan 17 butir *Sustainable Development Goals* sebagai berikut:



Sumber: www.sustainabledevelopment.un.org, 2015.

Gambar 2.
Sustainable Development Goals (SDGs)

- *Goal 1. End poverty in all its forms everywhere* (mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat);
- *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture* (mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, peningkatan nutrisi, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan);

¹¹ “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, 2015. Dokumen final dalam proses penyusunan SDGs ini merupakan agenda aksi bagi masyarakat, planet dan kesejahteraan. Dikeluarkan oleh UN pada 1 Agustus 2015, <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.

- *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages* (memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh orang pada semua usia);
- *Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all* (memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan layak, serta mendorong kesempatan untuk pembelajaran seumur hidup untuk semua);
- *Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls* (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan);
- *Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all* (memastikan ketersediaan dan keberlanjutan manajemen air dan sanitasi untuk semua);
- *Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all* (memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua);
- *Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all* (mendorong secara terus-menerus pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh waktu dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua);
- *Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation* (membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong industri yang inklusif dan berkelanjutan, dan mengembangkan inovasi);
- *Goal 10. Reduce inequality within and among countries* (mengurangi ketidaksetaraan di antara negara-negara di dunia);
- *Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable* (membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, kokoh, dan berkelanjutan);
- *Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns* (memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan);
- *Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts* (mengambil langkah mendesak untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya);
- *Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development* (melindungi dan

- melestarikan penggunaan samudera, lautan, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan);
- *Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt reverse land degradation and halt biodiversity loss* (melindungi, memulihkan, dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan ekosistem terestrial/daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas desertifikasi, dan menghentikan degradasi cadangan tanah, dan menghentikan kehilangan biodiversitas/keanekaragaman hayati);
 - *Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels* (mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan; menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua; dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif, di semua level); dan
 - *Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development* (memperkuat makna dari implementasi dan merevitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan).

III. Kesetaraan Gender dalam Sustainable Development/SDGs

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender, termasuk di dalamnya melakukan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak perempuan, dapat menjadi katalisator dalam pencapaian tujuan pembangunan global lainnya. Sebagai contoh, sebagaimana yang terjadi pada pencapaian MDGs, hampir seluruh butir MDGs sangat terkait dengan kesetaraan gender. Butir ke-5 MDGs yaitu meningkatkan kesehatan ibu, salah satu indikatornya adalah menurunkan AKI pada saat melahirkan. Pemenuhan indikator ini akan dapat tercapai apabila hak kesehatan reproduksi perempuan/ibu hamil terpenuhi. Secara kasat mata indikator ini juga terkait dengan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi; yaitu: agar mengetahui kebutuhan nutrisi yang diperlukan selama kehamilan, pentingnya pemeriksaan berkala, dan melahirkan yang aman. Bahkan terkait pula dengan ada atau tidaknya hak perempuan dalam pengambilan keputusan,

untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan atas tubuhnya, seperti mengatur jarak kehamilan, memilih alat kontrasepsi yang cocok dengan dirinya, dan memilih untuk melahirkan di bidan yang berpengalaman.

Kesetaraan gender bukan hanya tujuan yang berdiri sendiri, namun terkait dengan berbagai tujuan dalam agenda pembangunan global. Berbagai fakta menunjukkan, memberdayakan perempuan secara tidak langsung juga akan memberdayakan kemanusiaan (*empowering women, empowers humanity*). Mencapai kesetaraan gender merupakan hal yang krusial dalam *sustainable development*. Dokumen hasil *United Nations Conference on Environment and Development* atau *Earth Summit* Tahun 1992 meletakkan *global framework* untuk mengatasi tantangan yang dihadapi komunitas global dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan.

Prinsip ke-20 *Rio Declaration (on Environment and Development)* menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh perempuan merupakan hal yang sangat esensial untuk mencapai *sustainable development*.¹² Sementara itu, Bab/*chapter* ke-24 Agenda 21 merekomendasikan kepada pemerintah nasional untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi tantangan atau hambatan konstitusional, legal, administratif, budaya, perilaku, sosial, dan ekonomi, yang dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan berkelanjutan dan kehidupan publik.¹³

Pernyataan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam *sustainable development* juga terdapat pada dokumen hasil *Fourth World Conference on Women* di Beijing pada September 1995, yang dikenal dengan *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA).

¹² *Rio Declaration* adalah dokumen hasil *United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992. Berisikan 27 prinsip dasar yang menekankan keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Dokumen dapat dilihat pada <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>, diakses tanggal 20 Agustus 2015.

¹³ Agenda 21, Dokumen hasil *United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, dokumen dapat diakses pada <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>.

Ditegaskan bahwa manusia adalah pusat perhatian dari *sustainable development*; dan perempuan memiliki peran penting dalam membangun keberlanjutan tersebut, yaitu menyuarakan tentang pola konsumsi dan produksi, serta pengelolaan sumber daya alam. Pengurangan kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial membutuhkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan kesempatan yang setara, serta partisipasi sepenuhnya dari perempuan maupun laki laki sebagai agen dan penerima manfaat *sustainable development*.¹⁴

BPFA ini merupakan titik awal dimensi baru dalam diskursus pembangunan, dengan adanya pergeseran dari pendekatan spesifik perempuan (*Women in Development/WID*) menjadi fokus pada relasi gender (*Gender and Development/GAD*). Fokus pembangunan tidak hanya melihat pada permasalahan “perempuan”, melainkan dilakukan dengan mengidentifikasi pengarusutamaan gender, hak asasi manusia, dan pembangunan *partnership* antara perempuan dan laki laki sebagai strategi dasar dalam mencapai kesetaraan gender.

Dalam *The Future We Want*, dokumen hasil *United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)*, di Rio de Janeiro pada 20–22 Juni 2012 diakui bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting bagi ketiga dimensi *sustainable development* dan masa depan dunia. Di dalamnya

¹⁴ Beijing Declaration Platform for Action, merupakan hasil dari *Fourth World Conference on Women*, 4–15 September 1995, di Beijing. Dalam deklarasi disebutkan dua belas kritikal area yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Adapun ke-12 area kritis dalam BPfA, yaitu: 1) perempuan dan kemiskinan; 2) pendidikan dan pelatihan untuk perempuan; 3) perempuan dan kesehatan; 4) kekerasan terhadap perempuan; 5) perempuan dan konflik senjata; 6) perempuan dan ekonomi; 7) perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; 9) hak hak asasi perempuan; 10) perempuan dan media massa; 11) perempuan dan lingkungan; dan 12) anak anak perempuan. Sampai saat ini, dokumen penting BPFA masih terus berlanjut menjadi kerangka aksi bagi perjuangan global dalam menghadapi permasalahan dan hambatan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Dokumen dapat dibaca pada <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>, diakses tanggal 17 Agustus 2015.

ditekankan bahwa *sustainable development* harus inklusif dan *people centered*, serta dapat memberikan manfaat dan melibatkan seluruh masyarakat. Deklarasi ini seakan menguatkan kembali komitmen bangsa bangsa di dunia untuk memastikan hak, akses, dan kesempatan yang setara bagi perempuan berpartisipasi dalam ekonomi, masyarakat, dan pengambilan keputusan politik.

Laporan UN *Task Team* kepada Sekjen PBB “*Realizing the Future We Want for All*” menekankan kepentingan kritical dari kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia dan inti dari tujuan pembangunan, dan menekankan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan menghambat kemajuan dalam seluruh bidang pembangunan. Disebutkan dalam laporan tersebut: “pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta perlindungan hak mereka harus menjadi pusat bagian dari agenda pembangunan pasca-2015.”¹⁵

Meski isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam setiap dimensi *sustainable development*, namun tidak cukup hanya itu saja. Merupakan hal yang imperatif untuk melakukan pendekatan yang terintegrasi. Diperlukan adanya perubahan menjadi model *sustainable development* di mana dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungannya melibatkan perempuan sebagai penerima manfaat, pemimpin, dan kontributor dalam pertumbuhan inklusif, layak secara sosial, dan adil; serta dapat mengelola sumber daya dan lingkungan secara efektif. Berikut ini gambaran mengenai pendekatan terintegrasi (*integrated approach*) yang dapat dilakukan dalam setiap dimensi *sustainable development*:¹⁶

Dimensi Ekonomi: pertumbuhan inklusif adalah elemen kritical dalam memastikan hasil pembangunan terdistribusikan secara adil. Ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, mereka akan berada pada posisi yang lebih baik sebagai penggerak pembangunan, serta dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* dan inklusif. Bukti bukti menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya menguntungkan bagi perempuan, tetapi juga

¹⁵ “Realizing the Future We Want For All: Report to the Secretary General. 2012”. UN Task Team, http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

¹⁶ *The Future Women Want: a Vision of Sustainable Development for All*. 2012. UN Women, United States, hlm. 9.

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah selanjutnya dibutuhkan untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan dan strategi untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, infrastruktur ekonomi dan keuangan, serta untuk memberikan akses yang setara kepada perempuan dan laki laki terhadap aset dan sumber daya produktif (misalnya: tanah, properti, dan sumber keuangan), pekerjaan yang layak dan pelayanan dasar (misalnya: energi dan air).

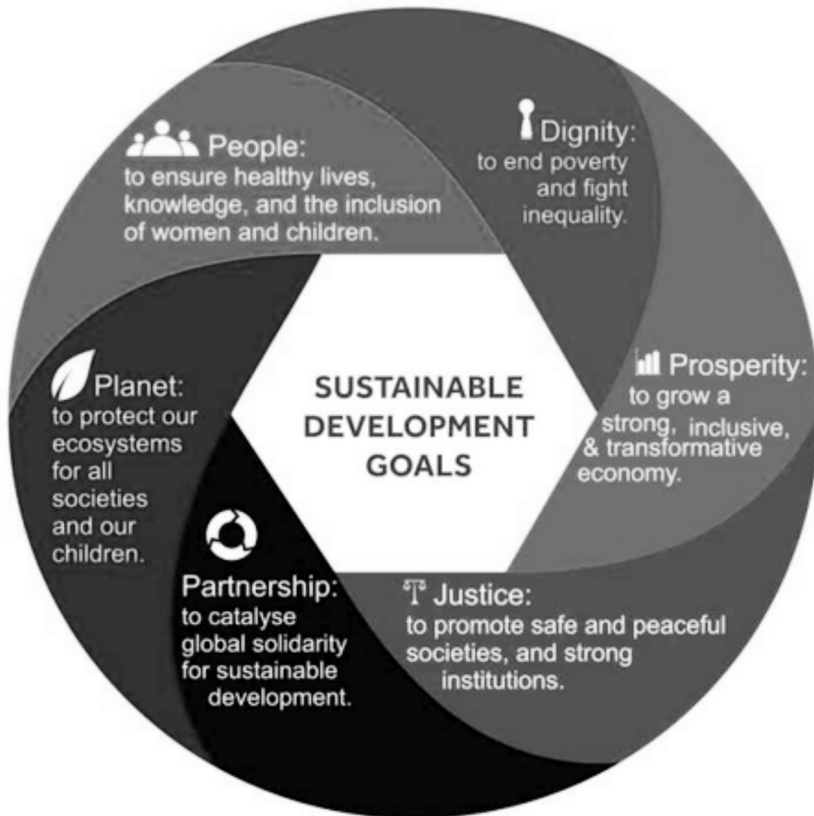
Dimensi Sosial: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan aspek fundamental dalam keadilan sosial. Normal sosial, stereotip gender, akses yang tidak merata dan terbatas terhadap sumber daya, layanan kesehatan, dan pendidikan, membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam setiap aspek kehidupan. Kebijakan sosial yang mencakup prinsip prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan akan berkontribusi dalam membentuk lingkungan agar lebih distributif dan memberikan keuntungan untuk kelompok perempuan dan laki laki yang berbeda beda, dan secara konsekuen mempercepat pencapaian *sustainable development*.

Dimensi Lingkungan: dalam dimensi ini, perempuan sering kali berperan sebagai produsen pertanian, pekerja, dan pengelola sumber daya; dan dapat berkontribusi antara lain, untuk: a) memengaruhi produksi dan konsumsi berkelanjutan; b) menjaga lingkungan alam dan biodiversitas; c) melestarikan pengetahuan tradisional; dan d) mengalokasikan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan di dalam rumah tangga dan komunitas. Bagi perempuan yang hidup dalam kemiskinan, mereka harus mampu mengelola dengan baik pemanfaatan sumber daya yang langka seperti air dan energi. Sebagai petani perempuan, kadangkala mereka harus membuat keputusan di bawah kondisi penuh keterbatasan yang sering kali memerlukan tindakan yang mengabaikan prinsip *sustainable development*.

Kondisi ini akan menjadi permasalahan ketika dikonfrontasikan dengan potensi kerusakan lingkungan, sehingga akan memengaruhi pola konsumsi mereka dan manajemen sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas. Oleh karenanya, mempersiapkan perempuan untuk memiliki kesempatan, sumber daya, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait

lingkungan akan meningkatkan kehidupan sosial dan kesejahteraan mereka dan memberikan keuntungan bagi seluruh komunitas.

Selanjutnya, dalam *The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet Synthesis Report of the Secretary General on the Post 2015 Agenda* yang dikeluarkan pada Desember 2014, disebutkan enam elemen esensial yang seharusnya dimasukkan dalam SDGs. Keenam elemen tersebut akan membantu mbingkai dan memperkuat agenda *sustainable development* yang universal, terintegrasi, dan transformatif. Adanya elemen ini akan memastikan ambisi yang dinyatakan oleh negara-negara peserta (*member states*) dalam hasil dari OWG dapat dikomunikasikan dan disampaikan pada tingkat negara masing-masing. Keenam elemen tersebut, yaitu:



Sumber: United Nations, 2014.

Gambar 3. Enam Elemen Esensial dalam SDGs

- 1) *Dignity: to end poverty and fight inequalities* (Harkat/Martabat, untuk mengakhiri kemiskinan dan melawan ketidakadilan);
- 2) *People: to ensure healthy lives, knowledge, and the inclusion of women and Children* (Manusia, untuk memastikan kehidupan yang sehat, dan menyertakan perempuan dan anak anak);
- 3) *Prosperity: to grow a strong, inclusive, and transformative economy* (Kesejahteraan, untuk menumbuhkan ekonomi yang kuat, inklusif, dan transformatif);
- 4) *Planet: to protect our ecosystems for all societies and our children* (Planet: untuk melindungi ekosistem demi seluruh masyarakat dan anak anak kita);
- 5) *Justice: to promote safe and peaceful societies, and strong institutions* (Keadilan, untuk mendorong masyarakat yang aman dan damai, dan institusi yang kuat); dan
- 6) *Partnership: to catalyse global solidarity for sustainable development* (Kerja sama: untuk mengkatalisasikan solidaritas global untuk pembangunan berkelanjutan).

Dalam keenam elemen tersebut, disampaikan pentingnya melibatkan perempuan dalam *sustainable development*. Berangkat dari kesadaran bahwa selama ini permasalahan perempuan dan anak-anak masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan dalam MDGs. Perempuan, bersama-sama dengan dan anak-anak dan pemuda harus dipastikan memiliki akses sepenuhnya terhadap layanan kesehatan. Melalui *sustainable development* harus dipastikan *zero tolerance* adanya kekerasan terhadap perempuan atau eksploitasi perempuan dan anak perempuan. Mereka harus memiliki akses yang setara kepada layanan jasa keuangan, hak untuk memiliki tanah, dan aset lainnya.

Agenda Pembangunan Pasca-2015 ini sudah semestinya ditujukan untuk menyediakan layanan kesehatan universal, yang mudah akses dan terjangkau; mengakhiri AKI, kematian anak dan bayi, dan malnutrisi; memastikan ketersediaan obat-obatan dasar; memenuhi hak kesehatan reproduksi perempuan; mengurangi malaria dan membangun masa depan bebas AIDS dan tuberkulosis; mengurangi beban penyakit lainnya; mendorong perilaku hidup sehat, termasuk yang berkaitan dengan air, sanitasi, dan higienitas.

IV. *Mainstreaming* Perspektif Gender dalam SDGs

Uraian pada bab sebelumnya telah menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai tujuan transformatif yang terkait dengan setiap dimensi *sustainable development*. Selain sebagai *a stand alone goal*, atau suatu tujuan yang berdiri sendiri/sebagai target spesifik, tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga harus diintegrasikan atau diarusutamakan (*mainstreaming*) dalam tujuan lainnya. Hal ini untuk memastikan pencapaian yang berarti dari tujuan *sustainable development* di bidang lainnya, dengan mengatasi permasalahan diskriminasi berbasis gender pada area spesifik tersebut.

UN Women mengajukan usulan tiga target prioritas yang harus termasuk dalam *framework* tujuan pembangunan pasca-2015, untuk mengatasi kesetaraan gender, hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Inklusi/menyertakan seluruh isu kesetaraan gender dan perempuan dalam tujuan transformatif yang berdiri sendiri (*transformative stand alone goal*), akan mampu mengatasi penyebab struktural terjadinya ketidaksetaraan gender yang menghambat pemberdayaan perempuan dan realisasi hak mereka sepenuhnya. Target dan indikator yang diusulkan bertujuan untuk memonitor perubahan melalui kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap memberikan perhatian pada berbagai variasi faktor penyebab tersubordinasinya perempuan, seperti: kelas, ras, etnis, lokasi geografis, disabilitas, seksualitas, dan faktor penyebab diskriminasi dan eksklusi lainnya.

Adapun ketiga area target UN Women yang menunjukkan elemen inti (*core element*) dari kesetaraan gender, hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a) Bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (*freedom from violence against women and girls*). Tindakan konkret yang diperlukan untuk mengurangi kelemahan, ketakutan dan/atau pengalaman akan kekerasan harus menjadi pusat perhatian dari setiap *framework* pembangunan di masa depan. Kekerasan dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara fisik maupun psikologis kepada perempuan dan anak perempuan, menjadi pelanggaran hak asasi mereka, membatasi kemampuan untuk memenuhi potensi mereka, dan kemampuan memperoleh pendapatan.

- b) Kesetaraan gender dalam kapabilitas dan sumber daya (*gender equality in capabilities and resources*). Diperlukan pendistribusian kapabilitas, dengan urgensi yang diperbaharui, demi untuk membangun ketahanan ekonomi dan sosial perempuan. Kapabilitas perempuan itu mencakup, antara lain: kesehatan seksual dan reproduksi, hak-hak reproduksi bagi perempuan dan anak perempuan, sumber daya dan peluang, misalnya: seperti aset produktif (termasuk tanah), pekerjaan yang layak, dan upah yang setara.
- c) Kesetaraan gender dalam kekuasaan pengambilan keputusan di institusi publik dan privat (*Gender equality in decision making power in public and private institutions*). Rendahnya jumlah perempuan dalam institusi pengambilan keputusan, dari parlemen tingkat nasional sampai tingkat daerah harus ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga demokratis dan suara mereka didengar dalam forum publik dan privat. Kurangnya suara dalam pengambilan keputusan juga ditemukan di lembaga lembaga kunci yang memengaruhi opini publik dan mempromosikan akuntabilitas, seperti media dan masyarakat sipil serta di lembaga privat, misalnya: dalam manajemen dan tata kelola perusahaan.

Ketiga *core element* tersebut menjadi prinsip dasar dalam finalisasi tujuan kesetaraan gender. Setelah berbagai proses panjang, pada akhirnya dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, disebutkan tujuan kesetaraan gender yang berdiri sendiri dalam *Goal 5 SDGs*.

V. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan dan Anak Perempuan

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana pun;
- 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk *trafficking*, kekerasan seksual dan eksploitasi bentuk lainnya;
- 5.3 Menghapuskan segala praktik yang berbahaya/berdampak buruk, seperti: pernikahan dini/anak-anak secara paksa dan sunat perempuan;

- 5.4 Mengakui dan menghargai pelayanan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar, melalui penyediaan kebijakan layanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial, dan peningkatan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga, yang sesuai secara nasional;
- 5.5 Memastikan partisipasi perempuan yang sepenuhnya dan efektif, serta kesempatan yang setara untuk menjadi pemimpin di semua tingkatan pengambilan keputusan, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan ruang publik lainnya;
- 5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduktif sebagaimana yang disepakati sesuai dengan program aksi *International Conference on Population and Development (ICPD)* dan *Beijing Platform for Action*, termasuk dokumen hasil konferensi tinjauannya.
- 5.a. Melakukan perubahan untuk memberikan hak kesetaraan bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, warisan, dan sumber daya alam; sesuai dengan hukum nasional;
- 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, terutama teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan; dan
- 5.c Mengadopsi dan memperkuat penyuaaran kebijakan dan penegakan legislasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Tujuan dan target yang dirumuskan dalam *Goal 5 SDGs* tersebut hanya menggambarkan prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, negara-negara yang mengadopsi mesti mengimplementasikan dalam program dan kegiatan yang tepat, sehingga dapat mencapai target. Mosser¹⁷ berpendapat bahwa permasalahan penting dalam implementasi perencanaan gender adalah pada saat merumuskan kebijakan gender menjadi lebih praktis (program dan kegiatan). Proses ini harus didukung dengan analisis gender, data terpilah, dan dilakukan oleh pakar gender.

¹⁷ Caroline. O. N. Moser. *Gender Planning and Development: Theory, Practice, & Training*. London dan New York, Routledge: 1995.

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

- 5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
- 5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
- 5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation
- 5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
- 5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic and public life
- 5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
- 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
- 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
- 5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

Selain itu, diperlukan pula pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan atau mengarusutamakan (*mainstreaming*) perspektif gender dalam tujuan SDGs lainnya. Secara umum tujuan tujuan lainnya memang tidak terlihat seperti ada kaitannya dengan kesetaraan gender. Meski demikian, dalam setiap bidang pembangunan selalu ada keterkaitan dengan isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan hak perempuan, terutama yang terkait dengan partisipasi perempuan. Hasil pembangunan memiliki perbedaan dampak bagi perempuan dan laki laki, dan akses terhadap hasil pembangunan. *Goal 5* menjadi prinsip dan indikator yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan lainnya. Apabila implementasi berbagai program untuk mencapai target seluruh tujuan SDGs dilakukan dengan perspektif gender, maka selain tercapainya tujuan SDGs berbagai bidang, tujuan kesetaraan gender juga akan tercapai.

Berikut ini akan diuraikan contoh *mainstreaming* perspektif gender dalam beberapa tujuan SDGs lainnya:

- **Goal 6. Water and sanitation (air dan sanitasi)**

Air merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, dari minum dan mempersiapkan makanan, mandi, mencuci, irigasi tanaman, dan sumber air untuk ternak. Dalam berbagai komunitas masyarakat, air memegang peran meningkatkan perekonomian, terutama sebagai salah satu sumber energi hijau. Jalur air (*waterways*) juga masih menjadi sistem transportasi air terintegrasi di beberapa negara. Meski akses setara terhadap air minum yang aman dianggap sebagai hak asasi esensial bagi setiap orang, namun keterbatasan akses air menimbulkan dampak gender yang spesifik. Air merupakan pusat dari seluruh cakupan aktivitas domestik, yang dalam banyak kultur masih dilihat sebagai area pekerjaan perempuan: memasak, mengurus hewan peliharaan, irigasi pertanian, kebersihan rumah tangga, mengurus orang sakit, bersih bersih, mencuci, dan membuang sampah.¹⁸ Perempuan akan lebih membutuhkan banyak air untuk higienitas kesehatan reproduksinya, misalnya saat hamil dan menstruasi. Dalam berbagai komunitas, rata-rata mengambil air menjadi tugas perempuan. Perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia terpaksa berjalan sangat jauh untuk mengambil air dari sumbernya atau menuju akses sanitasi. Sering kali tugas ini berisiko dari sisi keamanan/keselamatan bila mereka tinggal di wilayah konflik, pasca-bencana, atau daerah tertinggal. Dari sisi kesehatan, berjalan kaki dengan membawa beban air yang berat selama berjam-jam dapat berdampak negatif pada kesehatan perempuan dan mengurangi waktu produktif mereka untuk melakukan pekerjaan lainnya. Selama ini, banyak proyek air dan sanitasi gagal karena minimnya keterlibatan komunitas lokal, terutama perempuan sebagai ujung tombak pengguna air bersih. Memastikan penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak membutuhkan tata kelola air partisipatoris, di

¹⁸ United Nations (UN) Water. 2005. "Water for Life Decade 2005 2015". Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian MDGs, Sidang Umum UN juga menetapkan Tahun 2005 2015 sebagai periode *International Decade for Action: "Water for Life"*. Dasawarsa ini dimulai pada tanggal 22 Maret 2005, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Air Sedunia (*World Water Day*). www.un.org/waterforlifedecade/pdf/waterforlifebklt_e.pdf.

mana suara perempuan diperlukan untuk memberikan informasi dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan fasilitas air dan sanitasi. Pembangunan fasilitas air dan sanitasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perempuan memerlukan fasilitas yang aman, bersih, dan memiliki privasi/tertutup. Upaya untuk meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi perlu difokuskan pada kualitas ketersediaan air, jarak menuju fasilitas tersebut, dan privasi untuk perempuan.

- **Goal 7. Energy (energi)**

Energi merupakan persyaratan dan katalisator (faktor percepatan) untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan kesetaraan gender. Meningkatkan layanan energi dapat mengurangi beban kerja domestik perempuan dan anak perempuan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas produktif lain. Mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan tungku bahan bakar tradisional yang tidak efektif juga akan menurunkan polusi udara dalam ruangan. Energi terbarukan dan bersih sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan lingkungan dan mitigasi *climate change*. Saat ini sebanyak 1,4 miliar orang memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai bentuk energi modern, sekitar 2,7 miliar orang di dunia masih menggunakan tungku (perapian terbuka) dan kompor tradisional untuk memasak dan menghangatkan udara.¹⁹ Di Indonesia, sebanyak 24 juta dari 60 juta rumah tangga masih menggunakan tungku tradisional berbahan bakar kayu/ranting pohon untuk memasak.²⁰ Menurut Dr. Kirk Smith, seorang profesor kesehatan lingkungan global dari Universitas California, Berkeley, memasak menggunakan tungku perapian terbuka sama saja dengan membakar 400 batang rokok secara bersamaan.²¹

¹⁹ UNEP. *Green Economy Report 2011*, pada Bab “Energi Terbarukan” (*Renewable Energy*). 2011. www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015.

²⁰ “Cleaner Cook Stoves for a Healthier Indonesia”. 3 November 2014. <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/03/cleaner-cook-stoves-for-a-healthier-indonesia>

²¹ Kirk Smith, Dr. *Clean Household Energy Can Save People’s Lives*. Maret 2014. Profesor Kirk Smith merupakan seorang pakar kesehatan lingkungan global dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat; telah melakukan penelitian dan pengukuran dampak polusi udara akibat tungku/perapian terbuka tradisional, sejak tahun 1970. Pada tahun 2012, sebanyak 1,7 juta kematian prematur terjadi di Asia Tenggara, akibat dari polusi udara dapur

Hal ini menyebabkan polusi udara di dalam rumah dan memengaruhi kesehatan perempuan dan anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan bahan bakar, seperti: kayu, kotoran ternak, dan sampah dari tanaman). Banyak komunitas di seluruh dunia telah berpindah dari sumber energi tradisional ke sumber energi bersih, seperti *solar* (tenaga matahari) dan tenaga angin. Perempuan mulai berperan aktif dan menjadi pemimpin dalam membentuk inisiatif energi yang kolaboratif dan berbasis komunitas. Peran serta perempuan ini harus lebih banyak ditingkatkan di berbagai komunitas masyarakat. Oleh karena itu, pasca-2015 dibutuhkan suatu paradigma pembangunan baru yang menempatkan manusia sebagai pusat dari akses energi, efisiensi, dan keberlanjutan. Akses terhadap energi berkelanjutan harus menjadi hak sosial ekonomi masyarakat. Dengan titik berat pada perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan energi paling banyak, yaitu kelompok rentan perempuan dan anak perempuan. Energi yang bersih, terjangkau, dan terbarukan hanya dapat diwujudkan dengan adanya kerja sama antara berbagai *stakeholders*, pemerintah, komunitas internasional, bersama sama dengan masyarakat sipil dan sektor swasta, dengan implementasi kebijakan yang lintas sektoral, pedesaan dan perkotaan.

- **Goal 11. Sustainable Cities (kota berkelanjutan)**

Menurut prakiraan, hingga tahun 2050 di seluruh dunia jumlah masyarakat yang tinggal di perkotaan akan lebih banyak daripada di pedesaan. Antara tahun 2009 dan 2050, populasi dunia diperkirakan akan meningkat sebanyak 2,3 miliar, dari 6,8 miliar menjadi 9,1 miliar. Populasi yang tinggal di area perkotaan, diproyeksikan bertambah sebanyak 2,9 miliar, dari 3,4 miliar pada 2009 menjadi 6,3 miliar pada 2050.²² Faktor pendorong utama terjadinya pergeseran ini adalah

rumah tangga. Menurutnya, bahkan sampai tahun 2014 ini masih belum banyak perubahan kondisi. Penjelasan ini diperoleh dari <http://www.who.int/features/2014/clean-household-energy/en/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2015.

²² United Nations (UN). *World Urbanization Prospects: The 2009 Revision*. United Nations Population Division. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAEahUKEwjZloOY6tLHAhVNH04KHbOVDnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ctchealth.org.cn%2Ffile%2F2011061610.pdf&ei=bAbkVdmwDc28uASzq7qgBw&usg=AFQjCNElSlnSjsiLp3IRkTi88eirehFKfQ>, New York: 2010, hlm. 1. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2015.

migrasi perkotaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah, dan ketersediaan sistem pelayanan publik lainnya. Meski demikian, urbanisasi menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan. Permasalahan sosial dan lingkungan banyak terjadi di perkotaan, misalnya: tuna wisma, kriminalitas, dan polusi. Kekerasan juga menjadi permasalahan yang sering terjadi di perkotaan yang memiliki permasalahan kompleks, baik di negara maju maupun negara berkembang. Perempuan dan anak perempuan menghadapi ancaman kekerasan seksual, pelecehan di jalanan, transportasi publik, dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Di samping itu, di perkotaan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga semakin meningkat dan memiliki permasalahan tersendiri. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan partisipasi politik perempuan untuk memobilisasi dukungan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Diperlukan pula pakar kesetaraan gender dalam perumusan perencanaan dan desain pembangunan perkotaan, termasuk yang terkait dengan infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar. Agar kepentingan perempuan dapat disuarakan dan masuk dalam perencanaan pembangunan perkotaan. Membangun dan menransformasikan suatu kota dengan *people centered* dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Selain ketiga contoh di atas, *mainstreaming* perspektif gender dalam SDGs juga dapat dilakukan melalui tujuan lainnya. Apabila dicermati, hampir seluruh bidang SDGs terkait dengan isu kesetaraan gender. Perempuan merupakan warga masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga seluruh bidang pembangunan akan membutuhkan partisipasi dari keduanya. Baik perempuan dan laki-laki, sama-sama berhak memperoleh akses terhadap sumber daya dan menikmati hasil pembangunan.

Tujuan mulia pencapaian kesetaraan gender hanya akan dapat terwujud apabila sejak masa perencanaan pembangunan di masing-masing negara telah mempertimbangkan gender di dalamnya. Kebijakan di tingkat nasional dan lokal harus lebih berperspektif gender dan mampu mengakomodasi kepentingan perempuan. *Mainstreaming* perspektif gender didukung dengan kerangka kerja analisis yang memadai, data

terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan penelitian berbasis gender, serta dukungan pakar gender dalam penyusunan kebijakan dan program.

VI. Penutup

Pada tanggal 25–27 September 2015, dalam *69th UN General Assembly* telah disahkan suatu kerangka pembangunan global yang baru, *Sustainable Development Goals* (SDGs). Negara-negara peserta akan segera mengadopsi dan mengimplementasikannya di tingkat nasional dan daerah. Konsep *sustainable development* ini dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi pasca-MDGs 2015. Salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui SDGs adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini masih dianggap sebagai *unfinished business* dari MDGs. *Goal 5* mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan merupakan katalisator yang dapat mempercepat pencapaian SDGs dalam berbagai bidang lainnya. Selama proses perumusan SDGs, para *stake holders* sangat meyakini bahwa selain sebagai *a stand alone goal* (tujuan yang berdiri sendiri), kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan tetap harus diintegrasikan atau *mainstreaming* melalui tujuan SDGs lainnya.

Implementasi bidang-bidang SDGs dengan berperspektif gender, selain akan mendorong pemenuhan target spesifik SDGs, tujuan kesetaraan gender pun akan tercapai. Tujuan yang berdiri sendiri dibutuhkan untuk mengarahkan perubahan lebih lanjut dan mendorong transformasi penyelesaian permasalahan ketidakadilan gender. Sementara itu, sinergitas antara tujuan kesetaraan gender dan tujuan lainnya akan mempercepat pemenuhan indikator yang telah ditetapkan sebagai ukuran dari masing-masing tujuan.

Segala bentuk kerangka kerja pembangunan global, termasuk SDGs, harus didukung dengan implementasi yang berperspektif gender, termasuk pembiayaan pembangunan, peningkatan *sharing* pengetahuan, *capacity building*, pengembangan dan transfer teknologi, serta pengumpulan dan pertukaran data. Perspektif gender harus menjadi pusat dari setiap area pembangunan, dan partisipasi perempuan sebagai kunci dari desain, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berkontribusi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, dan ketidaksetaraan akan dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Makalah

Moser, Caroline. O. N. *Gender Planning and Development: Theory, Practice, & Training*. London dan New York, Routledge: 1995.

Sachs, Jeffrey. D. *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals*, Lancet 2012, Volume 379, Juni 2012, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=1s2.0S0140673612606850main.pdf&_piikey=S0140673612606850&_cdi=271074&_orig=article&_zone=centerpane&_fmt=abst&_eid=1s2.0S0140673612606850&_user=12975512&md5=bc3c0176a904607405eba89298d67e76&ie=/excerpt.pdf.

Santono, Hamong dan Sugeng Bahagijo. *Pembangunan Global Baru: Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. INFID (International NGO Forum on Indonesian Development): Briefing Paper*, Jakarta: Januari 2015.

Dokumen Internasional

United Nations. *The Millennium Development Goals Report: 2015 (Summary)*. New York, United States of America: 2015.

United Nations (UN). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. 1 Agustus 2015, <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.

United Nations (UN). *Beijing Declaration Platform for Action*. Beijing, Cina: 1995, <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>, diakses tanggal 17 Agustus 2015.

- UN Task Team. *Realizing the Future We Want For All: Report to the Secretary General*. 2012, http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.
- UN Women. *The Future Women Want: a Vision of Sustainable Development for All*. United States of America: 2012, hal. 9.
- UNEP. *Green Economy Report 2011*. 2011. www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015.
- United Nations Conference on Environment and Development. *Rio Declaration*, Rio de Janeiro, Brazil: 1992. <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>, diakses tanggal 20 Agustus 2015.
- United Nations Conference on Environment and Development. *Agenda 21*. Rio de Janeiro, Brazil: 1992, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2015.
- UN Women. *A transformative Stand Alone Goal on Achieving Gender Equality, Women's Rights and Women's Empowerment: Imperative and Key Components*. 2013.
- UN Women. *The World Survey on the Role of Women in Development: Gender Equality and Sustainable Development*. 2014, hal. 12.

Berita Surat Kabar *Online* dan *Feature*

- Cleaner Cook Stoves for a Healthier Indonesia*. 3 November 2014. <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/03/cleaner-cook-stoves-for-a-healthier-indonesia>
- Pemerintah Nyerah Kejar Target Kemiskinan MDG*, <http://economy.okezone.com/read/2015/08/12/320/1194840/pemerintah-nyerah-kejar-target-kemiskinan-mdgs>, 12 Agustus 2015, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.
- Smith, Kirk. *Clean Household Energy Can Save People's Lives*. Maret 2014. <http://www.who.int/features/2014/cleanhousehold-energy/en/>

Tempo online. *Jokowi Didesak Datang ke Sidang Umum PBB Lanjutkan Misi Ini*, 9 Agustus 2015, [http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/09/078690254/jokowi didesak datang ke sidang umum pbb lanjutkan misi ini](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/09/078690254/jokowi%20didesak%20datang%20ke%20sidang%20umum%20pbb%20lanjutkan%20misi%20ini), diakses pada 18 Agustus 2015.

BAGIAN KEDUA:
DIMENSI EKONOMI

BAB VII

PERAN SEKTOR PERTANIAN

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Edmira Rivani

I. Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Kontribusi dominan sektor pertanian khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Secara garis besar kebijakan pembangunan pertanian diprioritaskan kepada beberapa program kerja yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran dari pembangunan pertanian.

Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dimulai sejak munculnya kekhawatiran R. Malthus atas ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk tahun 1798. Kemudian pada tahun 1972, Meadow, dkk menerbitkan buku yang berjudul *The Limit to Growth*. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam sehingga penyediaan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam tidak akan dapat dilakukan secara terus-menerus.¹ Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan dimulai akhir tahun 1980 an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti

¹ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 23.

telah menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) untuk sektor pertanian. Keunggulan ini merupakan modal fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong dan dikelola dengan baik. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif akan memberikan perkembangan bukan hanya pada sektor itu saja melainkan sektor lain yang saling terkait.²

Sektor pertanian Indonesia tentu memiliki komoditi penting atau unggulan untuk dikembangkan sebagai pendorong utama (*prime mover*) bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional. Pengembangan komoditi unggulan di sektor pertanian pada suatu daerah merupakan suatu strategi regional untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) pada sub sektor lainnya. Bukti empiris menunjukkan ketika terjadi krisis ekonomi 1997, sektor pertanian mampu bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian secara keseluruhan. Data BPS 1998 menunjukkan, secara nasional sektor pertanian tumbuh 0,22%, saat kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga 13,68%. Bukti empiris itu menunjukkan ketika sektor konstruksi, industri, dan manufaktur mengalami kontraksi hebat, sektor pertanian dengan komoditi unggulannya mampu tumbuh positif dan tatkala sektor-sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja, justru penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat. Demikian juga dengan ekspor produk pertanian mengalami peningkatan.³ Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan melihat peran sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan.

II. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan⁴

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup peran

² M. Kuncoro, Strategi, Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif ?, Erlangga. Jakarta, 2005, hlm.42.

³ S. Friyatno, Analisis Penerapan Intensifikasi Usahatani Padi Sawah Pasca Krisis Ekonomi (Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat). Makalah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI, 2001.

⁴ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2005, hlm. 305 – 309.

dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut tergambar dalam fakta empiris yang tercermin dari sumbangan sektor pertanian pada PDB dan banyaknya masyarakat yang bergantung dan bergerak di sektor pertanian. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional.

1. Peran dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB)

Pada tahun 1996 PDB sektor pertanian, termasuk pula kehutanan dan perikanan, adalah sebesar Rp63,8 triliun. Nilai ini terus meningkat menjadi Rp66,4 triliun pada tahun 2000. Besarnya PDB pertanian tersebut memberikan kontribusi sekitar 17% terhadap PDB nasional. Bila dibandingkan dengan sektor lain, maka kontribusi PDB pertanian menduduki urutan kedua setelah sektor industri manufaktur. Di samping kontribusi langsung terhadap PDB yang cukup signifikan, sektor pertanian juga telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga stabilitas ekonomi pada masa krisis perekonomian nasional. Ketangguhan sektor ini ditunjukkan oleh kemampuannya untuk tetap tumbuh secara positif pada masa krisis 1998 sementara perekonomian nasional secara agregat mengalami kontraksi yang sangat hebat, yaitu sebesar 13,7%.

2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja

Sektor pertanian berikut sistem agribisnisnya sangat dominan perannya dalam penyerapan tenaga kerja, yang mampu menyerap 45,0% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, atau menempati urutan pertama dalam penyerapan tenaga kerja. Apalagi jika kita menyimak struktur ketenagakerjaan pedesaan, maka peran strategis sektor pertanian bahkan lebih tidak terbantahkan. Dalam tahun 1997 struktur kesempatan kerja pedesaan secara agregat menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang 58,8% dari kesempatan kerja pedesaan, yang secara absolut besarnya 57,5 juta orang. Peran sektor pertanian di luar Jawa juga lebih besar, yaitu sebesar 66,9% dibandingkan dengan di Jawa yang besarnya 50,65%. Sebaliknya, sektor non-pertanian di Jawa hanya menyumbang 33,1% dan di luar Jawa menyumbang 49,4% kesempatan kerja, yang pada umumnya

berupa jasa perdagangan, jasa kemasyarakatan, bangunan, dan jasa pengangkutan. Keadaan ini menunjukkan masih tetap dominannya peran sektor pertanian dalam perekonomian rumah tangga pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kegiatan di luar sektor pertanian masih relatif kecil dan sedang bertumbuh serta tidak bisa dilepaskan keterkaitannya kegiatan di pertanian. Selanjutnya, selama masa kontraksi ekonomi nasional akibat krisis pada tahun 1998, di mana penyerapan tenaga kerja nasional menurun sebesar 2,13% atau 6,4 juta orang di semua sektor ekonomi (kecuali listrik), maka sektor agribisnis justru mampu meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,4 juta orang. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis masih merupakan sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis dan paling berjasa dalam menampung pengangguran sebagai akibat krisis ekonomi.

3. Peran sebagai penghasil devisa

Kontribusi agribisnis dalam total nilai ekspor Indonesia pada tahun 1990 mencapai 43%, dan meningkat menjadi sekitar 49% pada tahun 1995. Sementara itu impor Indonesia, pangsa impor sektor agribisnis relatif kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 1990 pangsa impor sektor agribisnis hanya sekitar 24% dan menurun menjadi sekitar 16% pada tahun 1995. Selanjutnya, selama masa krisis, ekspor produk pertanian juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 1998 ekspor pertanian tahun 1998 naik sebesar 26,5%. Peningkatan ekspor pertanian selama masa krisis (1991–1998) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelum krisis yakni hanya sebesar 4,5% per tahun (1982–1997). Sebaliknya ekspor produk manufaktur turun sebesar 4,2% selama tahun 1997–1998. Hampir semua ekspor produk industri berbahan baku impor turun kecuali semen. Namun ekspor produk agroindustri yang berbasis pada sumber daya lokal seperti minyak atsiri, asam lemak, barang anyaman (kecuali minyak sawit) mengalami peningkatan. Meski sebagian dari kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai mata uang dolar, namun dengan rendah atau hampir tidak adanya komponen impor di sektor pertanian, maka kenaikan tersebut masih merupakan suatu bukti empiris pembangunan ekonomi dengan menggunakan sektor pertanian sebagai penggerak utama akan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Peran sektor pertanian lain yang juga sangat penting adalah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, sesuai tujuan pokok dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Cara yang efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah. Pada saat ini sumber daya ekonomi yang dimiliki dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumber daya manusia di bidang agribisnis, dan teknologi di bidang agribisnis. Selain itu, sektor agribisnis adalah penyumbang terbesar dalam produk domestik regional bruto (PDRB) dan ekspor daerah. Dalam penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha di setiap daerah sebagian besar juga disumbang oleh sektor agribisnis. Oleh karena itu, pembangunan agribisnis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah merupakan pilihan yang paling rasional. Dengan kata lain, pembangunan agribisnis perlu dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah.

4. Peranan dalam pelestarian lingkungan hidup

Dewasa ini, keprihatinan akan kemerosotan mutu lingkungan hidup bukan lagi sebatas isu lokal suatu negara melainkan sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Kemerosotan mutu lingkungan hidup saat ini telah sampai pada tingkat yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia tidak hanya di sekitarnya namun juga seluruh manusia di muka bumi. Pembangunan agribisnis mempunyai potensi untuk dapat mencegah dan memperbaiki kemerosotan mutu lingkungan hidup melalui beberapa cara. **Pertama**, pembangunan agribisnis akan membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah (ruang). Kesempatan ekonomi tersebut akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya, sehingga tekanan penduduk pada suatu ruang tertentu dapat dikurangi. **Kedua**, pembangunan agribisnis yang pada dasarnya mendayagunakan keragaman hayati, dapat mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati. **Ketiga**, pembangunan agribisnis yang antara lain mendayagunakan pertumbuhan keragaman tumbuhan, pada dasarnya merupakan “perkebunan

karbon” yang efektif dalam mengurangi emisi gas karbon atmosfer yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. **Keempat**, pembangunan agribisnis akan menghasilkan produk yang bersifat *biodegradable* yang dapat terurai secara alamiah. Produk agribisnis yang *biodegradable* ini akan dapat mengurangi penggunaan produk petrokimia yang *non-biodegradable*. **Kelima**, pembangunan agribisnis yang bergerak dari *factor-driven* ke *capital driven* dan kemudian kepada *innovation-driven* dalam menghasilkan nilai tambah dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Meski ada sebagian orang yang berpendapat bahwa pemanfaatan hutan, pembukaan lahan perkebunan, dan penangkapan hasil laut justru berkompetisi dengan pelestarian lingkungan, namun kemajuan teknologi pertanian saat ini telah dapat menciptakan dan menerapkan berbagai jenis teknologi ramah lingkungan. Berbagai jenis teknologi sistem usaha tani ramah lingkungan telah tersedia dan siap untuk diterapkan di lapangan, yaitu: (a) Sistem usaha tani berwawasan konservasi tanah yang meliputi pembuatan teras, pengelolaan bahan organik, tanaman lorong (*alley cropping*), rehabilitasi lahan melalui penutup tanah di mana komoditas pertanian sebagai bagian dari subsistem; (b) Sistem pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah (*low input sustainable agriculture*), yaitu melalui efisiensi penggunaan pupuk yang mudah hilang (nitrogen) dan penggunaan pupuk hijau; serta (c) Wanatani (*agroforestry*), yaitu melalui pengendalian erosi, melestarikan keanekaragaman hayati dan mengkonservasi carbon (C)-organik, dan pengembalian unsur-unsur hara secara berimbang.

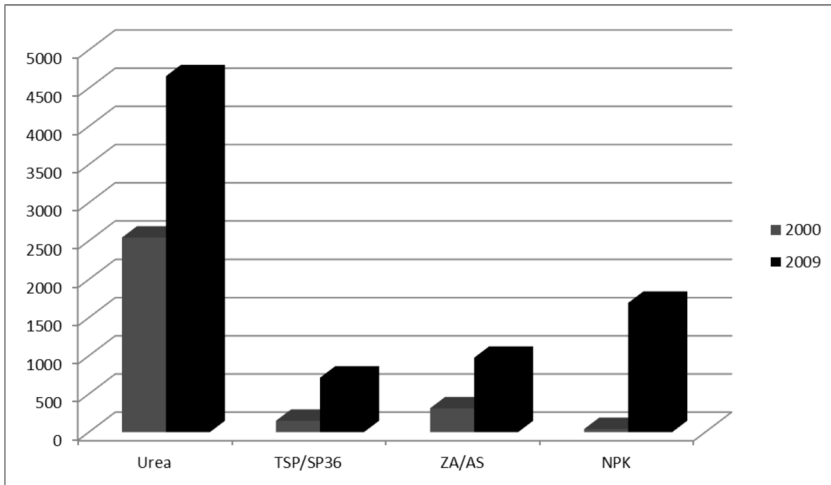
Mencermati berbagai manfaat penempatan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian merupakan suatu peluang yang sangat besar sekaligus beban atau *liabilities*. Dengan masih banyaknya masyarakat yang bernaung di bawah sektor pertanian, dengan tingkat pendidikan rata-rata dan produktivitas yang relatif rendah dan skala lahan yang terbatas serta tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding sektor lain, maka hal ini merupakan tantangan yang sangat besar. Selain itu, pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam saja akan mempunyai tingkat pengembangan yang sangat terbatas dan tidak dapat menciptakan *increment* sebesar yang dapat diberikan oleh sektor manufaktur

dan sektor jasa. Diversifikasi usaha dapat menstabilkan pendapatan dari sektor pertanian yang fluktuatif dan relatif dipengaruhi musim, namun tetap belum dapat menghasilkan lonjakan nilai tambah yang dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara. Pengembangan produk unggulan dan eksotik dapat meningkatkan diferensiasi produk, namun juga belum dapat diharapkan memberikan tambahan pendapatan yang secara nasional signifikan. Dengan kata lain, jika sektor pertanian masih bergerak di tingkat primer (*on-farm*) semata-mata maka akan sulit untuk dapat dijadikan *prime mover* pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanyaannya kemudian adalah, strategi apa yang diterapkan untuk dapat menciptakan lonjakan tambahan pendapatan ekonomi dengan tetap bertumpu pada sektor pertanian. Jawabannya adalah dengan tetap bertumpu pada sektor pertanian namun mengembangkan produk pertanian ke tingkat yang lebih tinggi pada *industrial ladder* yang dikenal sebagai agroindustri.

III. Permasalahan Utama Bidang Pertanian

Beberapa persoalan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah: **pertama**, stagnasi produk pertanian. Dalam dua puluh tahun terakhir ini terjadi stagnasi produksi di hampir semua sektor tanaman pangan. Peningkatan produksi tahunan rata-rata di atas 4% sebagaimana tahun 1970 hingga 1980an tidak pernah lagi tercapai. Produksi sebagian besar disumbangkan oleh perluasan areal atau peningkatan Indeks Pertanaman. Penggunaan pupuk sintetis meningkat luar biasa tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Pemakaian pupuk urea untuk tanaman pangan pada tahun 2009 dibanding tahun 2000 meningkat 80,8%, TSP/SP36 sebesar 302%, ZA/AS 371%, dan NPK 8220% (Gambar 1), tetapi produksi padi hanya meningkat dari 51,90 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) menjadi 60,93 juta ton GKG.⁵

⁵ D. A Santosa, *Kedaulatan Petani Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*. Jakarta: Agrimedia, 2011, hlm. 37-41.



Sumber: Kementerian Pertanian, 2011, diolah.

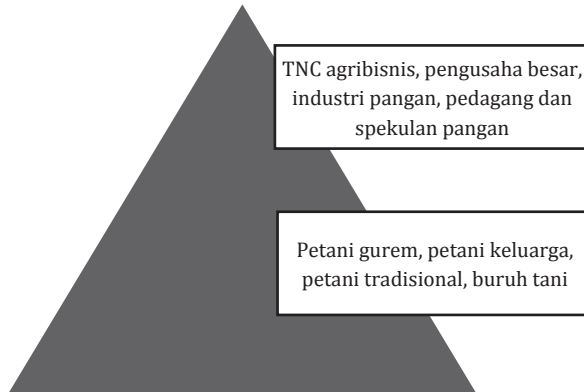
Gambar 1.

Penggunaan Pupuk Sintetik (dalam ribu ton) Untuk Pertanian Tahun 2000 dan 2009

Selain itu petani juga memiliki ketergantungan yang semakin tinggi terhadap input pertanian yang sebagian besar harus diimpor dari luar negeri. Hampir 100% pestisida untuk membasmi gulma, insekta, dan penyakit merupakan produk perusahaan multinasional. Demikian juga untuk pupuk P dan K juga harus diimpor dari luar negeri. Lenyapnya ribuan varietas lokal karya petani menyebabkan benih karya perusahaan asing mendominasi sistem pertanian kita. Sekitar 90% varietas padi hibrida merupakan produk impor. Perusahaan multinasional juga menguasai 90% pasar untuk jagung hibrida dan 78% pasar benih hortikultur. Kemampuan petani dan pemulia tanaman di Indonesia melemah karena lenyapnya sumber daya genetik pertanian.

Kedua, piramida struktur pertanian dan ketimpangan agrarian. Pola piramida struktur pertanian dan pangan yang ada saat ini mendudukkan agribisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, pertanian kapitalistik, dan spekulen pangan di puncak piramida dengan jumlah kurang dari 500.000 orang (Gambar 2). Mereka juga sekaligus mendapatkan akses dan fasilitas mewah dari pemerintah. Sedangkan dasar piramida tersusun dari 26,13 juta keluarga petani kecil atau 91 juta jiwa. Puncak piramida

tersebut menekan ke bawah dan menyebabkan 5 juta keluarga petani kecil tercerabut dari lahan mereka dalam 10 tahun terakhir ini dan menjadi penyusun masyarakat miskin kota. Jumlah rumah tangga petani menurun dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi sebesar 26,126 juta pada tahun 2013.⁶



Sumber: Kementerian Pertanian, 2011, diolah.

Gambar 2.
Piramida Struktur Pertanian Indonesia

Selain itu ketersediaan lahan pangan per kapita juga sangat sempit. Untuk lahan sawah, per kapita penduduk Indonesia hanya memiliki 326,2 m², sedangkan lahan kering yang sebagian besar kurang produktif sebesar 568,7 m², yang jauh lebih rendah dengan beberapa negara tetangga kita yaitu Vietnam (960 m²), Thailand (5226 m²), China (1120 m²), India (1591 m²), dan Australia (26.264 m²).

Lahan pertanian pangan yang menjadi gantungan hidup 91,91 juta jiwa hanya bertambah dari 7,77 juta ha pada tahun 1996 menjadi 8 juta ha pada tahun 2012 atau hanya bertambah kira-kira 2,96%. Ironisnya lahan perkebunan yang dimiliki sangat sedikit orang bertambah dari 8,77 juta ha (1996) menjadi 21,41 juta ha, atau bertambah 144%. Ketimpangan agrarian semakin terus membesar sehingga sekarang ini 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional yang sebagian besar berupa tanah. Disisi lain di Pulau Jawa 49,5% petani tidak berlahan sedangkan di luar Jawa jumlahnya mencapai 18,7%.

⁶ Badan Pusat Statistik. Sensus Pertanian 2013, Jakarta 2014.

Ketiga, konversi dan kerusakan lahan pertanian. Ketersediaan lahan pangan yang sangat sempit diperburuk dengan konversi lahan pertanian ke non-pertanian serta konversi kepemilikan lahan dari petani ke non-petani yang jumlahnya dalam 10 tahun terakhir ini meningkat pesat. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian diperkirakan sebesar 60.000 hektar per tahun, yang terkompensasi sebagian dari perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa. Proses deagrarianisasi juga berlangsung pesat terutama di wilayah-wilayah pertanian luar Jawa yang berdekatan dengan kawasan pertambangan. Lahan-lahan pertanian terbengkalai atau dijual dan diubah menjadi kawasan pertambangan.

Hal lainnya yang sangat serius adalah konversi kepemilikan lahan dari petani ke non-petani terutama di Pulau Jawa. Proses ini akan mengakselerasi perubahan penggunaan lahan untuk kepentingan pertanian ke non-pertanian, menyebabkan petani tercerabut dari lahannya yang kemudian menjadi penyusun masyarakat miskin kota. Sebagai contoh berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013 di Jawa Tengah, jumlah rumah tangga petani yang mengelola lahan kurang dari 1.000 m² menurun sebesar 1,32 juta. Keluarga tani lainnya yang memiliki luasan lahan lebih tinggi yaitu 1.000–1.999 m² yang bertambah jumlahnya sebanyak 8.658 rumah tangga pertanian yang kemungkinan disebabkan karena pergeseran kepemilikan dari kategori luasan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ironisnya untuk kategori rumah tangga petani yang berlahan 2.000–4.999, 5.000–9.999, 10.000–19.999, 20.000–29.999 dan >= 30.000 m² justru menurun semua (lihat Tabel 1). Dengan demikian kesimpulan sementara yang diambil oleh pemerintah bahwa penurunan jumlah rumah tangga petani menyebabkan peningkatan luasan lahan yang dikuasai oleh rumah tangga petani dari 0,41 ha (2003) menjadi 0,89 ha (2013) adalah sangat menyesatkan. Hal yang terjadi sesungguhnya adalah perubahan kepemilikan lahan dari petani ke non-petani.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Petani Berdasarkan Golongan Luas Lahan di Jawa Tengah

Golongan Luas Lahan (m ²)	Rumah Tangga Pertanian 2003	Rumah Tangga Pertanian 2013
<1.000	2.189.774	865.987
1.000 – 1.999	912.343	921.001
2.000 – 4.999	1.602.712	1.553.181

5.000 – 9.999	759.977	681.252
10.000 – 19.999	247.838	214.041
20.000 – 29.999	39.684	35.017
>=30.000	20.473	20.140
Jumlah	5.770.801	4.290.619

Sumber: Sensus Pertanian, BPS 2014.

Salah satu permasalahan besar lainnya adalah pengelolaan air. Konsep sederhana tetapi sudah banyak dilupakan dalam 30 tahun terakhir adalah jangan biarkan air mengalir sampai jauh. Hanya 10% air irigasi yang bisa dikendalikan yang jauh dari nilai ideal sebesar 50%.⁷ Sebanyak 50% dari 798.372 hektar jaringan irigasi strategis nasional di pulau Jawa rusak hingga rusak parah, dan sekitar 27% dari seluruh jaringan irigasi nasional perlu rehabilitasi ringan hingga berat.⁸ Pola budi daya pertanian yang tidak ramah alam serta pemaksaan tanah untuk bekerja sepanjang waktu juga telah menyebabkan terdegradasinya lahan-lahan pertanian di Indonesia.

Keempat, kelembagaan, kebijakan fiskal, dan statistik pertanian. Reforma agraria yang telah dicanangkan pemerintahan saat ini sejak tahun 2005 praktis tidak memberikan dampak bagi petani kecil. Reforma agraria dalam bentuk redistribusi aset dan pemberian akses bagi petani kecil berjalan sangat minimal sehingga tidak meningkatkan kesejahteraan petani maupun peningkatan penguasaan aset berupa tanah bagi mereka. Sebagian besar persoalan pelaksanaan reforma agraria bersumber pada beberapa masalah pokok berikut: (1) rendahnya dukungan politik dan penegakan hukum; (2) peraturan perundang-undangan yang tidak secara jelas dan tegas mengatur; (3) ketiadaan akses reforma untuk memastikan penggunaan tanah secara optimal oleh penerima tanah; (4) data dan informasi serta pembiayaan kurang memadai; dan (5) lemahnya lembaga pelaksana dan kualitas sumber daya manusia.⁹

⁷ Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional, Seperti disampaikan dalam workshop Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan CORE Indonesia, 2015.

⁸ Dirjen SDA Kementerian PU, Jakarta 2014.

⁹ D. A. Santosa, Politik Pangan Global, Kompas, Opini 30 Desember 2013, hlm. 6.

Kebijakan fiskal di sektor pertanian dan pangan selama ini tidak tepat sasaran dan kurang berpihak untuk petani miskin. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam 10 tahun terakhir ini terjadi peningkatan impor pangan yang luar biasa tinggi. Ironisnya dalam periode yang sama terjadi peningkatan tajam anggaran sektor pertanian yang disediakan APBN setiap tahunnya. Total anggaran yang disediakan untuk sektor pertanian dan pangan pada tahun 2004 sebesar Rp10,1 triliun rupiah.¹⁰ Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp12,6 triliun rupiah pada tahun 2005, Rp49,8 triliun rupiah pada tahun 2009 dan Rp71,9 triliun rupiah pada tahun 2013¹¹ atau terjadi peningkatan sebesar 611% dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Anggaran tersebut terdistribusi untuk Kementerian Pertanian, irigasi, subsidi, transfer ke daerah dan belanja lain-lain berupa cadangan beras pemerintah, cadangan stabilisasi pangan, cadangan benih nasional, dan cadangan ketahanan pangan.

Beberapa anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan langsung oleh petani tidak terjadi sehingga sebagian anggaran tersebut jatuh ke tangan pengusaha besar atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran yang digunakan terutama untuk subsidi benih, pupuk dan *input* pertanian lainnya tidak tepat sasaran sehingga dampaknya terhadap peningkatan produksi pangan tidak terlalu signifikan.

Statistik pertanian merupakan permasalahan serius lainnya. Angka konsumsi dan angka produksi padi sebagai salah satu contoh merupakan data statistik penting yang mendasarkan diri pada asumsi dan formula yang sudah tidak tepat sehingga harus segera direvitalisasi. Perbaikan data harus disandarkan pada kondisi nol tanpa pertimbangan kepentingan politik maupun penilaian kinerja kementerian terkait.¹² Buruknya data statistik tidak hanya beras, tetapi juga sebagian besar data produksi dan konsumsi komoditas lainnya. Kebijakan pangan yang disandarkan pada data yang buruk akan menghasilkan kebijakan yang salah yang pada akhirnya merugikan kita semua, terutama petani kecil sebagai pelaku produsen pangan.

¹⁰ Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2004.

¹¹ Pusat kebijakan APBN – Badan Kebijakan Fiskal, 2014.

¹² CORE Indonesia, *Op. Cit.*

Kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim secara langsung akan berdampak terhadap perubahan agro-ekologi, sedangkan secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang akan mengubah permintaan dan jenis pangan.¹³ Bila semua negara bahu-membahu dan berhasil menurunkan emisi secara drastis, peningkatan suhu masih tetap terjadi, yaitu sebesar 1,1°C hingga 2,9°C pada tahun 2100. Bila berbagai kesepakatan hanya di atas kertas dan kecenderungan yang ada tetap seperti saat ini maka suhu global akan meningkat antara 2,4°C hingga 6,4°C. Perubahan iklim akan memberikan dampak terbesar terhadap negara-negara berkembang yang sebagian besar berada di wilayah tropika.

Perubahan iklim akan menyebabkan kemampuan menyediakan pangan negara berkembang untuk penduduknya semakin memburuk, terutama yang berada di wilayah tropika. Berbagai model iklim memprediksi terjadinya peningkatan evapotranspirasi dan menurunnya lengas (*moisture*) tanah. Beberapa wilayah pertanian kemungkinan menjadi tidak layak untuk ditanami dan luasan padang rumput untuk peternakan menjadi menurun karena musim kering yang lebih panjang. Untuk Indonesia yang memiliki pantai terpanjang keempat di dunia, dengan pusat-pusat produksi pangannya pada wilayah berdekatan dengan pantai, ancaman penurunan produksi pangan menjadi semakin besar. Tenggelamnya lahan-lahan sawah tepi pantai dan intrusi air laut akan menjadi persoalan biasa di masa depan. Kejadian tahun 2010 yang berlanjut pada tahun ini tentang meningkatnya serangan wereng, ulat, dan beberapa penyakit tanaman merupakan contoh nyata bagaimana perubahan iklim berdampak langsung terhadap pertanian.

Sebaliknya, elevasi CO₂ dari sekitar 379 ppm saat ini menjadi >550 ppm pada tahun 2100 diperkirakan berdampak positif terhadap fotosintesis, pembentukan biomassa, dan produktivitas tanaman. Bila faktor-faktor lainnya dalam kondisi optimum, peningkatan level CO₂ hingga 550 ppm akan meningkatkan produktivitas padi, kedelai, dan gandum (tanaman C3) sekitar 10% hingga 20%. Untuk tanaman kelompok C4, misalnya jagung dan tebu peningkatan produktivitas

¹³ D. A. Santosa, Kedaulatan Petani Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, Agrimedia, 2011.

tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 0% hingga 10%. Efek positif peningkatan CO₂ atmosfer kemungkinan tidak bisa mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan akibat perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berpengaruh terhadap lahan pertanian di berbagai belahan dunia. Meski total lahan pertanian dunia relatif tidak berubah, yaitu pada angka sekitar 2.600 juta hektar, perubahan iklim akan menyebabkan dampak yang berbeda-beda antar-wilayah. Resiko akibat perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan bagi negara berkembang adalah perubahan kesesuaian lahan dan penurunan produksi pertanian utama sekitar 135 juta hektar hanya karena perubahan iklim. Akibat perubahan iklim juga akan ada penambahan lahan yang mula-mula tidak sesuai untuk pertanian menjadi sesuai yang berjumlah sekitar 25 juta hektar. Dengan demikian total hilangnya lahan pertanian di negara berkembang sekitar 110 juta hektar.

Sebaliknya, bagi negara maju yang berada di wilayah sedang atau dingin, perubahan iklim justru berdampak positif terhadap luasan lahan pertanian mereka. Lahan pertanian produktif mereka akan bertambah sekitar 160 juta hektar. Peningkatan luas lahan pertanian produktif di negara maju juga berdampak positif terhadap produksi pertanian mereka. Pada tahun 2025, diperkirakan Eropa dan Amerika Utara akan mengalami surplus pangan sebesar 352 juta ton. Meski demikian secara total kondisi pangan dunia yang harus memenuhi kebutuhan 8,04 miliar penduduk tetap mengkhawatirkan karena defisit diperkirakan masih sebesar 69 juta ton.

Semua hal tersebut di atas menyebabkan upaya peningkatan produksi pangan semakin sulit dilakukan. Negara-negara produsen pangan utama di masa depan semakin protektif sehingga jumlah pangan yang bisa diperdagangkan semakin lama semakin sedikit. Kekacauan iklim akan menyebabkan banjir dan kekeringan menjadi semakin sering terjadi yang menyebabkan instabilitas produksi pangan di masa depan. Instabilitas akan menciptakan pasokan dan stok pangan yang sangat fluktuatif. Dua kondisi tersebut ditambah dengan konversi pangan ke energi akan menyebabkan harga pangan semakin tinggi.

IV. Agenda Kebijakan

Dengan memahami peran sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan serta permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa sejumlah agenda penting yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Demokratisasi Pertanian dan Kedaulatan Petani

Hingga saat ini hampir semua kebijakan pertanian dirumuskan oleh pemerintah, DPR dan kalangan pengusaha. Hal tersebut menyebabkan banyak rencana kebijakan pertanian menjadi bermasalah bagi petani. Dalam kedaulatan pangan, petani kecil wajib dilibatkan dalam penetapan kebijakan pertanian baik di pusat maupun daerah.

Di berbagai distrik di India, demokratisasi pertanian telah dilaksanakan dengan membentuk "*farmer jury*". Setiap kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah diputuskan oleh suatu panel yang terdiri dari para petani. Melalui pola ini kebijakan yang sering kali tidak tepat sasaran bisa diminimalisasi sehingga akhirnya benar-benar menguntungkan bagi petani kecil. Peningkatan kedaulatan petani juga berpengaruh besar terhadap terwujudnya kedaulatan pangan. Petani perlu difasilitasi sehingga kedaulatan mereka atas benih, *input* pertanian lainnya dan teknologi dapat meningkat. Dari berbagai diskusi dengan kelompok-kelompok tani yang mandiri dan berdaulat, produktivitas pertanian mereka rata-rata 25% hingga 50% lebih tinggi dibanding petani lainnya. Produktivitas yang tinggi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

2. Reforma Agraria

Saat ini diperlukan pengawalan terus-menerus pelaksanaan reforma agraria sehingga petani kecil dan tuan tanah memiliki akses terhadap lahan serta upaya terkait lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Akses Petani Terhadap Sumber daya Produktif

Reforma agraria berkaitan juga dengan akses petani kecil terhadap sumber daya produktif yang meliputi air, sumber daya genetik dan sumber daya alam. Tiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tani, hanya sayangnya akses ke sumber daya tersebut bukan semakin menguat tetapi semakin melemah, misalnya upaya privatisasi air yang menguntungkan pemodal serta bergesernya penguasaan benih dari petani ke pengusaha.

4. Pertanian Agroekologi

Sistem pertanian agroekologi menjadi dasar banyak gerakan petani kecil di seluruh dunia dan dijadikan penciri kedaulatan pangan. Agroekologi sering direduksi menjadi pertanian organik yang menolak sama sekali penggunaan pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan benih transgenik. Agroekologi tidak berarti sama dengan pertanian organik, meski beberapa konsep seperti menjaga kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia sama antar- keduanya. Agroekologi didefinisikan sebagai penerapan ilmu ekologi mengenai distribusi dan kelimpahan organisme di lingkungan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Kekuatan pendorong di belakang gerakan agroekologi adalah kritik ekonomi politik terhadap pertanian modern. Banyak ilmuwan meyakini bahwa perubahan radikal dalam ekonomi politik serta ekonomi moral dapat menurunkan dampak negatif pertanian modern.

5. Rasionalisme Hijau

Diskursus lingkungan untuk ketahanan pangan adalah rasionalisme ekonomi karena entitas utama dalam ketahanan pangan adalah aktor-aktor ekonomi. Hubungan antar-aktor adalah kompetisi dan motivasi aktor merupakan kebutuhan pribadi (*rational self interest*). Berkebalikan dengan hal tersebut adalah rasionalisme hijau. Kedaulatan pangan memproklamasikan pengakuan tentang kompleksitas produksi pangan, hubungan komunal antar- petani serta petani dengan alam dan penggunaan sistem produksi agroekologi. Berbeda dengan gerakan hijau lainnya, diskursus rasionalisme hijau dalam kedaulatan pangan kurang bersentuhan dengan politik formal.¹⁴

V. Penutup

Pembangunan berkelanjutan bukan hanya bertumpu pada aspek lingkungan hidup, tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan sosial, yang satu sama lain saling berkaitan. Dalam kaitan itu, implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan bukan hanya tugas dari Kementerian Pertanian atau Kementerian Lingkungan

¹⁴ CORE Indonesia, *op. Cit.*

Hidup saja namun juga terkait dengan institusi yang luas. Sayangnya justru dalam koordinasi dan kerja sama antar-instansi dan antar-sektor merupakan titik lemah pelaksanaan pembangunan kita selama ini, sehingga harus ada komitmen politik yang kuat agar baik pembangunan ekonomi dan sosial dapat mengintegrasikan aspek lingkungan secara utuh. Salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan penerapan secara sektoral dan parsial. Pendekatan yang egosektoral tersebut mengakibatkan banyak komitmen Indonesia pada banyak konvensi dan kesepakatan internasional tidak dapat dilaksanakan secara penuh di lapangan. Pendekatan egosektoral tersebut juga yang menyebabkan dalam era persaingan global saat ini, Indonesia selalu ketinggalan dan belum memperlihatkan komitmen tinggi terhadap berbagai kesepakatan global. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan mengharuskan penerapan secara terpadu, lintas sektoral, dan lintas disiplin ilmu, baik pada tingkat pusat dan/atau daerah. Otonomi daerah pada pemerintahan kabupaten/kota atau di tingkat provinsi, dengan segala kekuasaannya juga nampaknya akan sangat efektif mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan yang berbasis konsep, program, serta strategi pencapaian program tersebut di tingkat daerah. Bagaimanapun otonomi daerah dapat dijadikan payung kekuatan untuk melakukan sinergisitas program-program secara lintas sektoral, mengingat implementasi kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan masih memerlukan dukungan dari berbagai sektor yang terkait, dalam kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih holistik. Di tingkat nasional, sinergisitas konsep, program, serta strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan juga pembangunan pertanian berkelanjutan, secara bersama-sama dijadikan program terpadu di antara berbagai sektor pembangunan, dalam hal ini melalui koordinasi berbagai lembaga kementerian yang ada dan sekaligus terkait dengan program pembangunan nasional, sehingga program pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angus, I. *Food Crisis: World Hunger, Agricusiness, and the Food Sovereignty Alternative (Part Two)*, Climate and Capitalism, 2008.
- Global Food Security Index."Global Food Security Index". The Economist Intelligence Unit. 2014.
- Santosa, D. A. *Kedaulatan Petani Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*. Jakarta: Agrimedia, 2011.
- Fauzi, A. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friyatno, S. 2001. Analisis Penerapan Intensifikasi Usahatani Padi Sawah Pasca Krisis Ekonomi (Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat). Makalah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2005. *Strategi, Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif ?*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Nainggolan, H, L. 2011. Peranan Analisis Komoditi Unggulan Bagi Pengembangan Tanaman Pangan Dalam rangka Menciptakan Kemandirian Pangan di Kabupaten Toba Samosir. Buletin Ketahanan Pangan, Vol. 4 No. 1 : 26–35. Bulan Oktober 2011. Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara. Medan.

- Sutamihardja, 2004. Perubahan Lingkungan Global. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tindaon, F dan Nainggolan, H. L. 2011. Studi Kelayakan Penerapan Bioteknologi Pertanian Dalam Pengembangan Tanaman Pangan Jagung di Lahan Perkebunan di Sumatera Utara. Makalah Seminar Nasional Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), di Medan.
- Turner, P. K, D. Pearce, and I, Bateman. 1993. Environmental Economic: An elementary introduction. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Widayanto, B. 2000. Kajian Sektor Unggulan dan Transformasi Struktur Perekonomian di Kabupaten Sleman. DIY Dalam Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian. Volume 1. No. 2000.

BAGIAN KETIGA:
DIMENSI LINGKUNGAN

BAB VIII

UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Sri Nurhayati Qodriyatun

I. Pendahuluan

Hasil Sensus BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 234,2 juta jiwa dengan penyebaran 60% (140 juta jiwa) tinggal di Pulau Jawa dan 50% (114 juta jiwa) tinggal di kawasan perkotaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan pun cukup signifikan, 5,89% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan rata-rata nasional (1,17% per tahun). Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 152 juta jiwa (65%).¹ Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau.

Akhir-akhir ini, permasalahan kota-kota di Indonesia juga diperberat dengan hadirnya fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap pembangunan perkotaan. Dampak yang sangat serius berkaitan dengan kesehatan masyarakat, penghidupan penduduk (*livelihoods*), dan penyelamatan asset yang ada. Dampak tersebut semakin buruk dirasakan oleh penduduk miskin. Perubahan iklim telah menimbulkan cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan yang amat sangat di musim kemarau dan curah hujan yang tinggi di musim penghujan. Bahkan pada kota-kota yang berada di kawasan pesisir, perubahan iklim juga mengakibatkan

¹ Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPN) 2010 – 2025*, (Jakarta: Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, 2010), p.1.

naiknya permukaan air laut dan gelombang tinggi. Akibatnya terjadi krisis air ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim penghujan.² *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dalam *Synthesis Report Summary for Policymakers*, memproyeksikan beberapa akibat yang mungkin muncul sebagai dampak perubahan iklim ekstrim di daerah perkotaan di kawasan Asia Timur, seperti kualitas udara kota yang menurun, gangguan transportasi karena adanya salju, masalah kualitas air, kematian akibat panas yang meningkat, menurunnya kualitas hidup penduduk di daerah panas, migrasi ke daerah perkotaan meningkat, dan gangguan terhadap pasokan air untuk minum.³

Kota-kota di Indonesia juga terkena dampak dari perubahan iklim. Laporan terbaru Bank Dunia (Juni 2013) memperkirakan tahun 2050 Indonesia akan mengalami dampak perubahan iklim yang lebih berat berupa cuaca ekstrim, di antaranya meningkatnya intensitas angin puting beliung, gelombang panas (*heat waves*) dan kekeringan yang sangat sulit ditanggulangi. Studi terbaru Bank Dunia ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara akan menghadapi dampak yang serius dengan kenaikan temperatur permukaan bumi yang mencapai 2–4°C. Pesisir pantai di seluruh kawasan Asia Tenggara akan mengalami kenaikan air laut 10–15% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan permukaan air laut global. Kenaikan temperatur sebesar 4°C akan menyebabkan kota-kota yang terletak di pesisir dengan kepadatan populasi yang tinggi akan terpapar oleh intensitas badai yang meningkat, kenaikan permukaan air laut dalam jangka panjang, serta banjir di pesisir seketika (*sudden onset*). Tingginya risiko permukaan air laut akan semakin diperparah bila kota-kota di kawasan pesisir tersebut juga mengalami penurunan tanah (*land subsidence*).⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dalam Laporan Nasional Variabilitas Iklim dan Perubahan Iklim Indonesia 2007 mencatat 70% kota-kota di Indonesia

² The World Bank, *Guide to Climate Change Adaptation in Cities*, (Washington: Urban Development and Local Government Unit, Sustainable Development Network, The world Bank, 2011), p.3.

³ Neeraj Prasad, Federica Ranghieri, Fatima Shah, Zoe Trohanis, Earl Kessler, Ravi Sinha, *Kota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010), p. 9.

⁴ Teddy Kurniawan, "Studi Perubahan Iklim Mengancam Pembangunan Indonesia", (<http://www.beritasatu.com/iptek/120929-studi-perubahan-iklim-mengancam-pembangunan-indonesia.html>, diakses 1 Agustus 2013).

yang berada di kawasan pesisir seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Makasar, Manado, dan Ambon sudah dihadapkan pada masalah kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Selain itu, kota-kota besar juga dihadapkan pada meningkatnya suhu udara di atas kenaikan suhu rata-rata bumi 0,8°C, terutama di kawasan yang padat bangunan.⁵

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pembangunan perkotaan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah juga telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), *National Development Plan: Indonesia Respond on Climate Change*, dan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*. Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan bagi semua sektor dalam melaksanakan upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengingat sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah didesentralisasikan ke pemerintah daerah, maka upaya menghadapi perubahan iklim juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Pada awalnya fokus penanggulangan perubahan iklim lebih banyak membahas upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun dengan tingginya kerentanan kota dan kawasan perkotaan terhadap dampak perubahan iklim, saat ini banyak fokus program dan inisiatif yang lebih mengarah pada upaya adaptasi. Upaya adaptasi dalam skala kota serta membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dirasa juga perlu dilakukan. Ada beberapa program yang dikembangkan oleh pihak ketiga dalam rangka perubahan iklim, seperti *The Asian Cities Climate Resilience Network (ACCRN)*, *GIZ-PAKLIM - Policy Advice for Environment and Climate, Climate Resilience Cities (CRC)*, dan *The Stakeholders Coordination, Advocacy, Linkages and Engagement for Resilience (Scale-R)*. Selain itu juga ada program dari pemerintah pusat, yaitu Program Kampung Iklim. Masing-masing program memiliki fokus yang berbeda-beda.

⁵ Nirwono Joga, "Kota-kota di Indonesia dan Perubahan Iklim", (<http://www.investor.co.id/home/kota-kota-di-indonesia-dan-perubahan-iklim/21164>, diakses 1 agustus 2013).

Permasalahannya, kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, kapasitas aparatur pemerintah relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan perkotaan yang harus dihadapi, antara lain peraturan, pendanaan, organisasi, sumber daya manusia, dan keterpaduan perencanaan.⁶ Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan perkotaan yang secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dampak tersebut akan semakin menurunkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung, dua kota yang secara geografis memiliki kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Ada pun fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim.

II. Kota Berketahanan Iklim: Kebijakan Pemerintah Menghadapi Perubahan Iklim

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan berubahnya komposisi gas-gas yang menyusun atmosfer. Perubahan ini sudah melampaui batas variabel alami dari iklim. Terdapat konsensus luas di kalangan komunitas ilmiah bahwa perubahan iklim disebabkan oleh emisi gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas manusia.⁷ Karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan antropogenik, maka Badan PBB mendefinisikan perubahan iklim sebagai: “adanya kegiatan manusia yang mengubah

⁶ Siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup, “Rapat Koordinasi Nasional Program Adipura” (<http://www.menlh.go.id/sp-rapat-koordinasi-nasional-program-adipura/>, di akses 2 Agustus 2013).

⁷ IPCC, 2001, dalam Daniel Murdiyarso, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), p. 12.

komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu.”⁸

Perubahan iklim berdampak negatif bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau utama dan 30 kelompok kepulauan yang lebih kecil mencakup 17.500 pulau, luas Indonesia 3,1 juta km² wilayah perairan dan sekitar 2 juta km² luas daratan, dengan panjang garis pantai 81.000 km. Sebagian besar kepulauan Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan gelombang tinggi. Hal ini disebabkan posisi Indonesia yang berada di atas dua paparan yaitu Paparan Arafura-Sahul (bagian dari gabungan Australia dan New Guinea). Karakteristik geografis dan geologis Indonesia tersebut sangat rentan terhadap perubahan iklim. Secara umum model global perubahan iklim memperkirakan seluruh wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur dengan laju yang lebih rendah dibandingkan wilayah sub-tropis. Contoh, Jakarta mengalami laju perubahan temperatur 1,42°C setiap seratus tahun untuk bulan Juli. Selanjutnya wilayah Indonesia di bagian selatan garis ekuator seperti Jawa dan Bali awal musim hujan rata-rata diperkirakan akan mundur dan intensitas hujan musim hujan cenderung meningkat sementara curah hujan musim kemarau cenderung menurun sehingga risiko banjir dan kekeringan akan semakin meningkat. Untuk wilayah Indonesia bagian utara ekuator, pola perubahan hujan cenderung sebaliknya. Demikian juga dengan kenaikan permukaan air laut, beberapa lokasi di Indonesia kenaikan permukaan air laut sudah mencapai 8 mm per tahun.⁹

World Bank melihat bahwa dunia perkotaan saat ini berada pada masa yang unik, karena dihadapkan pada tiga pergerakan yang datang beriringan yaitu sosial, politik, dan keuangan sehingga memengaruhi bentuk kota-kota di masa depan. Tiga pergerakan tersebut adalah urbanisasi, desentralisasi, dan pembangunan pasar modal domestik. Perubahan iklim akan memengaruhi perkembangan kota di masa depan. Karena populasi dunia bergerak ke kota, dan setengah dari populasi dunia ada di perkotaan. Pada tahun 2030 sedikitnya 61% populasi dunia akan tinggal di kota. Kota di dunia yang sedang berkembang akan menyerap

⁸ UNFCCC, article 1 (2).

⁹ Bakosurtanal, 2002, dalam Kementerian Lingkungan Hidup, *Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).

95% dari seluruh pertumbuhan perkotaan dan akan menjadi kediaman bagi hampir 4 miliar penduduk atau 80% dari populasi perkotaan dunia. Seiring dengan itu, kemiskinan yang pada mulanya tersebar di pedesaan, saat ini terkonsentrasi di daerah pinggiran perkotaan.¹⁰ Demikian juga dengan kota-kota di Indonesia. Merujuk Sensus BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 234,2 juta dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Persebaran penduduk Indonesia pun tidak merata. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia (140 juta jiwa) tinggal di Pulau Jawa, dengan kepadatan 1.003 jiwa/km². Diperkirakan sekitar 50% penduduk (114 juta jiwa) tinggal di kawasan perkotaan, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 5,89% per tahun, sementara tingkat pertumbuhan nasional rata-rata hanya 1,17% per tahun. Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 152 juta jiwa (65 persen) dan sisanya tersebar di kawasan perdesaan yang mencakup 82,3 persen luas wilayah.¹¹

Pertambahan penduduk perkotaan pada umumnya didominasi oleh tingginya arus urbanisasi (perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan). Urbanisasi telah menyebabkan munculnya tekanan kebutuhan perluasan kawasan permukiman di kawasan pinggiran kota. Urbanisasi juga mengubah pola hidup penduduk dari pedesaan, dari agraris ke non-agraris. Berbagai hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi perkotaan saat ini. Tingginya arus urbanisasi di banyak kota di Indonesia, mendesak kondisi ekologis kawasan perkotaan yang ada.

Dalam tiga dasa warsa terakhir, kota-kota di Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang luar biasa. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan berkurang dari rata-rata 35 persen menjadi kurang dari 10 persen. Lahan-lahan produktif dan persawahan teknis mengalami alih fungsi menjadi pabrik-pabrik maupun rumah-rumah hunian dengan laju di atas 50.000 hektar per-tahun. Kawasan kumuh menempati ruang-ruang yang bersifat lindung seperti bantaran sungai, di bawah SUTET, kolong jembatan, atau daerah kawasan resapan (*catchment area*), serta ruang-ruang lainnya yang tidak dialokasikan sebagai ruang hunian. Di sisi lain desakan investor memaksa pengembangan kawasan hunian

¹⁰ Neeraj Prasad dkk., *Op.Cit*, p. 5.

¹¹ Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, *Op.Cit*.

pada lokasi-lokasi yang seharusnya dilindungi seperti sempadan pantai, kawasan rawa, kawasan genangan (*retention basin*). Beberapa RTH dan jalur hijau yang ada banyak dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak semestinya, seperti untuk SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), hunian ilegal, kios-kios pedagang kaki lima (PKL).¹² Sementara transportasi massal tidak dikembangkan secara baik sehingga kemacetan dan polusi udara semakin memperparah kondisi kota-kota di Indonesia. Demikian juga pengelolaan sampahnya. Sampah kota tidak dikelola dengan baik sehingga menghasilkan gas *methan* yang mencemari udara. Pengembangan kota-kota seperti itu telah memberikan sumbangan terhadap emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global dan munculnya perubahan iklim ekstrem. Sumber emisi gas rumah kaca di kota dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, industri, rumah tangga, dan lain sebagainya. Berdasarkan kajian Hayu Parasati,¹³ rumah tangga di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO² terbesar yang bersumber dari penggunaan energi lebih dari 100 juta ton per tahun. Industri di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO² terbesar, meningkat dari 103 juta ton pada tahun 2003 menjadi 24 juta ton pada tahun 2005. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor di Pulau Jawa pada tahun 2007 memberikan kontribusi emisi CO² terbesar sebesar 40 juta ton, 16 juta ton di antaranya berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut semakin memperparah kerentanan kawasan perkotaan terhadap dampak perubahan iklim. Ada beberapa alasan mengapa kota dan kawasan perkotaan perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka penanganan dampak perubahan iklim, yaitu:¹⁴

¹² Doni J. Widiyanto, *Kota Berkelanjutan: Membangun Kota Tanpa Luka*, (http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/Kota%20Berkelanjutan%20Membangun%20Kota%20Tanpa%20Luka-DR.Ir.Doni%20J.Wididantono,M.Eng.Sc.PDF, diakses 12 April 2013).

¹³ Hayu Parasati, "Kebijakan Perkotaan Terkait Perubahan Iklim", *Buletin Tataruang*, Edisi Januari-Februari, 2012, p. 15-18.

¹⁴ Wahyu Mulyana, "Kota dan Perubahan Iklim: Strategi Ketahanan Kota Menghadapi Dampak Perubahan Iklim" dalam *Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Bungai Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), p.71-90.

- a. Pesatnya penambahan jumlah penduduk perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai angka 68% dari total penduduk.
- b. Kota sebagai mesin penggerak ekonomi dan pusat produksi sekaligus produksi.
- c. Kota penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kontribusi kota sekitar 80% dari emisi transportasi dan penggunaan energi sebesar 75%.
- d. Kota mengalami penurunan kondisi lingkungan.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya konsentrasi penduduk miskin di perkotaan. Penduduk miskin kawasan perkotaan menjadi masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki untuk mengantisipasi dampak-dampak tersebut. Untuk itu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan.

2. Kota Berketahanan Iklim

Istilah kota berketahanan iklim muncul setelah IPCC, 2007, melaporkan kemungkinan-kemungkinan dampak perubahan iklim ekstrim yang akan mengenai sebagian besar kota-kota di dunia, terutama di kawasan Asia Timur. Laporan IPCC tersebut mendorong Bank Dunia menyusun pedoman bagi pemerintah-pemerintah kota di Asia Timur untuk menghadapi perubahan iklim. Pedoman tersebut sebagai alat bagi pemerintah kota untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan menggunakan pendekatan jalur ganda, yaitu dengan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui mitigasi (program-program efisiensi energi, penggunaan bahan bakar non-fosil, pengendalian pemekaran perkotaan yang tidak teratur/*urban sprawl*, angkutan publik yang lebih baik, daur ulang limbah/sampah dan reklamasi air limbah) dan adaptasi (program untuk meminimalisasi dampak keadaan dan bencana akibat perubahan iklim).¹⁵

Pemerintah Indonesia sudah memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Dalam RPJPN 2005–2025, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan

¹⁵ Neeraj Prasad dkk, *Op.Cit.*, p. xvii.

kota. Kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2004–2009 dan RPJMN 2010–2014 dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Upaya antisipasi perubahan iklim lebih spesifik dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan *National Development Plan: Indonesia Respond on Climate Change*, dan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*. Adapun agenda mitigasi diarahkan untuk mereduksi emisi GRK pada sektor-sektor ekonomi prioritas, yaitu sektor energi, kehutanan, pertanian-perikanan, dan infrastruktur yang didasarkan pada penetapan sasaran-sasaran reduksi persektornya. Sedangkan agenda adaptasi diarahkan untuk mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini dan antisipasi dampaknya ke depan.¹⁶

Upaya mitigasi dan adaptasi tersebut diinternalisasikan ke dalam pembangunan perkotaan. Dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) 2010–2025, salah satu kebijakan pembangunan perkotaan adalah mendorong kota-kota meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 strategi, yaitu (1) penerapan mekanisme pengendalian yang kuat terhadap kegiatan pembangunan kota agar tidak merusak lingkungan melalui mekanisme insentif disinsentif; (2) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; (3) dukungan teknis dan finansial bagi kota-kota yang mampu mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan kota yang sehat dan siap menghadapi kemungkinan bencana serta perubahan iklim; dan (4) percepatan penyusunan regulasi khususnya dalam bidang transportasi dalam upaya mengurangi efek rumah kaca melalui pengurangan emisi CO².¹⁷

Namun dalam pengembangan kota ke arah kota yang berketahanan iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pembangunan perkotaan, yaitu:¹⁸

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, 2007, *Op.Cit.*, p.27.

¹⁷ Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, *Op.Cit.*, p. 27.

¹⁸ *Ibid*

1. Bahwa kota merupakan “entitas sosio-spasial”, artinya fisik dan ruang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembangunan kota tidak dapat lepas dari upaya pengembangan masyarakatnya;
2. Bahwa kota merupakan bagian dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan yang bersifat alami seperti hutan, sungai, daerah aliran sungai, teluk, laut, dan pegunungan, maupun lingkungan buatan seperti kawasan perdesaan atau perkotaan. Oleh karena itu, kota tidak hanya mengakomodasi kebutuhan bagi masyarakat dan lingkungan di dalamnya, tetapi juga harus berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga pembangunan kota harus mempertimbangkan kondisi geografis dan historis setempat;
3. Bahwa kota-kota di Indonesia bersifat “terbuka” artinya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga, seperti golongan kaya maupun miskin, asli atau pendatang, perbedaan agama, suku, maupun identitas pribadi lainnya; dan
4. Bahwa kota harus mampu berkompetisi dalam perkembangan ekonomi global dengan memanfaatkan potensi sosial dan kreativitas lokal.

Dari sinilah dimungkinkan bahwa setiap kota akan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim. Potensi sosial dan kreativitas lokal akan melahirkan kebijakan yang berbeda antar-pemerintah kota.

III. Upaya Mitigasi dan Adaptasi Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim

1. Dampak Perubahan Iklim di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung

Dampak perubahan iklim bagi setiap daerah akan berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan hidup setiap daerah. Perubahan iklim di Kota Semarang terlihat dari kenaikan suhu permukaan, meningkatnya intensitas hujan, kenaikan muka air laut dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Salah satu bukti terjadinya perubahan iklim di Kota Semarang adalah kenaikan suhu rata-rata bulanan dalam 100 tahun terakhir. Kenaikan muka air laut terjadi sejak tahun 1985, dan diperkirakan terus meningkat 40 sampai 80

cm dalam 100 tahun ke depan.¹⁹ Adapun dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang antara lain:²⁰

Pertama, banjir yang semakin meningkat luasannya dan intensitasnya. Ada beberapa tipe banjir di kota Semarang, yaitu banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob (*tidal inundation*). Banjir kiriman terjadi secara periodik setiap tahun dan melanda daerah sekitar pertemuan Kali Kreo, Kali Kripik, dan Kali Garang sampai di Kampung Bendungan. Banjir kiriman terjadi karena peningkatan debit air sungai yang mengalir di DAS Garang, DAS Kreo, dan DAS Kripik yang disebabkan oleh intensitas hujan yang besar atau intensitas hujan yang sama namun jatuh pada wilayah yang telah mengalami konversi penggunaan lahan. Banjir lokal lebih bersifat setempat, sesuai dengan atau seluas kawasan yang tertumpah air hujan. Banjir lokal terjadi karena tingginya intensitas hujan, belum tersedianya sarana drainase yang memadai, dan penggunaan saluran yang masih untuk berbagai tujuan (*mutipurpose*) baik untuk penyaluran air hujan, limbah, dan sampah rumah tangga. Sementara banjir rob terjadi karena (a) permukaan tanah yang lebih rendah daripada muka pasang air laut; (b) bertambah tingginya pasang air laut; (c) sedimentasi dari daerah atas (bukit) ke muara sungai (Kali Semarang, Banjir Kanal Barat, Kali Silandak, Kali Banger, Silandak Flood Way, Baru Flood Way, dan Kali Asing) maupun sedimentasi air laut karena pasang surut, pengaruh gelombang, dan arus sejajar pantai. Banjir rob terjadi pada saat air laut pasang, khususnya ketika pasang purnama. Setiap terjadi air laut pasang sebagian wilayah Kota Semarang khususnya daerah pantai seluas 3.100 ha akan terjadi banjir. Kondisi ini menjadikan infrastruktur jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya termasuk di dalamnya kendaraan menjadi rentan terhadap kerusakan. Banjir rob juga mengakibatkan naiknya salinitas (kadar garam terlarut dalam air), tercemarnya sumur air, terganggunya sektor bisnis, dan kerusakan bangunan.

¹⁹ Mulyana, Wahyu., David Dodman, Sainan Zhang, dan Daniel Schensul. "Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Metropolitan Semarang, Analisis Spasial dan Kependudukan". *Technical Briefing UNFPA*. Oktober 2013.

²⁰ Gunawan Wicaksono, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, *Wawancara*, Kantor BLH Kota Semarang, 8 Oktober 2013.

Kedua, kekeringan dan krisis air bersih. Kebutuhan air bersih di Kota Semarang selama ini dipenuhi dari PDAM, air tanah, dan air permukaan (air sungai Kali Garang). Pelayanan PDAM tahun 2010 hanya mampu mencukupi 40% dari kebutuhan air masyarakat.²¹ Sementara air tanah yang dimanfaatkan adalah air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang menurut perhitungan pada tahun 2030 Kota Semarang akan mengalami defisit air tanah.²² Berdasarkan studi CCROM (*Center for Climate Risk and Opportunity Management*) IPB tahun 2010, sejumlah bagian wilayah Kota Semarang teridentifikasi mengalami kekeringan karena jauh dari sumber air.²³

Ketiga, erosi pantai (abrasi). Erosi pantai terjadi karena gelombang laut yang bergerak ke arah pantai mampu mengikis bahkan memecahkan batu-batu karang di pantai kemudian diangkut ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut dan samudra. Daerah yang cukup parah mengalami erosi pantai adalah Pantai Semarang Bagian Barat (Kecamatan Tugu dan Semarang Barat). Di kedua daerah tersebut terjadi penurunan fungsi lahan karena erosi pantai dan penggenangan air laut di kawasan tambak. Kerusakan pantai terjadi sepanjang kurang lebih 2,25 km di Kecamatan Tugu dan kurang lebih 0,5 km di Kecamatan Semarang Barat Kelurahan Tambakharjo.²⁴ Erosi pantai di Kota Semarang tidak hanya dipengaruhi tingginya sedimentasi sejumlah alur sungai yang bermuara di pantai utara Kota Semarang, tetapi juga disebabkan oleh banyaknya bangunan yang berdiri di pinggiran pantai. Reklamasi Pantai Marina dan Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan menjadi penyebab terjadinya erosi pantai di pesisir Semarang bagian timur, bahkan hingga ke

²¹ Purnomo Dwi Sasongko (Bappeda Kota Semarang), "Kebijakan Adaptasi perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Kota Semarang", makalah yang dipresentasikan dalam Lolakarya Nasional Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Dalam Kebijakan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah, di Hotel Grand Kemang Jakarta, 29 Maret 2012.

²² Agus Susanto, "Strategi Konservasi Pemanfaatan Air Tanah sebagai Sumber Air Bersih di Kota Semarang yang Berkelanjutan" (<http://www.pustaka.ut.ac.id/...iding2/fmipa201037.pdf>. diakses 1 Desember 2013).

²³ Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, *Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang Tahun 2011*, tidak diterbitkan.

²⁴ Saputro, M. Seno dan Muhammad Nawawi, *Analisis Abrasi Pantai Semarang Bagian Barat*, Tesis, (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2010), p.2.

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Perubahan iklim juga berdampak terhadap Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis terhadap data iklim historis, Kota Bandar Lampung terjadi perubahan tren dan variabilitas iklim seperti suhu dan curah hujan. Hal tersebut dapat dilihat dari tren peningkatan suhu permukaan rata-rata selama 100 tahun terakhir. Perubahan curah hujan musiman juga ditemukan pergeseran, yaitu pergeseran awal musim dan perubahan frekuensi curah hujan ekstrim.²⁵ Adanya kejadian iklim ekstrim tersebut berdampak pada munculnya berbagai bencana seperti: ²⁶ (1) banjir yang meningkat secara kuantitas (frekuensi) dan kualitas (luasan kawasan). Di Kota Bandar Lampung teridentifikasi ada 42 lokasi yang rawan banjir.²⁷ Banjir mengakibatkan tambak masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan terendam, sehingga terjadi gagal panen; (2) kenaikan air permukaan laut dan erosi pantai (abrasi) yang berdampak langsung terhadap nelayan atau penduduk yang bermukim di kawasan pesisir.²⁸ Rumah mereka rusak, apalagi rumah mereka umumnya semi-permanen. Akibat lain adalah air bersih menjadi mahal, terjadi intrusi air laut, rusaknya biota laut, dan terganggunya mata pencaharian mereka. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan mencari ikan; (3) kekeringan yang berdampak sulitnya mendapatkan air bersih, muncul penyakit yang diakibatkan air yang tidak bersih, dan terjadi gagal panen; (4) Erosi dan longsor. Topografi Kota Bandar Lampung yang berbukit dengan pemandangan alam laut mendorong penduduk memanfaatkan gunung dan bukit sebagai alternatif tempat tinggal. Banyak lahan beralih fungsi menjadi kawasan tempat tinggal. Akibatnya ketika musim hujan tiba dengan intensitas yang tinggi, bencana longsor dan erosi kerap terjadi. Umumnya yang terkena dampak longsor adalah masyarakat miskin yang banyak tinggal di kaki bukit;²⁹ (5)

²⁵ Kelompok Kerja Kota, *Strategi Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Perubahan Iklim 2011-2030*, (Bandar Lampung: Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCRN), 2011), p.4.

²⁶ Desti Mega Putri, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bandar, *Wawancara*, Kantor Bappeda Kota Bandar Lampung, 26 September 2013.

²⁷ Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Aksi Daerah Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2009 – 2013.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Bencana angin puting beliung sebagai akibat dari intensitas curah hujan yang semakin tinggi disertai angin karena rusaknya pohon sebagai pelindung jika terjadi angin kencang.³⁰

2. Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung

Perubahan iklim telah berdampak negatif bagi Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk menghadapi perubahan iklim tersebut dengan mengacu pada kebijakan nasional, seperti tertuang dalam RPJMN 2004–2009, RPJMN 2010–2014, Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR).

Setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi di daerahnya, disesuaikan dengan kondisi kerentanan wilayahnya dari perubahan iklim. Untuk Kota Semarang kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terakhir Pemerintah Kota Semarang menyusun Strategi Perubahan Iklim Terpadu Kota Semarang Tahun 2010–2020. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa kebijakan pengendalian perubahan iklim Kota Semarang sampai tahun 2020 ke depan diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Semarang menuju suatu kehidupan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan iklim dan efisien dalam menggunakan sumber daya dan energi. Pemerintah Kota Semarang memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4% dari emisi *business as usual* (BAU) pada tahun 2020.

Adapun kebijakan umum untuk mencapai tujuan pengendalian perubahan iklim di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia baik di pemerintah kota, kelompok swadaya masyarakat dan sektor swasta agar mampu mengelola sumber dan dampak perubahan iklim secara efektif.

³⁰ *Ibid.*

- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi dalam proses pembangunan, produksi dan operasi kegiatan baik di sektor publik maupun swasta.
- c. Mendorong dan memfasilitasi dialog dan kerja sama antara pemerintah kota, sektor swasta, dan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan tersebut akan dilakukan melalui 7 strategi:

1. *Peningkatan efisiensi energi* yang dilakukan melalui rencana aksi:
 - a. *Green procurement* di Pengadaan Barang Pemerintah. Untuk mendukung program ini dilakukan sosialisasi panduan, tips dan trik hemat energi, dan diselenggarakan lomba hemat energi antarSKPD.
 - b. Peningkatan efisiensi energi pada LPJU (lampu penerangan jalan umum) dan reklame. Akan dibangun sistem informasi pengelolaan LPJU dan reklame dan pengembangan *intelligent light management system* (meteran, LHE, *diming system*, sistem pemantauan).
 - c. Peningkatan pengelolaan kendaraan dinas, akan dilakukan dengan mengatur jumlah cc dan usia kendaraan dinas, kontrak perawatan, restrukturisasi kendaraan yang hemat BBM, peningkatan layanan bus karyawan dan pengembangan system pool di kantor.
 - d. Manajemen penggunaan BBM, dilakukan dengan cara penggantian BBM dengan BBM yang lebih rendah emisi seperti biosolar, pertamax, gas) di stasiun BBM, pengaturan voucher BBM dan BBM non bersubsidi bagi kendaraan dinas.
 - e. Manajemen lalu lintas, yaitu dengan melakukan pemantauan kepadatan lalu lintas dan distribusi arus lalu lintas melalui optimalisasi matriks asal tujuan, serta penerapan *3 in 1* dan *car free day* di kawasan-kawasan tertentu.
 - f. Peningkatan pengelolaan angkutan massal, yang dilakukan dengan penambahan armada baru BRT Trans Semarang (200 bus), peremajaan angkutan umum massal (300 bus), dan pengembangan disinsentif kendaraan pribadi seperti menaikkan tarif parkir, *3 in 1*, dan *car free day*. Peningkatan angkutan massal dilakukan dengan membangun *bus rapid*

- transid* (BRT) yang direncanakan 3 koridor. Saat ini sudah dibangun 2 koridor yaitu koridor I Mangkang - Penggaron dan koridor II Terboyo – Sisemut/Ungaran.³¹
- g. Pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif. Direncanakan akan memanfaatkan gas *methan* dari IPAL sebagai pengganti LPG.
 - h. Kampanye dan pelatihan *smart driving* pada sopir-sopir di lingkungan pemerintah kota.
2. *Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu* yang akan dilakukan melalui rencana aksi:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana daur ulang sampah: pembangunan TPST/tempat pengolahan sampah terpadu (16 unit s.d. tahun 2020); pembangunan rumah pilah (7 unit); sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengelolaan sampah; dan optimalisasi 15 TPST yang telah ada.
 - b. Gerakan kebersihan dan pengelolaan sampah: kampanye pengurangan sampah, gerakan bersih-bersih kota baik di sungai, laut, drainase dan ruang publik.
 - c. Penegakan perda kebersihan.
 - d. Program Kali Bersih (Prokasih): pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai dari pencemaran dan limbah.
 - e. Optimalisasi pengolahan sampah di TPA Jatibarang melalui *intermediary transfer facility*: peningkatan kapasitas pengolahan sampah menjadi kompos; pemanfaatan residu sampah (yang tidak bisa dikomposkan) untuk sumber energi.
 - f. Penyuluhan dan pengawasan sanitasi lingkungan (penyuluhan manfaat dan penggunaan *septic tank*).
 - g. Pengembangan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) domestik terpadu berbasis masyarakat. Akan dibangun 20 IPAL dan pemanfaatan biogas dari IPAL tersebut. Selain itu juga pemerintah daerah akan menyediakan bantuan teknis (4 tenaga ahli) dan bantuan pengadaan lahan di 20 lokasi.
3. *Pengendalian penyakit menular terkait dampak perubahan iklim* yang akan dilakukan melalui rencana aksi:

³¹ Bambang Kuntarso, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Kantor Dinas Hubkominfo Kota Semarang, 10 Oktober 2013.

- a. Pengembangan sistem peringatan dini pengendalian perubahan iklim: pemetaan kawasan rawan penyakit menular serta kajian dan perencanaan sistem komunikasi dan koordinasi kesehatan.
 - b. Pelaksanaan Perda pengendalian DBD (Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyakit Demam Berdarah Dengue).
 - c. Peningkatan advokasi dukungan CSR.
 - d. Pengembangan kapasitas petugas kesehatan dan masyarakat dalam sistem pengendalian penyakit: pelatihan *trainer* dan kader Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), peningkatan gerakan 3 M (menguras, menutup, mengubur) dan PSN, serta perbaikan metode penyuluhan.
 - e. Pengembangan posko kesehatan di daerah rawan penyakit menular: pemetaan kawasan rawan penyakit menular, pembangunan posko kesehatan, dan pelatihan kader.
 - f. Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat: sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam promosi PHBS.
4. *Peningkatan penyediaan dan pelayanan air bersih* yang dilakukan melalui rencana aksi:
- a. Penyaluran bantuan air bersih (tangki air *hydrant* umum) ke lokasi-lokasi yang rawan kekeringan di musim kemarau.
 - b. Pemanenan air hujan (*rain harvesting*). Direncanakan dibangun 10 fasilitas pemanenan air hujan.
 - c. Pemeliharaan dan perbaikan sumur umum: identifikasi dan pemetaan sumur yang terkontaminasi. Terkait program ini, Pemerintah daerah memberikan bantuan rehabilitasi sumur.
 - d. Gerakan hemat air.
 - e. Peningkatan instalasi pengolahan air bersih.
 - f. Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah: dikaji penambahan pajak terhadap pemanfaatan air bawah tanah dan dilakukan penertiban sumur-sumur air bawah tanah liar.
 - g. Gerakan penghijauan: pembangunan pusat pembibitan, pemilihan vegetasi yang sesuai, dan penanaman pohon oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

5. *Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana terkait perubahan iklim yang akan dilakukan melalui rencana aksi:*
 - a. Peningkatan pendidikan pengelolaan bencana dan perubahan iklim: integrasi pembelajaran siaga bencana dan perubahan iklim di pendidikan dasar.
 - b. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): pelatihan *trainer* siaga bencana, pelatihan taruna siaga bencana, dan sosialisasi kawasan rawan bencana.
 - c. Pembangunan sistem kesiagaan bencana banjir: kajian dan perencanaan sistem peringatan dini (*early warning system*), koordinasi dengan daerah asal banjir, dan membangun sistem evakuasi dan perlindungan (*flood shelter*).
 - d. Pengembangan talud vegetatif pencegah longsor: indentifikasi kawasan rawan longsor dan dilakukan pembangunan talud vegetatif.
 - e. Bantuan rehabilitasi rumah dan kebutuhan pokok: pemberian santunan biaya pengobatan/bantuan sosial, pembagian sembako pasca-bencana, pemberian stimulus rehabilitasi rumah.
 - f. Pengembangan pusat perubahan iklim perkotaan.
6. *Pengendalian dampak banjir dan rob yang akan dilakukan melalui rencana aksi:*
 - a. Peninggian sarana prasarana umum yang dilakukan berdasarkan kajian dan perencanaan peninggian sarana dan prasarana (seperti jalan, jembatan, tempat pelelangan ikan, puskesmas, sekolah, kantor pemerintahan).
 - b. Pembangunan alat penahan ombak/APO di bibir pantai yang terkena abrasi.
 - c. Pengembangan sabuk hijau (*green belt*) mangrove: penertiban sempadan pantai dan rehabilitasi dan penanaman kawasan sempadan pantai dengan mangrove.
 - d. Pembuatan tanggul dan *floodway* yang dibuat didasarkan kajian dan perencanaan *floodway* dan tanggul.
 - e. Penambahan dan penataan pompa dan rumah pompa.
 - f. Normalisasi sungai yang dilakukan dengan perbaikan alur sungai.

- g. Peremajaan kawasan terdampak rob dan banjir dengan menambah kawasan ruang terbuka hijau.
 - h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir: pelatihan dan fasilitasi budidaya alternatif dan pengelolaan ketahanan pangan, dan pelatihan dan fasilitasi pemanfaatan limbah perikanan.
7. *Pengendalian bangunan dan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui rencana aksi:*
- a. Pengembangan pedoman pengawasan bangunan: pengembangan pedoman struktur bangunan, penyusunan SOP pengawasan, dan sosialisasi prosedur pengawasan.
 - b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan IMB: penambahan personil pengawas sebanyak 4 orang, selain dilakukan peningkatan kapasitas tim pengawas IMB.
 - c. Pengaturan dan penertiban pemanfaatan lahan termasuk di kawasan hulu sehingga pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Pengembangan panduan bangunan ramah lingkungan termasuk di dalamnya aspek pengelolaan energi, limbah, air bersih/hujan, dan sirkulasi udara di bangunan.
 - e. Evaluasi dan integrasi perubahan iklim dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) termasuk di dalamnya evaluasi pola dan pemanfaatan ruang dan integrasi risiko iklim dan GRK dalam rencana pola dan pemanfaatan ruang.
 - f. Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH): pembangunan taman-taman kota sebagai ruang publik hijau dan peningkatan jumlah dan distribusi ruang terbuka hijau.

Dari berbagai program tersebut ada 12 program yang ditujukan untuk mitigasi perubahan iklim yaitu *green procurement* di Pengadaan Barang Pemerintah (strategi 1), peningkatan efisiensi energi pada LPJU dan reklame (strategi 1), manajemen penggunaan BBM (strategi 1), peningkatan pengelolaan angkutan massal (strategi 1), pembangunan sarana dan prasarana daur ulang sampah (strategi 2), optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Jatibarang melalui *intermediary transfer facility* (strategi 2), pengembangan IPAL domestic berbasis masyarakat (strategi 2), gerakan penghijauan (strategi 4), pengembangan sabuk hijau (*green belt*) mangrove

(strategi 6), penambahan dan penataan pompa dan rumah pompa (strategi 6), dan peningkatan ruang terbuka hijau (strategi 7).

Adapun program yang ditujukan untuk adaptasi perubahan iklim yaitu sistem peringatan dini banjir (*flood early warning system DAS Beringin 2012–2015*), program pengurangan kejadian penyakit vector (*action changing the incidence of vector-borne endemic diseases 2013–2016*), perkuatan ketahanan masyarakat pesisir melalui perkuatan ekosistem dan alternatif mata pencaharian (*enhancing coastal community resilience by strengthening ecosystem services and developing alternative livelihoods in Semarang City 2013–2016*), dan *upstream conservation of the Garang river basin* melalui kegiatan *agro-forestry* yang berkelanjutan dan mekanisme kredit mikro.

Berbagai rencana aksi tersebut tidak secara keseluruhan berjalan sebagaimana diharapkan. Seperti rencana aksi yang dilakukan BLHD Kota Semarang dalam kegiatan *Rain Water Harvesting/RWH* (pemanenan air hujan). Kegiatan yang dilakukan sejak 2011, dimulai dengan membangun 15 instalasi RWH skala rumah tangga dan 1 titik instalasi RWH skala komunal yang dapat melayani kebutuhan air untuk toilet sekolah (SD Tandang 3) dengan 581 siswa dan 20 guru, dan memasok air bersih untuk 50–60 rumah tangga di desa Wonosari. Kemudian tahun 2012 dibangun 23 instalasi RWH skala rumah tangga.³² Namun kegiatan RWH yang dilakukan oleh komunitas yang ada di desa Wonosari tidak berkembang. Dalam kegiatan RWH yang disentuh adalah pola pikir masyarakat untuk memanfaatkan air hujan yang ada untuk persediaan ketika musim kemarau tiba. Untuk mengubah pola pikir masyarakat dibutuhkan waktu. Karena program hanya dilakukan sekadar proyek, program RWH yang dilakukan di komunitas tidak berjalan.³³

Demikian juga kegiatan *Flood Early Warning System* - Sistem Peringatan Dini Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin. Dalam pelaksanaan program ini, BLHD dibantu LSM Bintari yang bertindak sebagai pendamping masyarakat dalam antisipasi banjir DAS Beringin. Dalam rangka pelaksanaan program ini masyarakat dilatih untuk

³² Gunawan Wicaksono, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, *Wawancara*, Kota Semarang, 8 Oktober 2013.

³³ Akademisi Undip dan LSM Bintari, *FGD*, Fakultas Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 10 Oktober 2013; masyarakat di DAS Beringin, *wawancara*, Kecamatan Ngaliyan, 11 Oktober 2013.

pertolongan pertama, evakuasi korban dan kecelakaan akibat banjir. Masyarakat juga dibuatkan jalur evakuasi. Namun program ini menjadi kurang berarti jika tidak diiringi dengan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hulu. Telah terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan hulu yang semula merupakan kawasan *catchment area* menjadi kawasan perumahan. Rusaknya kawasan hulu telah memperbesar terjadinya banjir di kawasan ini.

Berbagai program aksi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dihadapkan pada banyak kendala, seperti:

- a. Kurangnya atau tidak adanya kemauan politik dan visi yang kuat dari kepala daerah. Tidak adanya kemauan politik dan komitmen dari kepala daerah terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berpengaruh terhadap penentuan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- b. Koordinasi antar-SKPD lemah sehingga program antar-SKPD tidak terkoordinasi dengan baik. Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkesan saling tumpang tindih.
- c. Ketergantungan Kota Semarang terhadap daerah sekitarnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masa depan Kota Semarang.
- d. Lemahnya SDM yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat menghilangkan kesempatan adaptasi untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam arti untuk SDM di pemerintahan, belum semua sektor memahami tentang perubahan iklim. Tidak adanya atau minimnya pengetahuan SDM pemerintahan akan isu perubahan iklim menyulitkan untuk pelaksanaan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Demikian juga dengan SDM masyarakat dengan pengetahuan yang minim akan isu perubahan iklim sehingga tidak muncul kesadaran masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk Kota Bandar Lampung, upaya menghadapi perubahan iklim belum tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan mitigasi perubahan iklim tersebar dalam berbagai kebijakan sektor, yaitu:³⁴

³⁴ Desti Mega Putri, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bandar, *Wawancara*, Kantor Bappeda Kota Bandar Lampung, 26 September 2013.

- a. Di sektor perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mulai tahun 2011 memperkenalkan angkutan umum massal (*mass rapid transportation*) Trans Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi emisi CO₂ dan pencemaran udara.
- b. Di sektor lingkungan hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BPLD) Kota Bandar Lampung melakukan pengukuran uji emisi. Uji emisi sudah dilakukan sejak tahun 2010, tetapi pelaksanaan pada tahun 2010 masih dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2011 dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melalui dana dekonsentrasi. Baru pada tahun 2013 pelaksanaan uji emisi dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung, melalui BPLD Kota Bandar Lampung.³⁵
- c. Di sektor pekerjaan umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung melakukan efisiensi energi penerangan jalan dengan menggunakan *system timer*, sistem sensor cahaya, dan penggunaan lampu *solar cell* (panel surya).
- d. Di sektor kehutanan dan pekerjaan umum, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH). Saat ini RTH Kota Bandar Lampung diperkirakan baru mencapai 28–29%.

Sementara kebijakan adaptasi perubahan iklim dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam arahan kegiatan ACCRN (*The Asian Cities Climate Change Resilience Network*). Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang dijadikan *pilot project* ACCRN sejak tahun 2009 hingga 2014. Ada beberapa dokumen yang disusun dalam rangka adaptasi perubahan iklim, yaitu: (1) dokumen studi kerentanan terhadap perubahan iklim; (2) dokumen strategi adaptasi perubahan iklim; dan (3) dokumen indikator ketahanan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun strategi adaptasi sebagai berikut:

³⁵ Sekretaris BPLD, Kasie Penataan Lingkungan Hidup, Kabid Konservasi, Kabid Pertambangan, Kabid Pengawasan dan Pengendalian, dan Kasub Program BPLD Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Kantor BPLD Kota Bandar Lampung, 24 September 2013.

- a. Untuk menghadapi musim kemarau akan dilakukan pengembangan PDAM Way Rilau melalui penambangan sumber air baku dari Way Sekampung dan rehabilitasi lahan kritis hulu Sungai Way Kuripan (Way Jernih dan Way Betung);
- b. Untuk menghadapi musim penghujan akan dilakukan perbaikan sistem drainase, penanganan sampah terpadu, dan pembangunan sistem air limbah perkotaan.

Strategi adaptasi tersebut akan dilakukan oleh beberapa sektor, yaitu:

- a. Sektor air bersih, diprioritaskan untuk (1) meningkatkan cakupan layanan air bersih yang akan dilakukan melalui pengadaan air baku, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pengadaan hidran umum dan tangki air, dan pengembangan teknologi air bersih; dan (2) penghematan air dan pemanfaatan kembali yang dilakukan melalui pengadaan lahan lokasi dam dan embung, pembangunan dan pemeliharaan dam dan embung, penerapan *Rain Water Harvesting* (pemanenan air hujan atau tabungan air hujan), dan penyimpanan air di drainase primer (*main drain*).
- b. Sektor lingkungan hidup, diprioritaskan pada (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan melalui penyusunan rencana pengelolaan hutan dan lahan kritis, inventarisasi ruang terbuka hijau, penghijauan gunung, bukit, wilayah resapan air dan bantaran sungai, penanaman mangrove, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau dan wilayah tangkapan air serta pemantauan dan pengawasan; (2) pembuatan sumur resapan dan biopori yang dilakukan melalui kajian wilayah wajib sumur resapan dan biopori, pembuatan peraturan daerah, serta pemantauan dan pengawasan; (3) pengelolaan limbah rumah tangga, pasar, dan industri secara terpadu yang dilakukan melalui penyusunan *master plan* Air Limbah dan *detail engineering design* (DED) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, pengadaan lahan lokasi pembangunan IPAL, pembuatan IPAL terpadu untuk rumah tangga dan industri, serta pemantauan dan pengawasan.
- c. Sektor infrastruktur diprioritaskan pada (1) pembangunan talud di sekitar wilayah rawan longsor yang dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan talud; (2) pembangunan dan

- pemeliharaan drainase terpadu yang dilakukan melalui evaluasi Master plan drainase, penyusunan DED, pembangunan jaringan drainase, pemeliharaan jaringan drainase, dan pengerukan sungai; (3) pengelolaan sampah secara terpadu yang dilakukan melalui studi manajemen sampah, pemberdayaan SOKLI, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga melalui 4R + P (*reduce, reuse, recycle, replace* dan *participation*); dan (4) penataan pemukiman yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana yang dilakukan melalui inventarisasi pemukiman rawan bencana, penyusunan DED, permukiman kembali (*resettlement*), pembangunan rusunawa (rumah susun sewa) atau rusunami (rumah susun milik), rumah panggung dan penyediaan infrastruktur pada lokasi evakuasi bencana.
- d. Sektor kelautan, pesisir, dan perikanan, sektor diprioritaskan pada (1) pembangunan tanggul pemecah ombak yang dilakukan melalui kajian penerapan tanggul pemecah ombak dan pembangunan dan pemeliharaan tanggul; (2) pengendalian intrusi air laut yang dilakukan melalui studi intrusi air laut, pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, serta pemantauan dan pengawasan; (3) penyaringan air payau yang dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan air payau dan penyaringan air payau; dan (4) penyelamatan biota laut yang dilakukan melalui inventarisasi kondisi biota laut, penyelamatan biota laut, pengendalian limbah, serta pemantauan dan pengawasan.
- e. Sektor pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan pada (1) pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi tentang dampak dan upaya adaptasi perubahan iklim, penyusunan kurikulum pendidikan adaptasi perubahan iklim, pelatihan kurikulum kepada tenaga pendidik, implementasi kurikulum menjadi muatan lokal dalam pendidikan formal, pelatihan keterampilan kepada masyarakat rentan, nelayan, perempuan dan pemuda, fasilitasi akses permodalan, pengembangan sistem peringatan dini; (2) pengembangan asuransi.
- f. sektor pengembangan kapasitas kelembagaan, diprioritaskan pada (1) penegakan peraturan daerah (perda) yang dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penyusunan perda baru, serta penegakan dan pengawasan perda; (2) pembentukan unit pelaksana teknis (UPT)

yang dilakukan melalui pembentukan UPT, pengadaan sarana dan prasana UPT, dan fasilitasi kerja sama dengan instansi lain.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kebijakan yang disusun terlaksana dengan baik. Seperti pengembangan *mass rapid* yang dilakukan dalam rangka untuk mengurangi emisi CO₂ di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaannya pengembangan *mass rapid* terkendala oleh beberapa hal. *Pertama*, *mass rapid* dikembangkan oleh swasta tanpa subsidi dari pemerintah kota. Hal ini cukup memberatkan bagi pihak swasta untuk mengembangkannya karena mereka harus menyiapkan infrastrukturnya, seperti jalur bus, halte, dll. *Kedua*, pengembangan *mass rapid* tidak sejalan dengan pembangunan kota. Sebagai contoh, pada mulanya sudah dibangun 7 koridor namun saat ini hanya tinggal 2 koridor yang berfungsi karena adanya pembangunan jalan layang yang dilakukan pemerintah kota yang mematikan jalur yang sudah dibangun untuk *mass rapid*. Kemudian penggunaan lampu *solar cell* yang dinilai tidak efektif untuk penerangan jalan, karena lampu *solar cell* kurang terang. Kebijakan ini kemudian dihapuskan dan penerangan jalan kembali menggunakan lampu dari PLN.

Hal lainnya yang juga tidak berjalan dengan baik adalah upaya menambah luasan ruang terbuka hijau. Ada kebijakan dari pemerintah kota Bandar Lampung bahwa setiap pengembang hanya boleh membangun kawasannya sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. RTH dapat dimasukkan dalam fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bentuknya dapat berupa embung, taman bermain, dll yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau cadangan air jika terjadi kebakaran. Namun kebijakan ini bentuknya hanya himbauan yang diberikan saat pengembang mengajukan proses perizinan sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif.³⁶ Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kota Bandar Lampung yang memiliki kewenangan untuk membangun embung tidak dapat melakukannya karena terkendala pada kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung yang tidak mengizinkan adanya penggantian tanah untuk pembangunan.³⁷

³⁶ Sekretaris BPLD, Kasie Penataan Lingkungan Hidup, Kabid Konservasi, Kabid Pertambangan, Kabid Pengawasan dan Pengendalian, dan Kasub Program, *wawancara*, Kantor BPLD Kota Bandar Lampung, 24 September 2013.

³⁷ Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kota Bandar Lampung, *wawancara*, Kantor Dinas PU dan SDA Bandar Lampung, 26 September 2013.

Pelaksanaan perbaikan drainase juga mengalami kesulitan, terutama untuk daerah permukiman. Kendalanya adalah masalah kewenangan. Kewenangan pemerintah kota adalah drainase jalan kota dan drainase lingkungan. Ketika ada masalah pada drainase jalan utama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Dinas PU Provinsi) maka Dinas PU-SDA Kota tidak dapat melakukan apa-apa karena bukan kewenangannya. Kendala lainnya adalah adanya keterbatasan lahan perkotaan. Ketika secara ketentuan drainase yang harus dibangun adalah 80 cm tetapi lahan yang tersedia hanya 60 cm maka pihak Dinaspun hanya akan membangun sesuai lahan yang tersedia. Perbedaan ukuran dari yang seharusnya tentunya menjadikan drainase tidak dapat bekerja secara optimal.³⁸

Upaya lainnya yang juga mengalami kendala dalam pelaksanaan adalah pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dihadapkan pada masalah ego sektoral dari masing-masing SKPD dan rendahnya rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada badan air (sungai, got, saluran air) mengakibatkan sampah sering menghambat aliran sungai/drainase yang ada dan ketika musim penghujan tiba terjadi penumpukan sampah di kawasan pesisir. Ego sektoral mengakibatkan sampah di kawasan pesisir dan sampah yang menumpuk di sungai atau drainase tidak tertangani. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung merasa itu bukan kewenangan mereka. Namun dinas-dinas lain yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan merasa itu juga bukan kewenangan mereka. Pada akhirnya, sampah di drainase, di sungai, atau di kawasan pesisir tidak tertangani.³⁹

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya melibatkan semua

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Kantor Dinas KP Kota Bandar Lampung, 27 September 2013; Pejabat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Kantor BLHD Kota Bandar Lampung, 24 September 2013; dan Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, *Wawancara*, Kantor Dinas PU dan SDA Provinsi Lampung, 26 September 2013.

SKPD yang ada. Namun pada pelaksanaannya tidak semua SKPD terlibat. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan di sektor kelautan, pesisir, dan perikanan. Dalam strategi adaptasi perubahan iklim, sektor kelautan, pesisir, dan perikanan termasuk salah satu sektor yang terkena dampak dan yang direncanakan harus melakukan berbagai upaya adaptasi. Namun pada kenyataannya, rencana upaya-upaya adaptasi seperti yang tertuang dalam dokumen strategi adaptasi perubahan iklim tidak sejalan dengan rencana kegiatan di SKPD.⁴⁰ Tidak sejalanannya rencana program SKPD dengan rencana strategi adaptasi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Bappeda selaku *leading sector* dalam penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim dengan SKPD yang ada. Tidak adanya komunikasi yang baik antarSKPD yang terkait inilah yang menjadikan upaya-upaya adaptasi atau mitigasi perubahan iklim tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

IV. Penutup

Perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah perkotaan, terutama perkotaan yang memiliki kawasan pesisir. Perubahan iklim telah meningkatkan intensitas angin puting beliung, gelombang panas, dan kekeringan yang sulit ditanggulangi. Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung adalah dua kota di Indonesia yang terkena dampak buruk dari perubahan iklim. Dampak perubahan iklim bagi Kota Semarang terlihat dari terjadinya kenaikan suhu permukaan, meningkatnya intensitas hujan, kenaikan muka air laut dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Akibat perubahan iklim tersebut antara lain, banjir baik banjir kiriman, banjir lokal maupun banjir rob yang semakin meningkat luasan dan intensitasnya, kekeringan dan krisis air bersih, serta erosi pantai (abrasi). Sedangkan bagi Kota Bandar Lampung perubahan iklim mengakibatkan meluasnya kawasan yang terkena banjir (bertambahnya lokasi banjir), kenaikan air laut dan abrasi, kekeringan ketika musim kemarau, erosi dan longsor, serta puting beliung. Untuk masyarakat di kawasan pesisir yang sebagian besar nelayan, perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan

⁴⁰ Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, Kantor Dinas KP Kota Bandar Lampung, 27 September 2013.

sosial ekonominya. Terjadinya banjir rob, pasang air laut, dan angin kencang berpotensi terhadap gagal panen dikarenakan nelayan tidak bisa melaut. Sementara dampak perubahan iklim bagi Kota Semarang antara lain banjir (banjir karena sungai meluap, banjir karena drainase tidak berfungsi, banjir kiriman, dan banjir karena air laut pasang/rob), kekeringan, dan erosi pantai (abrasi).

Kedua daerah tersebut menyadari perlunya upaya untuk menghadapi perubahan iklim berupa upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan Kota Semarang dalam menghadapi perubahan iklim secara umum adalah: (a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia baik di pemerintah kota, kelompok swadaya masyarakat dan sektor swasta agar mampu mengelola sumber dan dampak perubahan iklim secara efektif; (b) Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi dalam proses pembangunan, produksi dan operasi kegiatan baik di sektor publik maupun swasta; dan (c) Mendorong dan memfasilitasi dialog dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kebijakan umum tersebut dilakukan dalam beberapa aksi, yaitu: (a) Peningkatan efisiensi energi; (b) Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu; (c) Pengendalian penyakit menular terkait dampak perubahan iklim; (d) Peningkatan penyediaan dan pelayanan air bersih; (e) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana terkait perubahan iklim; (f) Pengendalian dampak banjir dan rob; dan (g) Pengendalian bangunan dan pemanfaatan ruang. Namun tidak semua rencana berjalan baik. Hal ini terjadi karena kegiatan yang dibuat tidak menyentuh pada pola pikir masyarakat sehingga tidak berkelanjutan. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya atau tidak adanya kemauan politik dan visi yang kuat dari Kepala Daerah, lemahnya koordinasi antar-SKPD, ketergantungan Kota Semarang terhadap daerah sekitar, dan lemahnya SDM yang ada di pemerintahan dan di masyarakat.

Sementara kebijakan Kota Bandar Lampung dalam menghadapi perubahan iklim adalah melakukan pengembangan *mass rapid transportation*, pengukuran uji emisi, efisiensi energi penerangan jalan, menambah luasan RTH, meningkatkan cakupan layanan air bersih, penghematan air dan pemanfaatan kembali air, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembuatan sumur resapan dan biopori, pengelolaan limbah secara terpadu, pembangunan talud,

pembangunan dan pemeliharaan drainase terpadu, pengelolaan sampah terpadu, penataan pemukiman yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana, pembangunan tanggul pemecah ombak, pengendalian intrusi air laut, penyaringan air payau, penyelamatan biota laut, pemberdayaan masyarakat, pengembangan asuransi, penegakan perda, dan pembentukan UPT.

Seperti halnya Kota Semarang, tidak semua kebijakan berjalan dengan baik. Beberapa kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan antara lain, pengembangan *mass rapid transportation*, penambahan RTH, perbaikan drainase, dan pengelolaan sampah terpadu. Pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak semua SKPD dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak sejalan dengan program SKPD. Atau dengan kata lain tidak ada perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar-semua sektor. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antar-sektor.

Keberhasilan pembangunan selain ditentukan oleh perencanaan yang baik, pada hakikatnya juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Mengutip pendapat Conyers yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan karena tiga hal. *Pertama*, merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. *Ketiga*, partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi bagi masyarakat.⁴¹

Oleh karena itu ke depan, pemerintah daerah seharusnya melibatkan masyarakat dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi, baik dalam perencanaan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Karena setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahnya. Keterlibatannya dapat secara langsung atau melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

⁴¹ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), p. 154-155.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Conyers, Diana., *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press, 1991.
- Mulyana, Wahyu., “Kota dan Perubahan Iklim: Strategi Ketahanan Kota Menghadapi Dampak Perubahan Iklim” dalam Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, *Bungai Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), p.71–90.
- Murdiyarso, Daniel., *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.
- Prasad, Neeraj., Federica Ranghieri, Fatima Shah, Zoe Trohanis, Earl Kessler, Ravi Sinha, *Kota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010.
- Saputro, M. Seno., Muhammad Nawawi, “Analisis Abrasi Pantai Semarang Bagian Barat,” *Tesis*, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2010.

Artikel dalam jurnal, *working paper*, majalah, dan surat kabar

- Mulyana, Wahyu., David Dodman, Sainan Zhang, dan Daniel Schensul. “Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Metropolitan Semarang, Analisis Spasial dan Kependudukan”. *Technical Briefing UNFPA*. Oktober 2013.
- Parasati, Hayu., “Kebijakan Perkotaan Terkait Perubahan Iklim”, *Buletin Tataruang*, Edisi Januari–Februari, 2012, pp. 15–18.

Artikel dalam seminar/pertemuan

Sasongko, Purnomo Dwi., “Kebijakan Adaptasi perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Kota Semarang”, makalah yang dipresentasikan dalam Lolakarya Nasional Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana Dalam Kebijakan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah, di Hotel Grand Kemang Jakarta, 29 Maret 2012.

Artikel dalam internet

Joga. Nirwono., “Kota-kota di Indonesia dan Perubahan Iklim”, (<http://www.investor.co.id/home/kota-kota-di-indonesia-dan-perubahan-iklim/21164>, diakses 1 agustus 2013).

Kurniawan, Teddy., “Studi Perubahan Iklim Mengancam Pembangunan Indonesia”, (<http://www.beritasatu.com/ipitek/120929-studi-perubahan-iklim-mengancam-pembangunan-indonesia.html>, diakses 1 Agustus 2013).

Siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup, “Rapat Koordinasi Nasional Program Adipura” (<http://www.menlh.go.id/sp-rapat-koordinasi-nasional-program-adipura/>, di akses 2 Agustus 2013).

Susanto, Agus., “Strategi Konservasi Pemanfaatan Air Tanah sebagai Sumber Air Bersih di Kota Semarang yang Berkelanjutan” (<http://www.pustaka.ut.ac.id/...iding2/fmipa201037.pdf>, diakses 1 Desember 2013).

Widiantono, Doni J., *Kota Berkelanjutan: Membangun Kota Tanpa Luka*, (http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/Kota%20Berkelanjutan%20Membangun%20Kota%20Tanpa%20Luka-DR.Ir.Doni%20J.Wididantono,M.Eng.Sc.PDF, diakses 12 April 2013).

Dokumen

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, *Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang Tahun 2011*, tidak diterbitkan.

- Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPN) 2010 – 2025*. Jakarta: Direktorat Perkotaan Perdesaan Bappenas dan Direktorat Bina Program Cipta Karya PU, 2010.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2007.
- The World Bank. *Guide to Climate Change Adaptation in Cities*. Washington: Urban Development and Local Government Unit, Sustainable Development Network, The world Bank, 2011.
- Kelompok Kerja Kota, *Strategi Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Perubahan Iklim 2011–2030*. Bandar Lampung: Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCRN), 2011.
- Rencana Strategis dan Rencana Aksi Daerah Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2009 – 2013.

EPILOG

Sebagaimana konsep lainnya, pembangunan selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Apabila dahulu pembangunan lebih memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, maka seiring dengan kerusakan alam yang terus terjadi, muncullah kemudian konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks ini, tawaran yang diajukan oleh Mohammad Mulyadi dalam bab awal buku ini menjadi relevan. Munculnya isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seiring dengan gagasan merebaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang masih mengikuti paradigma pembangunan ekonomi konvensional menurut penulis menjadi penting untuk dikaji. Mengingat pembangunan manusia bertujuan lebih luas dan mencakup aspek sosial, kultural, dan politik, maka untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, pemerintah perlu meningkatkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan memudahkan akses masyarakat untuk mencapai kesempatan ekonomidan kesempatan sosial lainnya, terutama pendidikan dan kesehatan.

Kesehatan sebagai salah satu aspek pembangunan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, aspek ini juga perlu mendapat perhatian khusus. Tulisan Tri Rini Puji Lestari pada Bab II menunjukkan bahwa kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi oleh setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu sehingga dapat hidup secara produktif dan bermartabat. Terciptanya masyarakat sehat adalah salah satu indikator keberhasilan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk itu berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan

kesehatan dalam pencapaian target SDGs perlu dipecahkan dengan memerhatikan keterkaitan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menggunakan pendekatan interdisiplin.

Aspek sosial lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah pendidikan. Tulisan dalam Bab III yang ditulis oleh Faridah Alawiyah menunjukkan kaitan antara aspek pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan. Penulis fokus pada Program Indonesia Pintar yang diluncurkan oleh pemerintah, sebuah program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan akses bagi anak-anak berusia sekolah (6–21 tahun) guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Menurut penulis, pemerintah telah berupaya mengatasi berbagai kendala dalam program ini. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian sebagai upaya untuk perbaikan program ini ke depan, antara lain pendidikan nonformal, kondisi geografis Indonesia, akses ke sektor perbankan, serta penyiapan guru, sarana, dan prasarana pendidikan.

Kemiskinan sebagai salah satu “musuh” pembangunan juga perlu mendapat perhatian jika kita membicarakan masalah pembangunan. Untuk melawan kemiskinan, berbagai sektor dikerahkan, melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing sektor. Salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah. Isu ini diangkat oleh Dinar Wahyuni dan tampil pada Bab IV. Penulis berasumsi kemiskinan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kelompok miskin di Indonesia membutuhkan kebijakan yang diarahkan langsung pada akar permasalahannya, yakni meningkatkan kemampuan individu melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam pendidikan. Dalam hal ini, partisipasi ditekankan pada keterlibatan aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah, karena lembaga ini merupakan representasi dari berbagai unsur pendidikan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Masih menjadikan kemiskinan sebagai fokus bahasan, Herlina Astri pada Bab V menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (efisiensi dan pertumbuhan), tujuan ekologi (konservasi sumber daya alam), dan tujuan sosial (mengurangi kemiskinan dan pemerataan). Penulis menyayangkan fakta bahwa selama ini pembangunan yang dijalankan di Indonesia tidak memerhatikan kaidah-kaidah konsep pembangunan berkelanjutan, yang dapat dilihat antara lain dalam masalah kerusakan hutan, konversi lahan, pencemaran udara, pembuangan limbah, kesenjangan sosial, tingginya jumlah penduduk miskin, dan menjamurnya budaya korupsi. Untuk itu diusulkan agar dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam-ekologi, dan peradaban.

Perspektif gender juga perlu dihadirkan sebagai salah satu aspek pembangunan berkelanjutan. Dina Martiany dalam Bab VI buku ini memaparkan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai katalisator yang dapat mempercepat pencapaian SDGs dalam berbagai bidang lainnya. Perspektif gender akan mendorong pemenuhan target spesifik SDGs sekaligus mencapai tujuan kesetaraan gender. Sinergitas antara tujuan kesetaraan gender dan tujuan lainnya akan mempercepat pemenuhan indikator yang telah ditetapkan sebagai ukuran dari masing-masing tujuan. Oleh karena itu segala bentuk kerangka kerja pembangunan global, termasuk SDGs, harus didukung dengan implementasi yang berperspektif gender, termasuk pembiayaan pembangunan, peningkatan *sharing* pengetahuan, *capacity-building*, pengembangan dan transfer teknologi, serta pengumpulan dan pertukaran data. Perspektif gender harus menjadi pusat dari setiap area pembangunan, dan partisipasi perempuan sebagai kunci dari desain, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi.

Selain aspek sosial, pembangunan berkelanjutan juga perlu memerhatikan aspek ekonomi. Bagian kedua buku ini menampilkan kaitan antara aspek ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan

melalui tulisan Edmira Rivani yang memaparkan peran sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan. Penulis menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan penerapan secara sektoral dan parsial. Pendekatan yang egosektoral tersebut mengakibatkan banyak komitmen Indonesia pada banyak konvensi dan kesepakatan internasional tidak dapat dilaksanakan secara penuh di lapangan. Pendekatan egosektoral tersebut juga yang menyebabkan dalam era persaingan global saat ini, Indonesia selalu ketinggalan dan belum memperlihatkan komitmen tinggi terhadap berbagai kesepakatan global. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan secara terpadu, lintas sektoral, dan lintas disiplin ilmu, baik pada tingkat pusat dan/atau daerah.

Last but not least, dimensi lingkungan sebagai salah satu dimensi dalam pembangunan berkelanjutan juga menjadi fokus bahasan dalam buku ini. Sri Nurhayati Qodriyatun pada akhir buku ini menekankan pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian penulis di dua kota yaitu Semarang dan Lampung menunjukkan bahwa perubahan iklim telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim bagi Kota Semarang terlihat dari terjadinya kenaikan suhu permukaan, meningkatnya intensitas hujan, kenaikan muka air laut dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Sementara bagi Kota Bandar Lampung perubahan iklim mengakibatkan meluasnya kawasan yang terkena banjir (bertambahnya lokasi banjir), kenaikan air laut dan abrasi, kekeringan ketika musim kemarau, erosi dan longsor, serta puting beliung. Oleh karena itu ke depan, pemerintah daerah seharusnya melibatkan masyarakat dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi, baik dalam perencanaan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya.

Dari delapan tulisan yang ada dalam buku ini, ada satu benang merah yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang memiliki beragam aspek, dan keseluruhan aspek tersebut harus mendapat perhatian jika kita menginginkan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Untuk itu, prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan

kebutuhan generasi masa depan”, harus tetap kita pegang teguh dan menjadi acuan bagi semua pihak terkait sehingga prinsip tersebut tidak sekadar menjadi sebuah slogan.

Jakarta, Oktober 2015

Sali Susiana

INDEKS

A

Access, 23, 135, 136, 146,

Achmadi, 50

Amartya Sen, 15

Amerika Selatan, 46

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), 63

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (APBNP),
63

Angka Partisipasi Murni (APM), 59

Angka Kematian Ibu (AKI), 47, 127

Anjuman Zuhri, 59

APBD, 23, 63

Asia Timur, 46, 180, 186

Australia, 165, 183

B

Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan (BP3), 98

Balai Latihan Kerja (BLK), 63

Bantuan Siswa Miskin (BSM), 60, 62

Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), 60, 101

Berkelanjutan, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 29,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 62,
66, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94,
106, 107, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 127, 128, 129,

130, 131, 133, 134, 135, 136,

137, 138, 140, 142, 149, 150,

157, 158, 162, 170, 172, 173,

198, 206

BBM, 24, 87, 193, 198

Benefit, 39

Bojonegoro, 58

Brazil, 94, 130

Brebes, 58

Budaya Literasi Sekolah (BLS), 103

C

China, 94, 165

Community development, 6, 12

Community power, 6

Community disorganization, 6

Core values, 7

Cost, 39, 40

D

Decision making, 19, 144, 146

Deklarasi Universal, 33

Dimensi Sosial, 133, 140

Demokratis, 5, 98, 105, 119, 144

Demografis, 18

Denis Gaulet, 7

Deprivation trap, 29

Disadvantaged group, 11

Discounting, 38, 113

DKI Jakarta, 20, 186

DPR, 23, 171

E

Edi Suharto, 10

Economic overtone, 21

Ekonomi, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 78, 85, 88, 89, 90, 92, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 172, 173, 186, 187, 188, 197, 199

Environmental development, 14, 36

Equity and Justice, 38

Eropa Selatan, 46

F

Filipina, 59

Freedom, 7, 143

G

GBHN, 4

GNP, 4, 40

Geografis, 18, 75, 79, 143, 182, 183, 188

Gerokgak, 59

Gross Domestic Product (GDP), 40

Gro Harlem Brundtland, 36

Gross National Product/GNP, 40

growth and equity of strategy development, 7

Gustav Ranis, 15

H

Hak Asasi Manusia (HAM), 13

HDR, 15

HIV/AIDs, 34, 48, 128

Human development, 7, 11, 15, 36, 43, 45, 56

Human capital, 9, 11

Human Development Index/HDI, 43

Human trafficking, 22

I

I Ketut Dunia, 59

India, 15, 94, 165, 171, 184

Indonesia, 4, 5, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 91, 94, 95, 100, 106, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 121, 123, 127, 130, 131, 148, 158, 160, 164, 165, 167, 169, 173, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 206

Infant Mortality Rate, 42

Inflasi, 4

Inpres Desa Tertinggal (IDT), 120

Integrative Approach, 38

Interdisipliner, 12

Internasional, 4, 13, 18, 33, 41, 58, 85, 86, 106, 114, 123, 149, 161, 173

Investasi, 5, 7, 9, 16, 23, 24, 25, 27, 33, 45, 56, 114

Infeksi Menular Seksual (IMS), 48

IPM, 15

J

Jawa Tengah, 58, 166

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 26

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 26

Jepang, 46

K

Kanada , 94
Kartasasmita, 11
Kartu Indonesia Pintar (KIP), 61
Kartu Indonesia Sehat (KIS), 61
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 61
Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 61
Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), 61
Kapitalis, 29, 30, 164
Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), 41
Kegiatan Kreatif dan Produktif (KKP), 103
Khairuddin, 22
Komite sekolah, 85, 87, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109,
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), 3, 85
Konsep Pembangunan, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 29, 35, 37, 51, 89, 90, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 157
Korten, 16, 17, 19
Kurva Lorenz, 41

L

Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), 63
Life Expectancy Rate, 42
Lingkungan, 3, 4, 14, 20, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 47, 50, 51, 55, 58, 64, 85, 86, 87, 89, 90, 106, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 150, 158, 159, 161, 162, 172, 173, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 194, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 205

Lord Meghnad Desai, 15
London School of Economics, 15

M

Makro, 10, 39, 40, 45, 46
Mahbub ul Haq, 15
Mahkamah Konstitusi, 23
Malaria, 34, 50, 128, 142
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 97
Memodifikasi, 6
Menko PMK, 64
Midgley, 10, 12
Millennium Declaration, 34
Millennium Development Goals (MDGs), 34, 37, 125
Mindset, 24

N

Nasional Bruto, 40
Nelson W. Polsby, 6
New York, 86, 134
Ni Ayu Krisna Dewi, 59
Non-Governmental Organizations (NGO), 37

O

Otokrasi, 5
Orde baru, 19

P

Pakistan, 15
Paradigma, 3, 9, 13, 14, 17, 24, 29, 49, 118, 149
Pembangunan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55,

- 56, 62, 64, 66, 72, 73, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 160, 161, 162, 172, 173, 179, 181, 184, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208
- Pendapatan Domestik Bruto (PDB), 40
- People centered development*, 14, 16
- Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), 98
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 13, 35
- Prayitno, 13
- Presiden, 4, 61, 64, 65, 131
- Profit oriented, 14
- Program Indonesia Pintar (PIP), 61
- Program Keluarga Harapan (PKH), 67
- Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), 120
- Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 120
- Politik global 4
- POM (Persatuan Orang Tua Murid), 98
- Poverty trap*, 21
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 63, 66
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), 73
- Puskesmas, 25, 27, 28, 196
- Q**
- Quintiles* atau *deciles*, 41
- Quality Control*, 73
- R**
- Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), 187
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), 101
- Revolusi industri, 46
- Rio de Janeiro, 85, 86
- Rochman, 13
- Rogers, 4
- RPJMN, 46, 47, 86, 187
- RPJPK, 46, 47, 86, 187, 192
- Rusia, 94
- S**
- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 63, 66
- Sekolah Dasar (SD), 72, 103
- Sekolah Menengah Atas (SMA), 72
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 72
- Sekolah Menengah Pertama (SMP), 72, 103
- Singapura, 18, 59
- Social capital*, 11, 56
- Social deprivation*, 21
- Social functioning*, 11
- Social welfare development*, 11
- Social welfare services*, 12
- South Afrika, 94
- Suwandi, 7
- Sriharini, 22, 29
- Stockholm Swedia, 3
- Stockholm Conference*, 37
- Stockholm Declaration*, 4

- self esteem*, 7
state obligation, 10
 Supriatna, 7, 8
 Sumber daya manusia (SDM), 8, 112
 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 127
Stakeholder, 13, 96, 99, 101, 149, 181
 Sumodiningrat, 26
 Sumber Daya Alam (SDA), 3, 112
Sustainable Development Goals (SDGs), 34, 86, 125, 129, 151
Sustainable development, 3, 7, 14, 34, 86, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 151, 157
 Swedia, 3
- T**
- Thailand, 59, 165
The International Encyclopedia of the Social Sciences, 6
 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 64
 Tjokroamidjojo, 8
Trickle down effect, 6
Total factor productivity, 9
- Top down*, 19, 120
- U**
- UKM, 20
Uncertainty, 35
 UNCHE, 3, 4
 UNDP, 15, 29, 43
 UNICEF, 58
 Uni Eropa, 94
United Nations Environment Programme (UNEP), 4
 UUD 1945, 22, 23, 57, 63, 78
- V**
- Vietnam, 59, 165
Vulnerable group, 11
- W**
- WHO, 33
World Commission on Environment and Development (WCED), 36
World Summit, 36, 37
World Trade Organizations (WTO), 37
- Y**
- Yale University, 15

BIOGRAFI

Dina Martiany. Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982. Menyelesaikan S-1 Hukum Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 2003, kemudian melanjutkan S-2 Kajian Gender di Program Studi Pasca Sarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Saat ini merupakan Peneliti Muda Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Kepakaran Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Beberapa tulisan ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: “Perspektif Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2013”; “Pelindungan Perempuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PRT di Hong Kong” dalam Buku *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial* (2013); dan “Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas”, dalam buku: *Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (2014). Alamat e-mail: dina8333@gmail.com.

Dinar Wahyuni. Peneliti Muda Bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosiatri Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan Magister Sosiologi di institusi yang sama tahun 2007. Minat profesional pada isu-isu masalah sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain Analisis Permasalahan Data Kemiskinan: Basis Data Terpadu; Perdagangan Orang: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Pencegahan, dan Penanganan (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau). Tulisan yang dihasilkan lebih banyak mencermati permasalahan sosial, seperti: Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Alternatif Pemberdayaan KAT Di Kepulauan Raja Ampat (2014); “Kebijakan Pendidikan yang Ramah terhadap Penyandang Disabilitas” dalam buku *Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (2014); Pencapaian Pendidikan

Dasar di Indonesia dalam MDGs (2014); dan Migrasi Internasional dan Pembangunan dalam *Jurnal Kajian* Vol. 18, No. 4, Desember 2013. Peneliti dapat dihubungi di alamat *e-mail*: hi_dins@yahoo.com.

Edmira Rivani. Menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik yang telah dilakukan penulis antara lain: Kebijakan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dalam Perumahan Rakyat: Studi Implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat; Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pariwisata Nasional; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru; dan Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Pasca-Kebijakan Baru Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.

Faridah Alawiyah. Peneliti Muda dengan kepakaran Studi Pendidikan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI. Magister Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: “Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi”, “Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika dalam Rangka Pencapaian MDGs 2015”, “Akses Pendidikan Tinggi dan Penyebarannya”, “Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Keterjangkauan Pendidikan”. Dapat dihubungi melalui *e-mail*: faridah.alawiyah@dpr.go.id.

Herlina Astri. Menyelesaikan Pendidikan Sp-1 Pekerjaan Sosial Klinis di STKS Bandung (2006-2008). Menjadi peneliti Bidang Kerja Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2009. Minat profesional di bidang ilmu Pekerjaan Sosial dengan kepakaran evaluasi program sosial, kebijakan sosial & pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menjadi anggota tim asistensi untuk RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (2014 dan 2015). Tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain (1) “Peningkatan Eksistensi Diri Penyandang Disabilitas melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat” dalam buku *Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*; (2) “Jalan Panjang Penegakan Aturan Pornografi di Indonesia” dalam buku *Permasalahan Pembangunan Pasca-Pemerintahan SBY*; (3) “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaaan” dalam buku *Kebijakan Pemerintahan SBY*; (4) “Meningkatkan Pengawasan pada Pekerja Anak di Jermal” dalam buku *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*. Dapat dihubungi di alamat *e-mail*: herlina.astri@gmail.com.

Mohammad Mulyadi. Lahir di Makassar, 13 Maret 1976. Menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran tahun 2008. Saat ini penulis aktif sebagai peneliti di P3DI Setjen DPR RI dan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Di samping itu, juga menjadi konsultan peneliti di beberapa lembaga pemerintah dan swasta. Aktivitas keseharian banyak didedikasikan untuk menulis isu-isu sosial politik dan menjadi pembicara di beberapa seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis aparatur pemerintahan daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Tulisan dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktik Kombinasinya dalam Penelitian Sosial; 3) Selamatkan Hati Kita; 4) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 5) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 6) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 7) Desa, Dinamika Kehidupan Sosial di Desa; 8) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (bagian dari buku); 9) Konsep Dasar dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (bagian dari buku); 10) Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR. Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail*: mohammadmulyadi@yahoo.co.id.

Sali Susiana. Peneliti Utama Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada P3DI Setjen DPR RI. Menjadi peneliti P3DI sejak tahun 1996. Pendidikan sarjana dari Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister dari Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005). Menjadi anggota tim asistensi untuk Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia (2011); Tim Pengawas DPR RI untuk Perlindungan TKI (2014 dan 2015); dan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2011), RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2011-2014), dan RUU tentang Penyandang Disabilitas (2015). Melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan, antara lain: Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Perempuan (2015); Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (2014); Rekrutmen Perempuan Calon Anggota DPRD Provinsi: Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 (2013); dan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Proses Legislasi dan Penyusunan Anggaran atas biaya United Nations Development Program (2008). Menjadi editor dan kontributor dari beberapa buku yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI dan menulis beberapa artikel mengenai isu perempuan dan gender pada jurnal ilmiah dan surat kabar. Buku yang telah diterbitkan yaitu Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan (2011); dan Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif (2013).

Sri Nurhayati Qodriyatun. Lahir di Yogyakarta, 19 November 1970. Menyelesaikan pendidikan sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada tahun 1993 dan Magister Ilmu Lingkungan di Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia tahun 2005. Penulis bekerja di Setjen DPR RI sejak 1996 dan menjadi peneliti pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI sejak tahun 1999. Penulis aktif melakukan penelitian berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Beberapa hasil penelitian sudah dipublikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah nasional dan buku, antara lain: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan

Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Jurnal, 2014); Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kabupaten Gianyar) (Bunga Rampai, 2014); Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan: Permasalahan yang Belum terselesaikan (Bunga Rampai, 2014); Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam melalui Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal, 2013); Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Kontribusi terhadap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (Bunga Rampai, 2013); Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat melalui Model Desa Konservasi (Buku, 2013). Penulis juga aktif terlibat dalam penyusunan Naskah Akademis dan pembahasan undang-undang di DPR RI, antara lain: UU tentang Pangan (2013), UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (2013), UU tentang Konservasi Tanah dan Air (2014). *E-mail*: sri.qodriyatun@dpr.go.id.

Tri Rini Puji Lestari. Lahir di Jakarta, 8 Mei 1969. Peneliti bidang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Masuk sebagai CPNS pada 1 Maret 1998. Diangkat menjadi PNS 1 Mei 1999 dan diangkat menjadi peneliti pada 1 Agustus 2000. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1997 dan S2 pada tahun 2004 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sejak tahun 2000 penulis aktif melakukan penelitian di bidang kesehatan masyarakat dan membuat karya tulis ilmiah dibukukan dan di jurnal ilmiah baik terakreditasi maupun belum terakreditasi. Karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan selama dua tahun terakhir di antaranya Kebijakan Penyediaan Obat di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Implementasi BPJS Bidang Kesehatan 2014, Pendidikan Keperawatan: Upaya untuk Menghasilkan Tenaga Perawat Berkualitas, Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peran UU Nakes dan Tantangan Masalah Kesehatan Indonesia. Alamat *e-mail* tririnipl@hotmail.com.